

**ANALISIS KINERJA PERAN KAWASAN PENGEMBANGAN  
EKONOMI TERPADU (KAPET) DALAM PENGEMBANGAN  
WILAYAH DI KABUPATEN BIMA  
NUSA TENGGARA BARAT**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**RIRIN KURNIAWATI**  
L4D004128

**Pembimbing Utama :**

DR. Syafrudin Budiningharto, SU

**Pembimbing I :**

R. Mulyo Hendarto, SE, MSP

**Pembimbing II :**

Samsul Ma'rif, SP, MT



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
SEMARANG  
2006**

**ANALISIS KINERJA PERAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI  
TERPADU (KAPET) DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI  
KABUPATEN BIMA NTB**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

**RIRIN KURNIAWATI  
L4D004128**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 18 Pebruari 2006

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 2 Maret 2006

Pembimbing II

Pembimbing I

**Samsul Ma'rif, SP, MT**

**R. Mulyo Hendarto, SE, MSP**

Pembimbing Utama

**Dr. Syafrudin Budiningharto, SU**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

**Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 2 Maret 2006

**RIRIN KURNIAWATI**  
**L4D004128**

**Maka Siapakah yang lebih dzalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?  
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dzalim  
(QS. Al-An'am,6:144)**

Rasulullah SAW Bersabda  
"Tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari pada ilmu karena ilmu mengantarkan pemiliknya kepada petunjuk dan mencegahnya dari kebinasaan. Seseorang tak dapat lurus agamanya sebelum lurus akalnya"  
(ath-Thabrani)

**Tesis ini kupersembahkan untuk.....  
Papa dan Mama Tercinta.....  
Adik-adikku tersayang.....  
Masku Tersayang.....**

# ANALISIS KINERJA PERAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BIMA NTB

Oleh :  
RIRIN KURNIAWATI

## ABSTRAK

Masalah kemiskinan telah menyebabkan kesenjangan yang antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Sebagai upaya untuk menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah pusat mendirikan Kapet sebanyak 13 buah yang diharapkan dapat menjadi Prime Mover bagi daerah sekitarnya melalui apa yang disebut Trickle Down Effect (Spread Effect). Salah satu Kapet di Kawasan Timur Indonesia adalah Kapet Bima. Dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa investasi yang masuk di Kapet Bima sangatlah minim sehingga perlu diketahui "Bagaimanakah Kinerja Fungsi Kapet dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bima dan Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Skoring, Analisis Faktor, Analisis SWOT dan Proses Hirarki Analitik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil indikator kinerja Kapet adalah : Pendapatan Perkapita, PDRB, Nilai Investasi, Nilai Ekspor, Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase PDRB dari Industri Pengolahan. Kinerja Kapet dalam Pengembangan wilayah di Kabupaten Bima adalah **tidak berhasil** bahkan ketimpangan antar Kabupaten dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 1996-2002 semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bima antara lain : Kinerja Lembaga BP Kapet yang belum optimal dalam pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima), Kabupaten Bima tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan, Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung pengembangan Kapet, Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam) dan faktor terakhir adalah Manajemen Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat. Terdapat 8 strategi untuk pengembangan Kapet Bima antara lain : Reformasi Manajemen Kapet , Melakukan Promosi mengenai peluang investasi , Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur wilayah, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia , Koordinasi antara BP. Kapet dengan Pemerintah Daerah setempat, Optimalisasi kinerja BP. Kapet, Peningkatan kualitas komoditas unggulan dan strategi terakhir adalah Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Kapet. Sedangkan alternatif terpilih kewenangan pengelolaan Kapet yang terpilih melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah Regionalisasi Desentralistik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kinerja Kapet dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bima **tidak berhasil** karena dipengaruhi oleh faktor-faktor : Kinerja Lembaga BP Kapet yang belum optimal dalam pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima), Kabupaten Bima tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan, Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung pengembangan Kapet, Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam) dan Manajemen Pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut direkomendasikan untuk melakukan 8 strategi dan direkomendasikan untuk mereformasi manajemen Kapet dengan pendekatan Bottom Up melalui Regionalisasi Desentralistik dengan Regional Management sebagai pengelolanya , Penelitian mengenai Regional Management dalam Pengelolaan Kapet, Perluasan wilayah Kapet termasuk Kabupaten Sumbawa serta Penelitian lebih dalam mengenai pemilihan lokasi Kapet, untuk melengkapi penelitian ini direkomendasikan penelitian tentang Kapet dengan : Melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan, Lingkup wilayah studi yang lebih luas yang terdiri dari Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima, melibatkan nara sumber dari Pemerintah Pusat sebagai penggagas utama Kapet dan memperhatikan keakuratan data dalam penelitian.

**Kata Kunci** : Analisis Kinerja, Kapet, Pengembangan Wilayah

**PERFORMANCE ANALYSIS OF ECONOMIC INTEGRATED DEVELOPMENT  
ZONE (KAPET) ROLE IN REGIONAL DEVELOPMENT  
AT BIMA WEST NUSA TENGGARA**

By :  
RIRIN KURNIAWATI

**ABSTRACTS**

*Poverty problem have causes disparity between west and east Indonesia area, as an effort to eliminate the difference of that, central government found 13 Kapet that expected can become Prime Mover for area of around him pass through what we called Trickle Down Effect ( Spread Effect). One of the Kapet in east Indonesia area is Kapet Bima. In growth here in it seem's that investment at Kapet Bima very minim so that it is important to know " How Performance The Function of Kapet in Region Development in Sub-Province of Bima and whats factors influencing him"*

*The Method using in this research are : Scoring, Factor analysis, SWOT analysis and Analitical Hierarchy Process (AHP) According to those analysis result which have been done Kapet Performance indicator are : Earnings Of Per capita, GDRP, Investment Value, Exporting Value, Human Development Index and GDRP Percentage of Industry sector. Performance of Kapet in regional development at Bima west nusa tenggara is **unsuccesfull** even disparity between Sub-Province in Province West Nusa Tenggara during range of time 1996-2003 progressively mounts. Performance influencing Factors of Kapet in Development of Region in Sub-Province of Bima are : Institute Performance of BP Kapet which not optimize yet in regional development of Kapet Bima ( Sub-Province of Bima), Sub-Province of Bima imprecise as Growth Center, Lack of the siding from Local Government in supporting development of Kapet, Human Resource and low of bargain position of Pre eminent commodity (Natural Resources) and the last factor is Management of Kapet which still dominated by Central Government. and there are 8 strategy to develop Kapet Bima they are: Management Reform of Kapet , Promotion opportunities of investment, , Make-Up of regional facilities and infrastructure, Make-Up of Human Resource quality, Coordination between BP. Kapet with local Government , Optimizing Performance of BP. Kapet, , Make-Up of pre-eminent commodity quality and The Last Strategy is Transparency and Accountability of Kapet management. While chosen management alternative of KAPET by Analytical Hierarchy Process ( AHP) is Decentralize Regionalization by Regional Management.*

*The conclusion of this research is Kapet Performance In Regional Development at Bima West Nusa Tenggara is **unsuccesfull** because influence by factors: : Institute Performance of BP Kapet which not optimally yet in regional development of Kapet Bima ( Sub-Province of Bima), Sub-Province of Bima imprecise as Growth Center, Lack of the siding from Local Government in supporting development of Kapet, Human Resource and low of bargain position of Pre eminent commodity (Natural Resources) and the last factor is Management of Kapet which still dominated by Central Government. To solve that problem are recommended to do 8 strategy of Kapet Development, and it recommended to reform Management of Kapet with Bottom up approach pass through Decentralize Regionalization which Regional Management (RM) as the manager. More research about regional management in Kapet management Extending of Kapet area include sub province of sumbawa and More Research about Location criterion of Kapet. To complete this research it's also recommended to do the research with stakeholder involve in decision making,, Study of Kapet with larger area including Dompu and Bima City, Study of Kapet with Central government as a conceptr of Kapet and pay attention at data. accurating*

**Keywords :** PerformanceAnalysis, Economic Integrated Development Zone, Regional Development

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah. SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister Teknik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini antara lain :

1. Bapak Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, ST atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan ini.
2. Bapak Prof.Dr.Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA selaku Ketua Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota (MPWK)
3. Bapak Ir. Djoko Sugiono, M.Eng.Sc selaku Ketua Balai Kerjasama Pusbikteknik dan Universitas Diponegoro
4. Bapak Dr. Syafrudin Budiningharto, SU selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Tesis ini.
5. Bapak Drs. R.Mulyo Hendarto, MSP selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi masukan dan perbaikan.
6. Bapak Samsul Ma'rif, SP, MT selaku Pembimbing II atas bimbingan dan bantuannya.
7. Bapak Dipl. Ing Benyamin Abdurrahman selaku Penguji I atas arahan, kritik dan saran-saran perbaikan
8. Bapak Ir. Okto Risdianto Manulang, MT selaku Penguji II atas kritik dan saran-saran yang diberikan
9. Papa, Mama dan Adik-adikku Tercinta atas Do'a dan dukungannya
10. Masku tersayang atas bantuan dan pengertiannya
11. Teman-teman satu angkatan MPPWK IV atas bantuan dan dukungannya
12. Semua Pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan Tesis ini

Tesis ini tentunya masih jauh dari sempurna, harapan penulis Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

Semarang, Februari 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACTS</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum Penelitian .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian .....	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4.1 Ruang Lingkup Materi .....	5
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	12
1.5.1 Pendekatan Metode Penelitian .....	12
1.5.2 Tahapan Penelitian .....	12
1.5.3 Kerangka Pikir Analisis .....	13
1.5.4 Metode Analisis Penelitian .....	15
1.5.4.1 Identifikasi Indikator Kinerja dengan Metode Skoring (Skala Likert).....	15
1.5.4.2 Pengukuran Kinerja Kapet .....	16
1.5.4.3 Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet .....	19
1.5.4.4 Analisis Strategi Pengembangan Kapet dengan SWOT .....	20
1.5.4.5 Analisis Strategi Pengelolaan Kapet dengan AHP (Analytical Hierarchy Process) .....	26
1.5.5 Data Penelitian .....	29
1.5.5.1 Kebutuhan Data.....	29
1.5.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	30
1.5.5.3 Teknik Pengolahan Data .....	31
1.5.6 Teknik Sampling .....	33
1.5.7 Jumlah Sampel (Nara Sumber) .....	34



<b>BAB II KAJIAN LITERATUR ANALISIS KINERJA PERAN KAPET</b>		
<b>DAN FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA .....</b>		<b>36</b>
2.1	Analisis Kebijakan .....	36
	2.1.1 Evaluasi dalam Analisis Kebijakan.....	36
	2.1.2 Sifat Evaluasi .....	37
	2.1.3 Fungsi Evaluasi .....	39
	2.1.4 Pendekatan terhadap evaluasi .....	40
2.2	Indikator Kinerja .....	41
	2.2.1 Langkah- langkah pemilihan Indikator Kinerja .....	42
	2.2.2 Kriteria Indikator Kinerja.....	46
2.3	Indikator Kinerja Kapet.....	47
	2.3.1 Pertumbuhan dan Pengembangan Wilayah.....	47
	2.3.2 Pengembangan Wilayah.....	48
	2.3.3 Pendekatan Pengembangan Wilayah .....	49
	2.3.3.1 Pendekatan Sisi Permintaan .....	49
	2.3.3.2 Pendekatan Sisi Penawaran.....	51
	2.3.4 Teori-Teori Perkembangan Wilayah.....	53
	2.3.4.1 Teori tempat Pusat .....	53
	2.3.4.2 Teori Kutub Pertumbuhan.....	54
	2.3.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	56
	2.3.6 Indikator pertumbuhan ekonomi.....	58
	2.3.6.1 Indikator Moneter .....	58
	2.3.6.2 Indikator Non Moneter.....	58
2.4	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet.....	61
2.5	Alternatif Pengelolaan Kapet .....	65
	2.5.1 Regionalisasi Sentralistik (Sentralisasi).....	66
	2.5.2 Regionalisasi Transformatik (Dekonsentrasi).....	67
	2.5.3 Regionalisasi Desentralistik (Desentralisasi).....	68
	2.5.4 Pengelolaan oleh Pihak Ketiga (Konsultan Ahli) .....	70
2.6	Rangkuman Literatur .....	70
	2.6.1 Indikator Kinerja Kapet.....	70
	2.6.2 Kriteria Indikator Kinerja Kapet .....	72
	2.6.3 Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet.....	74
	2.6.4 Manfaat dan Beban Pembinaan dan Pengelolaan Kapet... 76	
	2.6.4.1 Manfaat Pembinaan dan Pengelolaan Kapet.....	76
	2.6.4.2 Beban Pembinaan dan Pengelolaan Kapet.....	77
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KAPET BIMA DAN WILAYAH</b>		
<b>KABUPATEN BIMA.....</b>		<b>78</b>
3.1	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.....	78
	3.1.1 Pengembangan Kapet.....	79
	3.1.2 Pemberian Insentif Investasi .....	80
	3.1.3 Pengembangan Komoditas Potensial.....	80
3.2	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima.....	82
	3.2.1 Organisasi.....	82
	3.2.2 Visi dan Misi Kapet Bima.....	85

	3.2.2.1	Visi .....	85
	3.2.2.2	Misi .....	85
	3.2.3	Kebijaksanaan .....	86
	3.2.4	Strategi Pengembangan .....	86
	3.2.5	Program dan Kegiatan .....	87
	3.2.6	Pendanaan .....	89
	3.2.7	Peluang Kapet Bima .....	89
	3.2.8	Isu dan Permasalahan Kapet Bima .....	90
3.3		Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Bima .....	90
	3.3.1	Letak Geografis dan Administrasi .....	90
	3.3.2	Kondisi Fisik Dasar .....	91
	3.3.2.1	Klimatologi .....	91
	3.3.2.2	Erosi Tanah .....	92
3.4		Kondisi Fisik Binaan .....	93
	3.4.1	Luas Wilayah Dan Penggunaan Lahan .....	93
	3.4.2	Status Penguasaan Tanah .....	94
	3.4.3	Sebaran dan luas lahan kritis, rawan bencana, kerusakan hutan .....	95
3.5		Sarana dan Prasarana .....	96
	3.5.1	Transportasi .....	96
	3.5.1.1	Transportasi Darat .....	96
	3.5.1.2	Transportasi Udara .....	97
	3.5.1.3	Transportasi Laut .....	98
	3.5.2	Utilitas .....	99
	3.5.2.1	Jaringan listrik .....	99
	3.5.2.2	Telekomunikasi .....	101
3.6		Potensi Sumber Daya Alam .....	101
	3.6.1	Pertanian .....	101
	3.6.1.1	Sub Sektor Tanaman Pangan .....	101
	3.6.1.2	Sub Sektor Kehutanan .....	102
	3.6.1.3	Sub Sektor Perkebunan .....	102
	3.6.1.4	Sub Sektor Peternakan .....	103
	3.6.1.5	Sub Sektor Perikanan .....	104
	3.6.2	Sektor Industri .....	104
	3.6.3	Sektor Pariwisata .....	105
	3.6.4	Sektor Pertambangan dan Energi .....	105
3.7		Ekonomi .....	108
	3.7.1	Struktur Ekonomi .....	108
	3.7.2	Penanaman Modal Dalam Negeri .....	108
3.8		Rangkuman .....	111
	3.8.1	Potensi dan Permasalahan Kapet Bima .....	111
	3.8.1.1	Potensi Kapet Bima .....	111
	3.8.1.2	Permasalahan Kapet Bima .....	112
	3.8.2	Peluang Kapet Bima .....	112
3.9		Variabel Penelitian .....	113

<b>BAB IV ANALISIS KINERJA KAPET DAN FAKTOR-FAKTOR YANG</b>		
<b>MEMPENGARUHINYA .....</b>		<b>119</b>
4.1	Identifikasi Indikator Kinerja dengan Metode Skoring (Skala Likert) .....	119
4.2	Penilaian Kinerja Kapet .....	119
	4.2.1 Pengukuran Kinerja Kapet dengan Metode Skoring (Skala Thurstone/ Skala Statistik).....	119
	4.2.2 Identifikasi Spread Effect di Kabupaten Bima.....	121
4.3	Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet.....	123
	4.3.1 Analisis Kebijakan Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.....	123
	4.3.2 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kapet .....	128
4.4	Analisis Strategi Pengembangan Kapet dengan SWOT .....	134
	4.4.1 Tahap pertama Pengambilan Data yaitu Faktor Eksternal dan Internal .....	134
	4.4.1.1 Faktor Eksternal .....	135
	4.4.1.2 Faktor Internal.....	135
	4.4.2 Perhitungan Bobot dan Rating Faktor Internal dan Eksternal.....	137
	4.4.3 Pengambilan Keputusan.....	138
	4.4.4 Prioritas Strategi dan langkah Operasional.....	140
	4.4.5 Analisis Strategi Pengembangan Kapet .....	141
4.5	Analisis Strategi Reformasi Manajemen Kapet dengan AHP (Analitical Hierarchy Process) .....	148
	4.5.1 Manfaat dan Beban Pembinaan dan Pengelolaan Kapet. ....	148
	4.5.2 Hasil Penilaian Alternatif Bentuk Pembinaan dan Pengelolaan Kapet Bima .....	148
	4.5.3 Hasil Penilaian Manfaat dan Beban dari Setiap Alternatif.....	149
	4.5.3.1 Manfaat dari Setiap Alternatif.....	150
	4.5.3.2 Beban dari Setiap Alterantif.....	150
	4.5.3.3 Perbandingan Manfaat dan Beban dari Setiap Alternatif .....	151
	4.5.4 Analisis Manfaat dan Beban pada Kriteria Utama.....	152
	4.5.4.1 Manfaat dan Beban pada Kriteria Pemerintahan (Organisasi).....	152
	4.5.4.2 Manfaat dan Beban pada Kriteria Pembangunan .....	152
	4.5.4.3 Manfaat dan Beban pada Kriteria Sosial Kemasyarakatan .....	153
	4.5.5 Analisis Manfaat dan Beban pada Sub Kriteria Penilaian.....	154
	4.5.5.1 Manfaat pada Sub Kriteria .....	154
	4.5.3.4 Beban pada Sub Kriteria .....	159
	4.5.4 Alternatif terpilih.....	163

	4.5.5	Alternatif Terpilih dibandingkan <i>Status Quo</i> .....	165
4.6		Sintesa.....	166
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>			<b>174</b>
5.1		Kesimpulan .....	174
5.2		Rekomendasi.....	175
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>			<b>178</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>			<b>182</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL I.1	:	Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota Bima Tahun 1977 – 200 .....	4
TABEL I.2	:	Indikator Wilayah Tahun 2002 .....	6
TABEL I.3	:	Kecamatan di Kabupaten Bima.....	7
TABEL I.4	:	Indikator Kinerja Kapet.....	15
TABEL I.5	:	Penilaian Kinerja Kapet .....	17
TABEL I.6	:	Penilaian Faktor Internal.....	21
TABEL I.7	:	Penilaian Faktor Eksternal .....	23
TABEL I.8	:	Penilaian Strategi .....	25
TABEL I.9	:	Quantitative Strategic Planning Matrix.....	26
TABEL I.10	:	Kebutuhan Data.....	29
TABEL I.11	:	Jumlah Sampel .....	35
TABEL III.1	:	Potensi Kapet .....	81
TABEL III.2	:	Program dan Kegiatan Kapet .....	88
TABEL III.3	:	Lluas Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Bima (Ha) Tahun 2003 .....	91
TABEL III.4	:	Data Hujan di Wilayah Kabupaten Bima Dirinci Per Kecamatan Tahun 2003.....	92
TABEL III.5	:	Penggunaan Lahan Dirinci Menurut Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah di Kabupaten Bima Tahun 2003 .....	93
TABEL III.6	:	Status Tanah di Kabupaten Bima Tahun 2003.....	95
TABEL III.7	:	Lahan Sawah Dan Lahan Kering .....	95
TABEL III.8	:	Panjang Jalan Menurut Keadaan Status Jalan (km) di Kabupaten Bima Tahun 2003.....	97
TABEL III.9	:	Data Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Penerbangan Domestik Tahun 2000-2003.....	98
TABEL III.10	:	Bongkar Muat Barang Antar Pulau Melalui Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima Tahun 2000-2003 .....	99
TABEL III.11	:	Keadaan PLN Wilayah Xi Cabang Bima di Masing-Masing Kecamatan Tahun 2002.....	100
TABEL III.12	:	Jumlah Dan Sebaran Kantor Pos Pembantu di Kabupaten Bima Tahun 2003 .....	101
TABEL III.13	:	Perkembangan Luas Panen Dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Bima Tahun 2002- 2003 .....	102
TABEL III.14	:	Jenis Komoditi Perkebunan Di Kabupaten Bima Tahun 2002- 2003 .....	103
TABEL III.15	:	Perkembangan Ternak Besar di Kabupaten Bima Tahun 2000- 2003 .....	103
TABEL III.16	:	Potensi Produksi Perikanan dirinci Menurut Jenis Tahun 2002- 2003 .....	104
TABEL III.17	:	Potensi Tambang.....	105
TABEL III.18	:	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 – 2002 .....	108

TABEL III.19 :	Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Bima Sampai Dengan Tahun 2004 .....	108
TABEL III.20 :	Variabel Penelitian .....	114
TABEL IV.1 :	Indikator Kinerja Kapet Pada Tahun 1996-2003 Pada Kabupaten Bima .....	120
TABEL IV.2 :	Indeks Disparitas Propinsi Nusa Tenggara Barat.....	122
TABEL IV.3 :	Kebijakan Penetapan Kapet .....	126
TABEL IV.4 :	KMO And Bartlett's Test .....	129
TABEL IV.5 :	KMO And Bartlett's Test .....	129
TABEL IV.6 :	Rotated Component Matrix.....	131
TABEL IV.7 :	Distribusi Faktor .....	131
TABEL IV.8 :	Konsep Penetapan Kapet .....	133
TABEL IV.9 :	Bobot Dan Rating Faktor Internal.....	137
TABEL IV.10 :	Bobot Dan Rating Faktor Eksternal .....	138
TABEL IV.11 :	Matrix Strategi .....	139
TABEL IV.12 :	Prioritas Strategi.....	141
TABEL IV.13 :	Strategi Pengembangan Kapet .....	144
TABEL IV.14 :	Manfaat Dari Setiap Alternatif.....	150
TABEL IV.15 :	Beban Dari Setiap Alternatif.....	151
TABEL IV.16 :	Perbandingan Manfaat dan Beban dari Setiap Alternatif.....	151
TABEL IV.17 :	Perbandingan Manfaat Dan Beban dari Setiap Alternatif Pada Kriteria Pemerintahan .....	152
TABEL IV.18 :	Perbandingan Manfaat dan Beban dari Setiap Alternatif Pada Kriteria Pembangunan.....	153
TABEL IV.19 :	Perbandingan Manfaat Dan Beban Dari Setiap Alternatif Pada Kriteria Sosial Masyarakat.....	153
TABEL IV.20 :	Manfaat Pada Sub Kriteria Kesejahteraan Rakyat.....	154
TABEL IV.21 :	Manfaat Pada Sub Kriteria Partisipasi Masyarakat.....	155
TABEL IV.22 :	Manfaat Pada Sub Kriteria Pemerataan .....	155
TABEL IV.23 :	Manfaat Pada Sub Kriteria Investasi.....	156
TABEL IV.24 :	Manfaat Pada Sub Kriteria Pertumbuhan Ekonomi .....	156
TABEL IV.25 :	Manfaat Pada Sub Kriteria Akuntabilitas .....	157
TABEL IV.26 :	Manfaat Pada Sub Kriteria Efektif Dan Efisiensi .....	157
TABEL IV.27 :	Manfaat Pada Sub Kriteria Inovasi .....	158
TABEL IV.28 :	Manfaat Pada Sub Kriteria Profesionalisme .....	158
TABEL IV.29 :	Manfaat Pada Sub Kriteria Koordinasi .....	159
TABEL IV.30 :	beban Pada Sub Kriteria Disparitas.....	159
TABEL IV.31 :	Beban Pada Sub Kriteria Sentimen Kedaerahan.....	160
TABEL IV.32 :	Beban Pada Sub Kriteria Beban Penduduk Lokal.....	160
TABEL IV.33 :	Beban Pada Sub Kriteria Pembiayaan.....	161
TABEL IV.34 :	Beban Pada Sub Kriteria Regulasi .....	162
TABEL IV.35 :	Beban Pada Sub Kriteria Kompetensi Staf .....	162
TABEL IV.36 :	Beban Pada Sub Kriteria Fasilitas.....	163
TABEL IV.37 :	Manfaat Dan Beban Alternatif Terpilih .....	164
TABEL IV.38 :	Sintesa Hasil Penelitian.....	167

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 :	Wilayah Kapet Bima.....	9
GAMBAR 1.2 :	Kabupaten Bima Sebelum Pemekaran.....	10
GAMBAR 1.3 :	Kabupaten Bima Setelah Pemekaran.....	11
GAMBAR 1.4 :	Posisi Strategis.....	23
GAMBAR 3.1 :	Struktur Organisasi Kapet Bima.....	83
GAMBAR 3.2 :	Lokasi Investasi.....	110
GAMBAR 4.1 :	Grafik Indeks Disparitas dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat.....	122

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A .....	182
Lampiran A Narasumber Penelitian.....	182
Lampiran B .....	183
Lampiran B.1 Indikator Kinerja Kapet .....	183
Lampiran B.2 Kuisoner Model B.2.....	184
Lampiran B.3 Rata-Rata Penilaian Nara Sumber .....	187
Lampiran C .....	188
Lampiran C.1 Hasil Penilaian Kinerja .....	188
Lampiran C.2 Indeks Disparitas Antar Kabupaten dalam Propinsi NTB .....	189
Lampiran D .....	193
Lampiran D.1 Kebijakan Penetapan Kapet.....	193
Lampiran D.2 Rencana Kegiatan Kapet.....	214
Lampiran D.3 Analisis Faktor.....	217
Lampiran D.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Kapet .....	221
Lampiran D.5 Kuisoner Model D.5 .....	222
Lampiran D.6 Input Data Analisis Faktor.....	225
Lampiran E.....	226
Lampiran E.1 Analisis SWOT .....	226
Lampiran E.2 Kuisoner Model E.2 .....	229
Lampiran E.3 Kuisoner Model E.3 .....	231
Lampiran E.4 Kuisoner Model E.4 .....	233
Lampiran E.5 Hasil Perhitungan Bobot Faktor.....	234
Lampiran E.6 Hasil Perhitungan Rating Faktor.....	235
Lampiran E.7 Quantitative Strategic Planning Matrix.....	236
Lampiran F .....	244
Lampiran F.1 Proses Hirarki Analitik (Analitical Hierarchy Process).....	244
Lampiran F.2 Hirarki Manfaat dan Beban Pembinaan dan Pengelolaan Kapet.....	246
Lampiran F.3 Kuisoner Model F.3.....	249
Lampiran F.4 Hasil Perhitungan Expert Choice V.10 .....	261



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang terus menerus ada dan belum di dapatkan pemecahan yang memadai. Untuk negara berkembang seperti Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah yang kerap terjadi bahkan sudah merupakan suatu bagian dari proses pembangunan. Selain kemiskinan masalah lain yang turut menyertainya adalah masalah kesenjangan. Pengentasan kemiskinan diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat namun hal ini tidak dengan sendirinya mengatasi masalah kesenjangan.

Masalah kemiskinan dan kesenjangan ini dalam perkembangan selanjutnya menumbuhkan wacana sosial berupa pemisahan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, memang pada masa orde baru tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kebijakan pembangunan wilayah lebih banyak berorientasi pada Kawasan Barat Indonesia dari pada Kawasan Timur Indonesia sehingga menyebabkan kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. terdapat lebih dari 50 % penduduk Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan dan sebagian besar antaranya terdapat pada Kawasan Timur Indonesia.

Sejalan dengan era globalisasi dan perdagangan bebas yang menuntut daya saing dari tiap-tiap daerah, masalah kesenjangan ini mulai mendapat perhatian

dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyikapi keadaan ini dengan cara berusaha menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kawasan Timur Indonesia yang di harapkan dapat menjadi *prime mover* bagi daerah di sekitarnya. Sebagai pendekatan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kapet, merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan: memiliki potensi untuk cepat tumbuh, mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan memiliki potensi pengembalian investasi yang besar (Kepres No. 150 Tahun 2000). Di beberapa wilayah di Indonesia terdapat 13 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang di tetapkan oleh pemerintah.

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dibentuk berdasarkan Kepres No. 89 Tahun 1996 yang diperbaharui dengan Kepres No. 9 Tahun 1998 dan di sempurnakan lagi dengan Kepres No. 150 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet). Kapet yang telah di bentuk di Indonesia sebanyak 13 buah dengan 1 Kapet berada di Kawasan Barat Indonesia yaitu Kapet Sabang di NAD dan 12 lagi yang lainnya berada di Kawasan Timur Indonesia yaitu : Kapet Das Kakab ( Kalimantan Tengah), Kapet Sanggau (Kalimantan Barat), Kapet Batulicin (Kalimantan Selatan), Kapet Sasamba (Kalimantan Timur), Kapet Manado-Bitung (Sulawesi Utara), Kapet

Batui (Sulawesi Tengah), Kapet Pare-Pare (Sulawesi Selatan), Kapet Bukari (Sulawesi Tenggara), Kapet Bima (Nusa Tenggara Barat), Kapet Mbay (Nusa Tenggara Timur), Kapet Seram (Maluku) dan Kapet Biak (Papua)

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ini di dasarkan pada Teori Pusat Pertumbuhan (*growhtpole*) dengan harapan akan mampu membangkitkan perekonomian wilayah di sekitarnya. Kapet di harapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kawasan Timur Indonesia sekaligus juga sebagai sarana promosi bagi investor yang belum menanamkan modalnya. Dengan cara memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal kepada para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kapet. (Setiono, 2004), dengan adanya Kapet diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan memberikan dampak pada wilayah sekitar kawasan melalui apa yang disebut *Trickle Down Effect (Spread Effect)*.

Seiring dengan berjalannya waktu, selanjutnya perkembangan antara Kapet yang satu dengan Kapet yang lain tidaklah sama hal ini diindikasikan melalui jumlah investasi yang masuk ke wilayah Kapet, ada beberapa Kapet yang dapat menarik investor, namun ada pula beberapa Kapet yang belum mampu menarik investor. Kapet Bima merupakan salah satu Kapet dimana minat investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Bima sangat rendah, dari kurun waktu 8 tahun dari waktu berdirinya (1996-2004) dari data yang ada tercatat terlihat bahwa investor yang datang menanamkan modalnya hanya ada 5

perusahaan yang menanamkan modalnya pada wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima seperti terlihat pada Tabel I.1 di bawah ini.

**TABEL I.1**  
**JUMLAH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**  
**DI KABUPATEN DAN KOTA BIMA TAHUN 1977 - 2004**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas ( Ha )	Ijin		Investasi
				Peruntukan	Tahun	
1	PT. Bima Budidaya Mutiara	Kec. Sanggar	1.175	Budidaya Mutiara	1977	200 Juta-
2	PT. Bima Sakti Mutiara	Kec. Lambu	11	Budidaya Mutiara	1978	1 Milyar-
3	PT. Trisula Marmer	Kec. Monta	500	Marmer	1982	200 juta-
4	PT. Tirta Mas Mutiara	Kec. Langggudu	10	Budidaya Mutiara	1983	470 juta-
5	PT Anugerah	Kota Bima	3.715	Pengembang	1997	500 Juta
6	PT. Gindi Utama Permai	Kota . Bima	10	Pengembang	1998	200 Juta
7	PT. PG Budiono Madura	Kota Bima	7.82	Garam	2000	500 Juta
8	PT. Budidaya Mutiara	Kab. Bima	3,42	Budidaya Mutiara	2001	500 Juta
9	PT. Mariza Mutiara	Kab. Bima	-	Budidaya Mutiara	2003	500 Juta

Sumber: Badan Penanaman Modal Kab. Bima, 2005

Jumlah investor yang masuk ini sangat minim dan investor yang masuk hanya terbatas pada sektor budidaya mutiara padahal potensi sumber daya alam yang terdapat sangat beragam. Diantaranya adalah kopi, jambu mete, marmer dan sumber daya laut lainnya yang cukup besar seperti rumput laut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Minat investor yang mau menanamkan modalnya di wilayah Kapet Bima selama kurun waktu 8 tahun berdirinya Kapet (1996-2004) sangat sedikit hanya ada 5 investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bima dengan nilai investasi sebesar 2, 2 Milyar Rupiah padahal sumber daya alam yang ada cukup

banyak, Perlu dipahami bagaimanakah Analisis kinerja peran Kapet dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Bima dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya. Sehingga muncul ”*Research Question*”:

*Bagaimanakah kinerja peran Kapet dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Bima NTB dan faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhinya?*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja peran Kapet di Kabupaten Bima dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian**

- Mengidentifikasi indikator yang menunjukkan kinerja Kapet di Kabupaten Bima.
- Melakukan penilaian kinerja Kapet Bima.
- Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet.
- Merumuskan strategi pengembangan Kapet Bima.
- Memilih alternatif pengelolaan Kapet Bima.

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Materi**

Penelitian ini dibatasi pada aspek fungsional dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), Kapet berfungsi sebagai alat pengembangan wilayah di Kabupaten Bima NTB, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah selama kurun waktu berdirinya Kapet telah dapat berfungsi dengan baik sebagai alat pengembangan wilayah di Kabupaten Bima.

### 1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Kapet Bima pada awal masa berdirinya terdiri dari 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, kemudian dengan terpecahnya Kabupaten Bima menjadi 2 Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Bima dan Kota Bima maka wilayah Kapet Bima menjadi 3 wilayah administratif yaitu Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. (Gambar 1.1) Wilayah Kapet Bima terdapat di Pulau Sumbawa, dimana Pulau Sumbawa sendiri terdiri dari 5 kabupaten yaitu : Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Kabupaten Bima di pilih menjadi sampel dari populasi Kapet yang terdiri dari 3 Kabupaten dan Kota karena:

1. Kabupaten Bima adalah kabupaten dengan PDRB tertinggi dari 3 kabupaten di wilayah Kapet yaitu: Rp. 12.286.948.700 pada tahun 2002.
2. Kabupaten Bima adalah kabupaten dengan luas wilayah terbesar dari 3 kabupaten di wilayah Kapet yaitu seluas: 4.374,65 KM<sup>2</sup>.
3. Kabupaten Bima adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar dari 3 kabupaten di wilayah Kapet yaitu sebesar 404.775 jiwa.
4. Kabupaten Bima merupakan kabupaten yang memiliki *Comparative Advantage* yang lebih dibandingkan dengan 2 kabupaten lain di wilayah Kapet dengan adanya infrastruktur penunjang berupa bandar udara. Berikut ini data mengenai 3 kabupaten/ kota yang terdapat di wilayah Kapet Bima.

**TABEL I.2**  
**INDIKATOR WILAYAH TAHUN 2002**

No	Kabupaten/Kota	PDRB Harga Konstan 1993	Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Infrastruktur
1	Kabupaten Bima	Rp. 12.286.948.700	4.374,65	404.775	Bandar Udara
2	Kota Bima	Rp. 4.491.117.000	222,25	109.970	-
3	Kabupaten Dompu	Rp. 8.047.677.000	2.324,55	191.729	-

Sumber: BPS, Bima dan Dompu Dalam Angka, 2003

Kabupaten Bima memiliki *Competitive Advantage* bila dibandingkan dengan 2 kabupaten/ kota lainnya dalam wilayah Kapet, hal ini terlihat dari data PDRB, luas wilayah dan infrastruktur, terutama dengan adanya bandar udara sehingga Kabupaten Bima dianggap dapat mewakili populasi Kapet untuk evaluasi kinerja Kapet. Sebelum terpecah menjadi Kabupaten Bima dan Kota Bima Kabupaten Bima adalah Kabupaten dengan jumlah 10 kecamatan Setelah pemekaran Kabupaten Bima menjadi Kabupaten Bima dan Kota Bima dimana Kabupaten Bima terdiri dari 14 kecamatan seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL I.3**  
**KECAMATAN DI KABUPATEN BIMA**

NO	SEBELUM PEMEKARAN (1996-2002)	SESUDAH PEMEKARAN (2003-SEKARANG)
1	Kecamatan RasaNae	<b>KOTA BIMA</b>
2	Kecamatan Wooha	Kecamatan Wooha
3	Kecamatan Monta	Kecamatan Monta
4	Kecamatan Donggo	Kecamatan Donggo
5	Kecamatan Bolo	Kecamatan Bolo
		Kecamatan Madapangga
6	Kecamatan Belo	Kecamatan Belo
7	Kecamatan Wawo	Kecamatan Wawo
		Kecamatan Langgudu
8	Kecamatan Sape	Kecamatan Sape
		Kecamatan Lambu
9	Kecamatan Wera	Kecamatan Wera
		Kecamatan Ambalawi
10	Kecamatan Sanggar	Kecamatan Sanggar
		Kecamatan Tambora

Sumber: RTRW, Kab. Bima, 2004

Kabupaten Bima adalah salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan kabupaten yang letaknya paling Timur dari 6 kabupaten dan 2 kotamadya. Secara geograafis berkedudukan pada 118<sup>0</sup> 44' - 119<sup>0</sup> 22' BT dan 08<sup>0</sup> 08' - 08<sup>0</sup> 57' LS dengan batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Flores
Sebelah Selatan	: Samudera Hindia
Sebelah Timur	: Selat Sape
Sebelah Barat	: Kabupaten Dompu

Dalam lingkup wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, letak geografis Kabupaten Bima dapat dilihat pada peta orientasi Kabupaten Bima dengan Luas Wilayah 437.465 Ha atau 22% dari luas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat termasuk dalam Wilayah Pengembangan Bagian Timur.

Ruang lingkup wilayah studi dapat dilihat seperti pada peta berikut ini:

Gambar 1.2 Kabupaten Bima Sebelum Pemekaran

Gambar 1.3 Kabupaten Bima Setelah Pemekaran









## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Pendekatan Metode Penelitian**

Pendekatan Metode Penelitian menggunakan 2 macam pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan evaluatif.

#### 1. Kuantitatif.

Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terukur dari kinerja Kapet Bima dan pengaruhnya terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Bima. Kondisi ketimpangan yang terjadi antar kabupaten dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Bima, Merumuskan strategi pengembangan Kapet dan memilih alternatif pengelolaan Kapet.

#### 2. Evaluatif.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Kapet Bima diadakan pendekatan evaluatif dengan cara memberi nilai dengan metode skoring pada indikator kinerja yang didapatkan melalui metode skoring.

### **1.5.2 Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian dibagi dalam beberapa tahap antara lain: Persiapan, kajian literatur, pengumpulan data, analisis dan penilaian serta kesimpulan dan rekomendasi. Seperti dalam uraian berikut ini:

#### 1. Persiapan.

Dalam tahapan persiapan, dilakukan persiapan mengenai tujuan dan sasaran penelitian, metode yang akan digunakan, kebutuhan data sampai pada rancangan kegiatan penelitian.

## 2. Pengumpulan Data.

Setelah tahapan persiapan selesai dilakukan diadakan pengumpulan data sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada tahap persiapan.

## 3. Analisis.

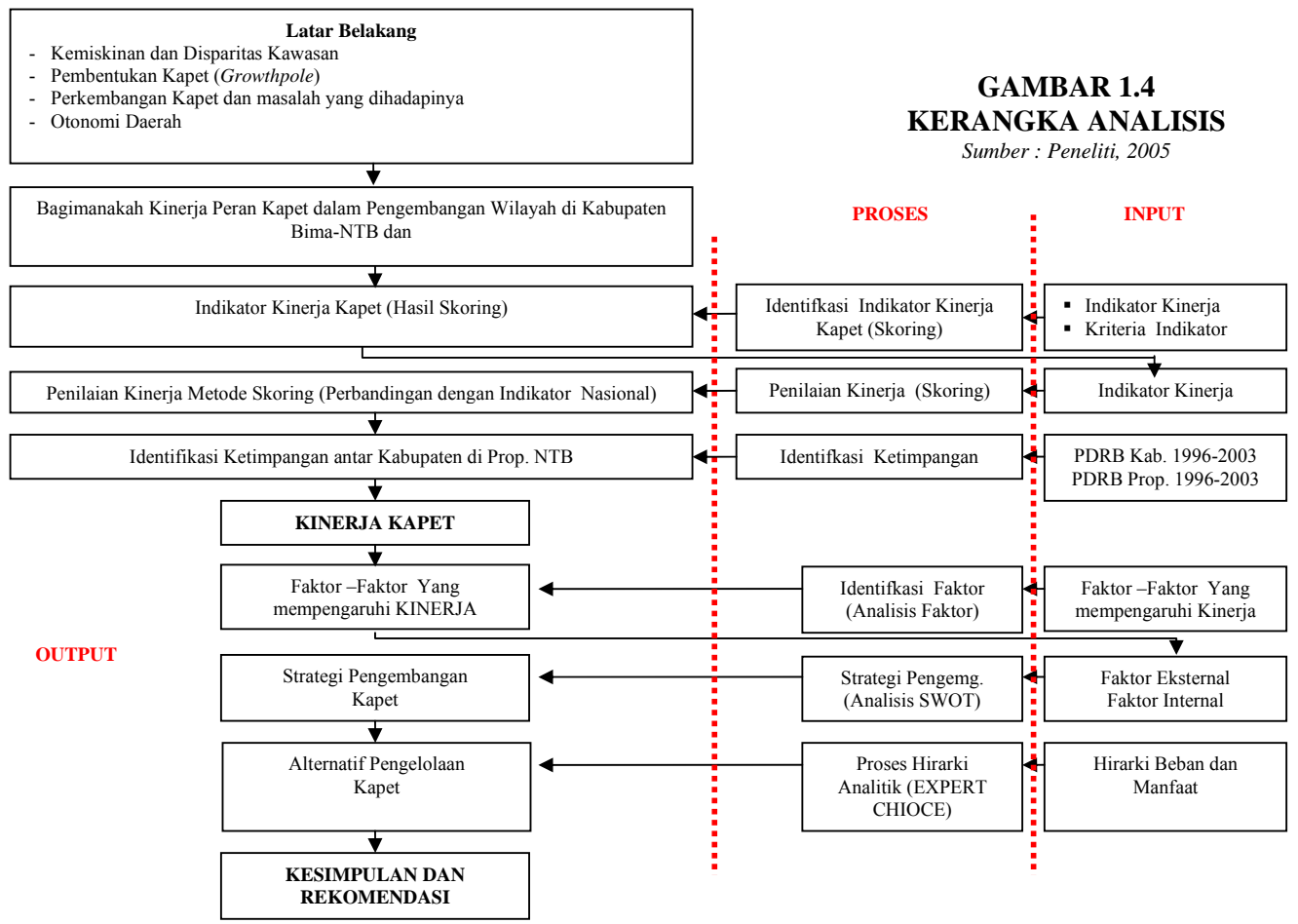
Tahap selanjutnya adalah Analisis, data-data yang telah terkumpul di analisis untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian.

## 4. Kesimpulan dan Rekomendasi.

Setelah didapatkan hasil, berdasarkan hasil yang ada dirumuskan rekomendasi penelitian untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang dianggap kurang baik selama diadakannya penelitian.

### **1.5.3 Kerangka Pikir Analisis**

Kerangka pikir analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti terlihat dibawah ini melalui *Input-Proses-Output* sehingga pada akhirnya didapatkan hasil penelitian berupa rekomendasi bagi pengembangan dan pengelolaan Kapet, dimana input data berupa: indikator kinerja, kriteria indikator kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, faktor eksternal dan internal serta hirarki manfaat dan beban pengelolaan Kapet. Dengan proses analisis scoring, analisis faktor, analisis SWOT dan AHP dan hasil yang didapatkan adalah: Indikator Kinerja Kapet, penilaian kinerja Kapet, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet, strategi pengembangan Kapet dan alternatif pengelolaan Kapet. Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada gambar berikut ini:



**GAMBAR 1.4**  
**KERANGKA ANALISIS**

Sumber : Peneliti, 2005

## 1.5.4 Metode Analisis Penelitian

### 1.5.4.1 Identifikasi Indikator Kinerja dengan Metode Skoring (Skala Likert)

1. Membuat Daftar Indikator yang memungkinkan.

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan didapatkan beberapa indikator kinerja Kapet yang memungkinkan antara lain seperti pada *Lampiran B.1*.

#### 2. Jajaki Indikator Yang Layak dan pilih indikator kinerja terbaik

Setelah diperoleh indikator yang layak maka akan dipilih indikator kinerja yang terbaik dengan kriteria pemilihan seperti pada *Lampiran B.2*

Responden diminta untuk melakukan penilaian apakah indikator tersebut relevan untuk menjadi indikator pengukuran kinerja Kapet dengan skala penilaian (skala likert) antara 1-5 yaitu:

Skala 1 Bila Sangat Tidak Relevan

Skala 2 Bila Tidak Relevan

Skala 3 Bila Cukup Relevan

Skala 4 Bila Relevan

Skala 5 Bila Sangat Relevan

(Susanto, 2004)

**TABEL I. 4**  
**INDIKATOR KINERJA KAPET**

No	Indikator Kinerja	1	2	3	.	.	.	.	.	.	.	11	12
1													
.													
.													
21													

Sumber: Peneliti, 2005

Penilaian oleh responden dilakukan melalui survey primer dengan **MODEL KUISONER B.3** (*Lampiran B.3*), jumlah narasumber untuk mengidentifikasi indikator ini adalah 12 orang (*Lampiran A*) kemudian di ambil indikator dengan nilai minimal 48 (4 x 12) sampai 60 ( 5 x 12).

#### **1.5.4.2 Pengukuran Kinerja Kapet**

Untuk mengukur kinerja peran Kapet dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Bima NTB terdapat 2 langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah melakukan penilaian kinerja dengan memberikan skore pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sedangkan yang kedua adalah dengan mengidentifikasi proses *Trickle Down Effect (Spread Effect)* yang terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan cara mengukur indeks disparitas antar kabupaten dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat (indeks williamson dan indeks entrophie theil).

#### **1. Pengukuran Kinerja KAPET dengan Metode Skoring (Skala Thurstone/ Skala Statistik)**

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Kapet Bima dengan cara melihat kecenderungan pertumbuhan indikator kinerja Kapet selama kurun waktu berdirinya Kapet dan membandingkannya dengan kecenderungan yang terjadi dalam lingkup nasional kemudian diberi skala penilaian. Dengan rumus :

$$P_n = P_o(1 + r)^n \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :        P<sub>n</sub>        : Data Tahun ke n  
                   P<sub>o</sub>        : Data tahun ke 0  
                   r            : Rata-rata pertumbuhan  
                   n            : Tahun ke n



Skala penilaian adalah kinerja baik dan kinerja Buruk dengan kriteria apabila indikator kinerja berada di atas rata-rata indikator nasional maka kinerja dianggap baik dengan nilai (1). Apabila indikator kinerja di bawah rata-rata indikator nasional maka kinerja buruk dengan nilai (0).

**TABEL I. 5**  
**PENILAIAN KINERJA KAPET**

No	Indikator Kinerja	Nilai
1		
.		
.		
n		
	TOTAL	

*Sumber: Peneliti , 2005*

Apabila terdapat lebih dari 50% indikator diatas rata-rata nasional maka kinerja baik dan apabila terdapat kurang dari 50% indikator diatas rata-rata nasional maka kinerja buruk.

Penilaian kinerja ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa indikator kinerja yang didapatkan pada analisis sebelumnya (identifikasi indikator kinerja) karena itu penilaian kinerja ini dilakukan oleh peneliti.

## 2. Identifikasi *Spread Effect* di Kabupaten Bima

Selain pengukuran kinerja dengan metode skoring, kinerja Kapet Bima di Kabupaten Bima dapat juga diketahui dengan cara mengidentifikasi apakah *Spread Effect* yang diharapkan terjadi karena adanya pusat pertumbuhan baru terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Barat? Untuk mengidentifikasi terjadi atau tidak terjadinya *Spread Effect* di Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat dari dibentuknya Kapet, dilakukan analisis mengenai ketimpangan antar kabupaten di

Propinsi Nusa Tenggara Barat, digunakan alat analisis indeks williamson dan indeks ketimpangan entropy theil yaitu:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :  
 $Y_i$  = PDRB Perkapita di Kabupaten i  
 $Y$  = PDRB Perkapita rata-rata Propinsi  
 $f_i$  = Jumlah Penduduk di Kabupaten i  
 $n$  = Jumlah Penduduk Propinsi

(Kuncoro, 2004)

Dan indeks entropy theil yaitu:

$$I(y) = \sum (y/Y) x \text{Log} \{ (y_j/Y) / (x_j/X) \} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :  
 $I(y)$  = Indeks Entropi Theil  
 $y_i$  = PDRB Perkapita Kabupaten j  
 $Y$  = Rata-rata PDRB Perkapita Propinsi  
 $x_j$  = Jumlah Penduduk Kabupaten j  
 $X$  = Jumlah Penduduk Propinsi

(Kuncoro, 2004)

Dilakukan pengukuran indeks williamson dan indeks entropi theil selama kurun waktu berdirinya Kapet sejak tahun 1996 sampai dengan 2002, dari kurun waktu tersebut kita melihat kecenderungan besarnya nilai indeks williamson dan indeks entropi theil di Kabupaten Bima apakah menurun, meningkat ataukah relatif stabil, dimana bila:

1. Nilai indeks williamson dan indeks entropi theil Kabupaten Bima menurun hal ini menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu pembangunan di Kabupaten Bima semakin merata dan *Spread Effect* yang diharapkan terjadi, terjadi di Kabupaten Bima sebagai akibat penetapan Kapet atau dapat juga dikatakan kinerja Kapet Bima baik
2. Nilai indeks williamson dan indeks entropi theil meningkat hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar kecamatan di

Kabupaten Bima semakin meningkat dan konsep *Spread Effect* yang diharapkan tidak terjadi di Kabupaten Bima atau dapat juga dikatakan kinerja Kapet Bima buruk

3. Nilai indeks williamson dan indeks entropi theil relatif tetap, maka hal ini menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti dengan adanya penetapan Kapet di Kabupaten Bima atau dapat juga dikatakan kinerja Kapet Bima buruk.

(Kuncoro, 2004)

Dari hasil penilaian akan ditarik kesimpulan apakah kinerja peran Kapet dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Bima baik atautkah buruk dengan kriteria:

1. Kinerja Kapet dinyatakan **BAIK** apabila kedua aspek penilaian memenuhi syarat, yaitu penilaian kinerja Kapet melalui indikator kinerja melebihi 50% dari rata-rata nasional dan indeks disparitas antar kabupaten dalam Propinsi NTB cenderung mengalami penurunan.
2. Kinerja Kapet dinyatakan **BURUK** apabila salah satu aspek penilaian tidak memenuhi syarat yaitu penilaian kinerja Kapet melalui indikator kinerja kurang dari 50% rata-rata nasional atau indeks disparitas antar kabupaten dalam Propinsi NTB cenderung mengalami kenaikan.

#### **1.5.4.3 Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet**

##### **1. Analisis Kebijakan Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.**

Metode yang digunakan dalam Analisis Kebijakan Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ini adalah metode kualitatif dengan cara deskriptif.

## **2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kapet.**

Analisis faktor ini digunakan untuk menganalisis faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja peran Kapet dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Bima, dari kajian literatur yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja peran Kapet dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Bima antara lain sebanyak 26 faktor (*Lampiran D.3*).

Dari faktor-faktor tersebut dengan metode analisis faktor akan dicari faktor apakah yang relevan mempengaruhi kinerja Kapet di Kabupaten Bima.

Analisis faktor dilakukan melalui survey primer dengan **KUISONER MODEL D.4** (*Lampiran D.4*), jumlah responden untuk analisis faktor ini adalah 50 orang dengan distribusi seperti pada uraian selanjutnya.

### **1.5.4.4 Analisis Strategi Pengembangan Kapet dengan SWOT**

#### **1. Tahap pertama Pengambilan Data yaitu Faktor Eksternal dan Internal**

Identifikasi faktor eksternal dan internal dalam analisis SWOT dilakukan berdasarkan persepsi peneliti dan hasil dari analisis faktor yang telah dilakukan sebelumnya.

#### **2. Tahap Analisis, pembuatan matriks internal dan eksternal**

##### **Matriks Faktor Strategi Internal**

Setelah faktor-faktor strategi internal diidentifikasi suatu tabel IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka *Strength* dan *Weakness* tahapnya adalah:

- a. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam penyusunan strategi.
- b. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penyusunan strategi (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi bobot total 1,00).
- c. Hitung rating (pada kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap strategi yang akan diambil.
- d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. hasilnya berupa nilai skor pembobotan untuk tiap faktor.
- e. Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk mendapatkan nilai total dari faktor-faktor strategis internal.

(Rangkuti, 2005)

**TABEL. I. 6**  
**PENILAIAN FAKTOR INTERNAL**

Faktor- Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skoring (B x R)
KEKUATAN			
-			
KELEMAHAN			
-			
TOTAL			

Sumber: Rangkuti, 2005

Perhitungan bobot dan rating tiap-tiap faktor dapat dilakukan dengan cara kuisioner maupun pengambilan data kuantitatif secara langsung (Marimin, 2004).

Dalam penelitian ini perhitungan bobot dan rating tiap-tiap faktor dilakukan dengan cara kuisioner, kemudian dari nilai tiap responden diambil rata-rata nilai bobot dan rating. Perhitungan RATING tiap faktor dilakukan melalui survey primer dengan kuisioner **MODEL E.2**. Sedangkan perhitungan BOBOT tiap faktor dilakukan melalui survey primer dengan kuisioner **MODEL E.3** jumlah responden untuk analisis SWOT ini adalah 12 narasumber (*Lampiran A*).

### **Matriks Faktor Strategi Eksternal**

- a. Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman dalam penyusunan strategi.
- b. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penyusunan strategi (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi bobot total 1,00).
- c. Hitung rating (pada kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap strategi yang akan diambil.
- d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. hasilnya berupa nilai skor pembobotan untuk tiap faktor.
- e. Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk mendapatkan nilai total dari faktor- faktor strategis eksternal.

(Rangkuti, 2005)

**TABEL I.7**  
**PENILAIAN FAKTOR EKSTERNAL**

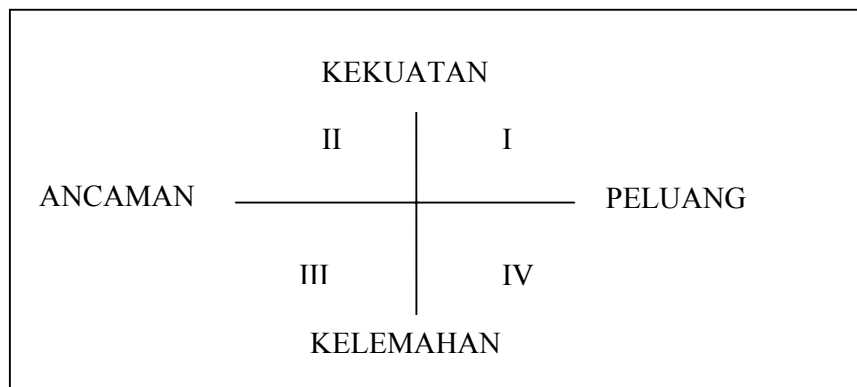
Faktor- Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skoring (B x R)
PELUANG -			
TANTANGAN -			
TOTAL			

Sumber: Rangkuti, 2005

Perhitungan bobot dan rating tiap-tiap faktor dapat dilakukan dengan cara kuisioner maupun pengambilan data kuantitatif secara langsung (Marimin, 2004).

Dalam penelitian ini perhitungan bobot dan rating tiap-tiap faktor dilakukan dengan cara kuisioner, kemudian dari nilai tiap responden diambil rata-rata nilai bobot dan rating. Perhitungan RATING tiap faktor dilakukan melalui survey primer dengan kuisioner **MODEL E.2** Sedangkan perhitungan BOBOT tiap faktor dilakukan melalui survey primer dengan kuisioner **MODEL E.3** melalui narasumber berjumlah 12 orang (*Lampiran A*)

Dari hasil perhitungan matriks internal dan eksternal dapat diketahui posisi Kapet berada dikuadran mana.



Sumber: Rangkuti, 2005

**GAMBAR 1.4**  
**POSISI STRATEGIS**

### 3. Pengambilan Keputusan

Dalam tahap pengambilan keputusan matriks SWOT ini perlu merujuk kembali matriks internal dan eksternal yang menghasilkan posisi Kapet saat ini. Kemudian dibuat matriks strategi. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Kapet dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yaitu:

#### 1. Strategi SO

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut peluang sebesar-besarnya.

#### 2. Strategi ST

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

#### 3. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada untuk meminimalisir kelemahan yang ada.

#### 4. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

(Rangkuti, 2005)

Pengambilan keputusan mengenai strategi pengembangan Kapet dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil posisi strategis dari pengembangan Kapet Bima berada.



#### 4. Prioritas Strategi dan langkah Operasional

Berdasarkan hasil pemetaan interaksi antara faktor internal dan eksternal seperti pada tabel diatas selanjutnya disusun prioritas strategi dengan metode QSPM (*Quantitatif Strategis Planning Matrix*) dengan cara melakukan penilaian pada tiap-tiap strategi atas fator internal dan eksternalnya. Setiap strategi diberikankan *Attractive Score (AS)* yang akan diisi oleh responden kemudian tiap-tiap strategi diambil nilai rata-rata *Attractive Score (AS)* dengan skala penilaian:

- 1 : Berarti tidak menarik (tidak prioritas)
- 2 : Berarti kurang menarik (kurang prioritas)
- 3 : Berarti Menarik (Prioritas)
- 4 : berarti sangat Menarik (Sangat Prioritas)

**TABEL I.8**  
**PENILAIAN STRATEGI**

ATTRACTIVE SCORE (AS)	STRATEGI			
	1	2	3	4
KEKUATAN -				
KELEMAHAN -				
PELUANG -				
TANTANGAN -				

*Sumber: Marimin, 2005*

Setelah dilakukan penilaian dengan *Attractive Score* terhadap strategi yang akan disusun prioritasnya maka dilakukan penilaian dengan metode *Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)*.

**TABEL I.9**  
**QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX**

STRATEGI	ATTRACTIVE SCORE	BOBOT	ATTRACTIVE SCORE X BOBOT
KEKUATAN -			
KELEMAHAN -			
PELUANG -			
TANTANGAN -			
<b>TOTAL</b>			

*Sumber: Marimin, 2005*

Penilaian *Attractive Score* untuk prioritas strategis dilakukan oleh narasumber sebanyak 12 orang (*Lampiran A*) melalui kuisioner **MODEL E.4** (*Lampiran E.4*).

**1.5.4.5 Analisis Strategi Pengelolaan Kapet dengan AHP (Analytical Hierarchy Process)**

Untuk melengkapi strategi pengembangan Kapet dilakukan Proses Hirarki Analitik mengenai Pembinaan dan Pengelolaan Kapet berdasarkan persepsi narasumber yang berjumlah 12 orang (*Lampiran A*) dalam Proses Hirarki Analitik ada beberapa langkah yang harus dilalui antara lain:

- Penyusunan Hirarki

Penyusunan hirarki dilakukan oleh peneliti berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan sebelumnya seperti yang terlihat pada *Lampiran E.2*.

- Pengisian Persepsi manusia

Tahapan ini merupakan penilaian responden terhadap tingkat kepentingan atau prioritas relatif antar elemen yang dijadikan kriteria dan sub kriteria

dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya diperlukan syarat bahwa responden yang dipilih adalah memahami dan mengerti permasalahan yang dihadapi sesuai dengan pendidikan, pengalaman dan keahliannya. Proses pengisian persepsi dapat dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang berisi perbandingan berpasangan dari kriteria dan sub kriteria dengan skala penilaian 1 sampai 9 (*Lampiran F.2*).

Berdasarkan nilai-nilai perbandingan tadi, dapat disusun matriks penilaian untuk tiap hirarki mulai dari tingkat teratas sampai dengan tingkat hirarki terendah. Apabila telah berada didalam matriks maka setiap matriks perlu dinormalisasikan dengan menggunakan operasi matriks tertentu sebelum masuk ke analisis selanjutnya. Pengisian persepsi ini dilakukan dengan kuisioner **MODEL F.3** (*Lampiran F.3*) dengan jumlah narasumber 12 orang (*Lampiran A*).

- Perhitungan Bobot dan Uji Konsistensi

Setelah setiap matriks dinormalisasikan, maka dilanjutkan dengan menghitung bobot prioritas. Bobot prioritas masing-masing elemen dalam masing-masing matriks ditentukan sesuai dengan nilai eigen faktornya. Nilai ini menggambarkan prioritas suatu elemen dalam matriks. Rata-rata eigen faktor dalam sebuah matriks disebut *Eigen Value* ( $\lambda_{maks}$ ).

Untuk melihat tingkat konsistensi responden dalam mempersepsikan suatu elemen diperlukan perhitungan uji konsistensi atau *Consistency Index* (CI) berdasarkan nilai Eigenvalue dan jumlah baris dalam matriks. Apabila hasil pengujian menunjukkan  $IC < 0,1$  dapat dianggap bahwa konsistensi

responden dalam memberikan penilaian relatif bersifat valid. Perhitungan bobot dan *Consistency Index* dilakukan dengan menggunakan software AHP yaitu *Expert Choice V.10*.

- Pengukuran Prioritas Global

Bila tahap-tahap tersebut di atas telah dilakukan dengan benar maka proses perhitungan telah dilakukan dengan baik. Hasil yang diperoleh adalah nilai-nilai prioritas lokal per matriks dengan elemen sejenis. Berdasarkan nilai prioritas lokal dapat dibuat nilai prioritas global antara elemen-elemen dengan nilai prioritas pada matriks yang terletak paling bawah dari sebuah hirarki.

- Perbandingan Manfaat dan Beban dalam Metode AHP

Sesuai dengan prosedur perhitungan yang umum dalam metoda AHP maka pemakaian metoda AHP dapat disesuaikan dengan kepentingan masing-masing penelitian. Salah satu aplikasi metode AHP adalah menentukan alternatif terbaik dari berbagai pilihan alternatif. Untuk menghitung bobot manfaat dan bobot beban dari masing-masing alternatif, perlu dibentuk hirarki pencapaian tujuan yaitu hirarki manfaat dan hirarki beban. Setelah dilakukan perhitungan hirarki manfaat dan hirarki beban, maka tahap selanjutnya adalah membandingkan antara bobot manfaat dan bobot beban dari tiap alternatif. Alternatif terbaik tentunya berdasarkan nilai perbandingan terbesar dari bobot manfaat dan bobot beban. Perbandingan antara manfaat dan beban perhitungannya dilakukan oleh peneliti.

## 1.5.5 Data Penelitian

### 1.5.5.1 Kebutuhan Data

**TABEL I.10**  
**KEBUTUHAN DATA**

Metode	Kegunaan	Jenis Data	Kebutuhan Data	Sumber data
Analisis Kebijakan (Deskriptif Kualitatif)	Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui landasan hukum pembentukan Kapet dan dampaknya.	Sekunder	Legalitas (Dasar hukum) pembentukan/penetapan Kapet	Internet dan sumber lain
Metode Skoring (Skala Likert)	Metode Skoring digunakan untuk mendapatkan indikator kinerja yang relevan sebagai penilaian kinerja Kapet	- Primer	- Kuisoner Model B.3	Narasumber ( <i>Lampiran A</i> )
Metode Skoring (Skala Likert)	Metode Skoring (skala thurstone/ skala statistik) digunakan untuk melakukan penilaian kinerja Kapet berdasarkan indikator kinerja yang didapatkan dari hasil identifikasi indikator kinerja	Sekunder	Indikator Kinerja hasil identifikasi Kab. Bima Tahun 1996-2003 Indonesia Tahun 1996, 2003	BPS Bappeda
Identifikasi Ketimpangan antar Kecamatan	Indeks Williamson Indeks Entropi Theil	- Sekunder	PDRB Perkapita Kabupaten tahun 1996-2003 PDRB perkapita Propinsi NTB Tahun 1996-2003 Jumlah Penduduk Kabupaten Tahun 1996-2003 Jumlah penduduk Propinsi NTB Tahun 1996-2003	BPS
Analisis Faktor	Analisis faktor dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Kapet di Kabupaten Bima dari faktor-faktor yang ada direduksi sehingga didapatkan faktor yang signifikan berpengaruh dalam kinerja Kapet	- Primer	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet Kuisoner Model D.3	Narasumber ( <i>Lampiran A</i> )
Analisis SWOT	Analisis SWOT dilakukan untuk mendapatkan strategi pengembangan Kapet Selanjutnya	- Primer	Penilaian Faktor Internal, Kuisoner Model E.2 Penilaian Faktor Eksternal, Kuisoner Model E.3 Penilaian Prioritas Strategi Kuisoner Model E.4	Narasumber ( <i>Lampiran A</i> )
AHP	AHP dilakukan untuk mengetahui alternatif yang tepat bagi pembinaan dan pengelolaan Kapet Bima	- Primer	- Alternatif kebijakan Pembinaan dan Pengelolaan Kapet Bima, Kuisoner Model F.3	Narasumber ( <i>Lampiran A</i> )

*Sumber: Peneliti, 2005*

### **1.5.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Kuisoner

Kuisoner yang dibagikan dalam penelitian ini ada 3 kuisoner yaitu:

- Kuisoner pertama adalah kuisoner yang diisi oleh narasumber untuk mengidentifikasi indikator kinerja Kapet yaitu kuisoner **MODEL B.2** (*Lampiran B.2*).
- Kuisoner yang kedua adalah kuisoner yang diisi oleh para responden untuk mengetahui persepsi responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet Bima yang akan digunakan untuk melakukan analisis faktor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet yaitu kuisoner **MODEL D.3** (*Lampiran D.3*).
- Kuisoner yang ketiga adalah untuk perhitungan rating faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT yaitu kuisoner **MODEL E.2** (*Lampiran E.2*).
- Kuisoner yang keempat adalah Kuisoner untuk perhitungan bobot faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT yaitu kuisoner **MODEL E.3** (*Lampiran E.3*).
- Kuisoner yang ketiga adalah Kuisoner untuk perhitungan prioritas strategi (Attractive Score) dalam analisis SWOT yaitu kuisoner **MODEL E.4** (*Lampiran E.4*).
- Kuisoner yang ketiga adalah kuisoner yang dibagikan kepada para narasumber untuk merumuskan alternatif pembinaan dan pengelolaan Kapet Bima dengan menggunakan metode AHP yaitu kuisoner **MODEL F.3** (*Lampiran F.3*).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- Data sekunder mengenai indikator kinerja Kapet Bima yang didapatkan dari instansi pemerintah.
- Data Sekunder untuk menghitung Indeks Disparitas di Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: PDRB Perkapita Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat (1996-2003), Jumlah Penduduk Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat (1996-2003), PDRB Perkapita Nusa Tenggara Barat dan Jumlah Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Data sekunder mengenai legalitas (dasar hukum) pembentukan Kapet didapatkan melalui *browsing* di internet dan sumber-sumber lainnya.

### **1.5.5.3 Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus- rumus tertentu.

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

#### **a. Editing**

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.

Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

Hal- hal yang perlu di edit pada data yang masuk antara lain:

- a. Dipenuhi atau tidaknya instruksi sampling.

Dalam mengambil data penelitian terutama data yang bersifat primer telah dilalui dengan pemetaan sampling, setelah data dikumpulkan dilakukan pengecekan apakah data yang terkumpul telah sesuai dengan sampel yang dikehendaki.

- b. Dapat dibaca atau tidaknya data yang masuk

Apakah data yang masuk terutama data primer dapat terbaca dengan baik karena data primer cenderung mengandalkan tulisan manusia yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

- c. Kelengkapan pengisian.

Apakah ada *form* kuisioner yang terlewat dalam pengisian sehingga mempengaruhi ketepatan penelitian.

- d. Keserasian (konsistensi).

Konsistensi ini sangat perlu terutama dalam AHP (*Analytical Hierarchy Process*) bila derajat konsistensi belum terpenuhi maka akan terus diadakan perbaikan data, oleh karena itu sebaiknya pada waktu mengisi kuisioner responden didampingi oleh peneliti.

- e. Apakah isi jawaban kuisioner dapat dipahami.

Apakah jawaban yang ditulis oleh responden dalam format kuisioner dapat dipahami oleh peneliti terutama untuk kuisioner yang bersifat bebas.

**b. Coding**

Coding adalah pemberian/ pembuatan kode untuk data-data dengan kategori yang sama untuk memberikan petunjuk atau informasi pada suatu data yang akan dianalisis.



### c. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel yang berisikan data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Untuk melakukan tabulasi ini diperlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan khususnya dalam tabulasi silang.

### d. Perhitungan Data

Khusus untuk data mengenai indikator kinerja Kapet data sekunder yang didapat harus dihitung lagi, karena yang dibutuhkan adalah data tingkat pertumbuhan maka perhitungan dilakukan dengan rumus :

$$P_n = P_0(1+r)^n \dots\dots\dots(1)$$

Dimana

$P_n$  = Indikator Kinerja Tahun ke-n

$P_0$  = Indikator kinerja Tahun awal

$r$  = Tingkat pertumbuhan

$n$  = Tahun ke-n

(Openheim, 1980)

### 1.5.6 Teknik Sampling

Teknik sampling dibutuhkan untuk menentukan responden yang akan menjawab kuisioner pada penelitian ini dalam hal ini teknik sampling yang dipakai adalah *purposive sampling*.

Sampling *purposive* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Sampling yang *purposive* adalah sampling yang dipilih secara cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Dengan demikian diusahakan agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial, strata apa yang harus diwakili

tergantung pada penilaian peneliti. Untuk selanjutnya sampel ini dinamakan Nara Sumber.

Tidak ada aturan yang jelas dalam menentukan jumlah sampel semakin besar sampel yang diambil maka semakin kecil *sampling error* (kesalahan sampling) nya. Sedangkan semakin kecil sampel yang diambil maka semakin besar pula *sampling error* (kesalahan samplingnya) namun seringkali karena keterbatasan biaya dan waktu sampel yang diambil terbatas.

Dalam penelitian ini nara sumber terdiri dari:

1. Institusi daerah yang terkait yaitu Bappeda dan Dinas Kimpraswil dari tiap-tiap institusi di daerah diambil sampel yang benar-benar mengerti mengenai Kapet.
2. Badan Pengelola Kapet Bima.
3. Insitusi Propinsi.  
Institusi propinsi yang terkait antara lain : Bappeda, Dinas Kimpraswil,
4. Institusi Pendidikan.
5. Pengusaha.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

#### **1.5.7 Jumlah Sampel (Nara Sumber)**

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah Responden inti sebanyak 12 orang untuk menjawab kuisioner B.2, E.2, E.3, E.4 dan F.3, sedangkan responden seluruhnya sebanyak 50 orang untuk menjawab kuisioner D.3 (analisis faktor)

dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL I.11**  
**JUMLAH SAMPEL**

No	Instansi	Nara Sumber	Responden	Jumlah
1	Bappeda Kab.Bima	1	6	7
2	Din. Kimpraswil Kab. Bima	1	6	7
3	Bappeda Prop.NTB	1	2	3
4	Din. Kimpaswil Prop. NTB	1	2	3
5	Badan Pengelola KAPET	2	3	5
6	Institusi Pendidikan	2	6	8
7	Pengusaha	2	6	8
8	Lembaga Swadaya Masyarakat	2	7	9
	Jumlah	12	38	50

*Sumber: Peneliti, 2005*

## **BAB II**

### **KAJIAN LITERATUR ANALISIS KINERJA PERAN KAPET DAN FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**

#### **Analisis Kebijakan**

##### **Evaluasi dalam Analisis Kebijakan**

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*Rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyatannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2000).

Evaluasi dalam penggunaannya yang paling umum adalah suatu proses yang dilakukan dalam menentukan nilai (*value*) Dengan demikian evaluasi merupakan bagian dari setiap analisis untuk keputusan publik. Meskipun terdapat penggunaan pengertian yang luas seperti ini disini istilah evaluasi dipergunakan dalam arti yang lebih terbatas dan teknis sebagai suatu penyelidikan untuk mengukur betapa baik penyelesaian yang sesungguhnya dari suatu program yang sedang berlangsung sesuai dengan penyelesaian yang diharapkan. Akan tetapi hal ini sama sekali tidak berhubungan dengan waktu yang lalu karena tujuannya

adalah untuk menyarankan suatu perubahan dalam alokasi sumber daya, memperbaiki pelaksanaan atau merencanakan kegiatan-kegiatan untuk waktu yang akan datang (Moekijat, 1995).

Inti evaluasi adalah pengevaluasian hasil program atau kegiatan lain. Alasan mengadakan evaluasi adalah untuk memberikan informasi baik kepada pengambil kebijakan mengenai keefektifannya guna membantu dalam pengambilan keputusan untuk waktu yang akan datang (Moekijat, 1995).

Sebagai salah satu langkah dalam analisis kebijakan yang paling akhir adalah evaluasi kebijakan, evaluasi adalah langkah yang penting dalam analisis kebijakan karena berbagai alasan. Seperti yang diindikasikan suatu kebijakan tidak hanya berhenti pada implementasi saja. Setelah kebijakan diimplementasikan dilakukan evaluasi untuk memberi rekomendasi apakah suatu kebijakan dapat dilanjutkan atau dihentikan. Suatu program dinyatakan gagal apabila tidak dapat diimplementasikan seperti yang telah direncanakan atau telah diimplementasikan tetapi tidak menghasilkan seperti apa yang direncanakan. (Patton & Sawicki, 1986).

### **Sifat Evaluasi**

Menurut Dunn (2000) gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Disini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta (apakah sesuatu ada?) atautkah aksi (apakah yang harus dilakukan?) tetapi nilai (berapa nilainya). Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dengan analisis kebijakan yang lainnya yaitu:

1. *Fokus Nilai.*

Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan kepada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. *Interpendensi Fakta-Nilai.*

Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi atau rendah diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat: untuk menyatakan demikian harus didukung oleh sejumlah bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.*

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi

yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex tante*).

#### 4. *Dualitas Nilai.*

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenan dengan nilai yang ada. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran.

### **Fungsi Evaluasi**

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. **Pertama** dan yang paling penting evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu.

**Kedua** evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas.

**Ketiga** evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadamnya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan masalah kebijakan dengan menunjukkan bahwa

tujuan dan target perlu didefinisi ulang. Evaluasi juga dapat menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Dunn, 2000).

### **Pendekatan terhadap evaluasi**

Menurut Hatry dkk dalam Moekijat (1995) terdapat 5 pendekatan dalam evaluasi kebijakan antara lain :

1. *Perbandingan sebelum dan sesudah program.*

Membandingkan hasil program dari yuridiksi yang sama diukur pada dua titik tepat pada waktunya segera sebelum program dilaksanakan dan pada beberapa waktu yang layak setelah pelaksanaan.

2. *Proyeksi Kecenderungan waktu dari data sebelum program dan data sesudah program yang sesungguhnya.*

Membandingkan data sesudah program yang sesungguhnya dengan data yang diperkirakan yang diproyeksikan dari sejumlah periode waktu sebelum program.

3. *Perbandingan-perbandingan dengan yuridiksi-yuridiksi atau bagian-bagian populasi yang tidak dilayani oleh program.*

Membandingkan data dari yuridiksi dimana program dijalankan dengan data dari yuridiksi lain dimana program tidak dijalankan.

4. *Pelaksanaan suatu percobaan yang diawasi.*

Membandingkan kelompok-kelompok yang hampir sama, yang dipilih sebelumnya, beberapa diantaranya mendapat bantuan dan beberapa diantaranya yang lain tidak (atau mendapat bantuan dengan cara-cara yang



berlainan). Segi kritis adalah bahwa kelompok-kelompok sedapat mungkin sama, kecuali untuk perlakuan program.

5. *Perbandingan pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan pelaksanaan pekerjaan sesungguhnya.*

Membandingkan data sesudah program yang sesungguhnya dengan sasaran yang ditentukan dalam tahun-tahun sebelumnya baik dalam pelaksanaan program maupun pada beberapa waktu setelah pelaksanaan.

### **Indikator Kinerja**

Menurut Setiawan (2004) indikator kinerja adalah merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. Dalam menyusun indikator kinerja perlu ditentukan data apa saja yang mesti dikumpulkan, hal ini untuk mengetahui apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan bila dibandingkan terhadap hasil perencanaan yang hendak dicapai dapat terpenuhi. Jadi indikator-indikator kinerja merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk melihat apakah suatu strategi, program, atau kegiatan berhasil/ gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Secara sederhana, indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif, tetapi bisa juga berupa pengamatan kualitatif. Indikator tersebut menentukan bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau

dimensi, tanpa menjelaskan secara spesifik suatu tingkat pencapaian tertentu.

Secara singkat manfaat dari indikator Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas tentang informasi program.
2. Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan pendapat selama pelaksanaan program kegiatan.
3. Membangun dasar bagi pemantauan evaluasi.
4. Untuk mengenalkan dan memotivasi pelaksanaan program dan pencapaian hasil.
5. Untuk mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholders termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat.

### **2.2.1 Langkah- langka pemilihan Indikator Kinerja**

Menurut Setiawan (2004) Pemilihan indikator kinerja yang tepat dan berguna merupakan proses yang sangat sederhana, tetapi memerlukan pemikiran yang hati-hati, perbaikan terus-menerus, kerja sama, dan pembentukan kesepakatan. Dibawah ini ada beberapa saran. Meskipun disajikan dalam langkah-langkah terpisah, dalam prakteknya beberapa langkah tersebut dapat dilakukan secara bersamaan.

#### **1. Langkah pertama.**

Nyatakan Hasil secara jelas Indikator kinerja yang baik dimulai dengan penetapan hasil secara jelas (*specific*) yang disetujui dan dipahami oleh orang yang membacanya. Pertimbangkan hasil secara hati-hati, kaji ulang penyebutan dan maksud dari tujuan strategis, tujuan strategis pendukung, tujuan khusus, hasil antara, asumsi kritis, atau hasil yang diberikan oleh mitra..

Apa sebetulnya yang dimaksudkan? hindari pernyataan hasil yang terlalu melebar. Kadang-kadang tujuan dan hasil disampaikan secara luas, sulit untuk mengidentifikasi indikator kinerja yang benar. Sebagai alternatif, jelaskan aspek-aspek terpercaya secara lebih spesifik untuk membuat perbedaan terbesar untuk pengembangan kinerja. Sebagai contoh, daripada menggunakan informasi hasil yang melebar, seperti “peningkatan kapasitas” dari suatu lembaga, jelaskan aspek-aspek yang dipengaruhi oleh kegiatan program. Sebagai contoh, peningkatan proses recruitment pegawai, atau peningkatan keahlian manajemen. Nyatakan secara jelas mengenai jenis perubahan yang dimaksud. Apa yang diharapkan untuk berubah- suatu situasi, kondisi, tingkat pengetahuan, sikap, atau perilaku? Sebagai contoh perubahan undang-undang suatu negara mengenai pemilihan umum sangat berbeda dengan perubahan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk memilih, yang sekali lagi berbeda dengan perilaku memilih mereka. Setiap jenis perubahan diukur oleh jenis indikator yang berbeda. Juga, jelaskan apakah perubahan yang terlihat adalah perubahan yang absolut, relatif, atau tidak ada perubahan. Perubahan absolut berhubungan dengan penciptaan atau pengenalan sesuatu yang baru. Perubahan relatif berhubungan dengan peningkatan, penurunan, kenaikan, penguatan, atau pengurangan pada sesuatu yang sudah ada tetapi pada tingkatan lebih tinggi atau rendah dari yang nilai optimum. Nyatakan secara jelas mengenai perubahan yang seharusnya muncul. Apakah perubahan diharapkan terjadi diantara individu, keluarga, kelompok, masyarakat, atau wilayah? Jelasnya, sebuah perubahan pada tingkat menabung seluruh negara akan sangat berbeda dengan sektor tertentu dalam masyarakat bisnis. Hal ini dikenal dengan mengidentifikasi “unit analisis” untuk indikator kinerja.

Identifikasi secara lebih akurat mengenai sasaran tertentu untuk perubahan. Siapa atau apa sasaran tertentu untuk suatu perubahan? Pelajari kegiatan dan strategi yang mengarah kepada perubahan. Beberapa kegiatan akan menghasilkan perubahan secara langsung, sementara kegiatan lainnya akan menghasilkan perubahan tidak langsung. Sebagai contoh, kegiatan untuk mengembangkan usaha kecil merujuk kepada peningkatan kesempatan kerja secara langsung. Kegiatan untuk mereformasi kebijakan ekonomi mungkin mempunyai efek yang sama tetapi tidak secara langsung. Sebelum indikator yang tepat dikembangkan, kejelasan yang diperlukan adalah mengenai hubungan yang diharapkan antara kegiatan dan hasil yang direncanakan dalam rangka untuk memahami secara pasti perubahan apa yang layak untuk diharapkan.

## 2. **Langkah kedua.**

Membuat sebuah daftar indikator yang memungkinkan, biasanya ada banyak indikator yang memungkinkan untuk setiap hasil yang diinginkan, tetapi ada beberapa indikator lebih tepat dan berguna dibandingkan dengan yang lainnya. Di dalam pemilihan indikator, jangan menetapkan terlalu cepat mengenai indikator yang pertama kali dinilai cocok atau jelas dalam pikiran. Sebuah pendekatan yang lebih baik adalah mulai dengan sebuah daftar alternatif yang kemudian dapat dijajaki terhadap sekelompok kriteria pemilihan. Untuk menciptakan daftar awal yang mungkin, ikuti prosedur berikut ini: Tukar pikiran secara internal dengan tim penetapan tujuan strategis, konsultasi dengan para ahli mengenai substansi cakupan program, pelajari unit operasi lainnya yang menggunakan indikator yang serupa, kunci untuk menciptakan sebuah daftar awal indikator kinerja adalah ‘menyeluruh/ inklusif’, yang

maksudnya adalah, lihat hasil yang diinginkan pada semua aspek dan dari semua sudut pandang. Berikan kesempatan yang memadai untuk aliran ide dan kreatifitas secara bebas.

### 3. **Langkah ketiga.**

Jajaki Indikator yang Layak. Selanjutnya, jajaki setiap indikator yang layak pada daftar awal. Pelajari artinya dengan menggunakan tujuh kriteria dasar untuk menilai ketepatan dan kegunaan sebuah indikator. Ketujuh kriteria tersebut diuraikan dalam *box* di halaman empat. Pada saat menjajaki dan membandingkan indikator yang layak, sangat membantu bila menggunakan matriks dengan ketujuh kriteria ditampilkan di deret paling atas dan calon indikator disusun dalam lajur ke bawah di bagian kiri. Dengan menggunakan skala penilaian sederhana, misalnya 1-5, angka setiap calon indikator terhadap setiap kriteria. Penilaian ini akan membantu memberikan gambaran keseluruhan mengenai kesesuaian indikator, dan membantu di dalam proses pemilihan. Bagaimanapun, terapkan pendekatan ini secara fleksibel dan dengan pertimbangan, sebab ketujuh kriteria tersebut mungkin tidak sama pentingnya.

### 4. **Langkah keempat.**

Memilih indikator kinerja yang terbaik. Tahap selanjutnya adalah untuk menyempitkan daftar menjadi indikator utama yang akan digunakan di dalam sistem pemantauan kinerja. Indikator-indikator tersebut seharusnya merupakan kelompok optimum yang memenuhi kebutuhan untuk manajemen informasi-tepat guna dalam biaya yang sepadan. Jadilah pemilih. Ingat, biaya berhubungan dengan pengumpulan data dan analisa. Batasi jumlah indikator yang digunakan untuk melacak setiap tujuan atau hasil menjadi sedikit (dua

atau tiga). Pilih indikator yang hanya mewakili dimensi paling mendasar dan penting dari tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.2.2 Kriteria Indikator Kinerja**

Kriteria berikut ini dapat digunakan untuk mengevaluasi ukuran-ukuran kinerja:

1. Bermakna (*meaningful*), secara signifikan dan langsung berkaitan dengan misi, sasaran dan tujuan.
2. Sahih (*valid*) mewakili apa yang sedang diukur.
3. Dapat dipercaya (*credible*) berdasarkan pada data yang akurat dan dapat dipercaya.
4. Dapat diperbandingkan (*comparable*) berguna untuk perbandingan dengan data lain sepanjang waktu.
5. Mudah (*simple*) mudah menghitung dan menginterpretasikan.
6. Berguna (*useful*) secara akurat mencakup kemajuan sepanjang waktu.

(Gaspersz, 2004)

Sedangkan menurut Setiawan (2004) kriteria-kriteria dalam menetapkan indikator kinerja antara lain :

1. Langsung

Sebuah indikator kinerja harus mengukur sedekat mungkin hasil yang diinginkan. Indikator tersebut tidak boleh dimasukkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari hasil yang sedang diukur. Jika menggunakan ukuran langsung tidak memungkinkan, satu atau lebih indikator alternatif akan lebih tepat. indikator alternatif dibutuhkan untuk menyediakan pendekatan

yang tepat mengenai kemajuan. Penjajakan alternatif adalah penjajakan tidak langsung yang berhubungan dengan hasil, dengan satu atau lebih asumsi.

2. Kuantitatif

Jika memungkinkan indikator kuantitatif adalah *numerik* (jumlah persentase nilai dollar, tonase sebagai contohnya).

3. Praktis

Sebuah indikator disebut praktis jika data dapat diperoleh dengan cara yang tepat dan biaya yang layak. Para manajer menginginkan data yang dapat dikumpulkan cukup memadai untuk menginformasikan mereka mengenai kemajuan dan mempengaruhi keputusan.

4. *Specific*

Jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

5. *Relevant*

Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator.

6. *Timely*

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan.

### **Indikator Kinerja Kapet**

#### **Pertumbuhan dan Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah senantiasa disertai dengan perubahan struktural. Pertumbuhan dan pengembangan suatu wilayah merupakan suatu proses kontinu sebagai hasil dari berbagai pengambilan keputusan didalam ataupun yang

mempengaruhi suatu wilayah. Proses yang terjadi sangat kompleks melibatkan aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan politik (pemerintahan) sehingga pada hakekatnya pengembangan wilayah adalah suatu sistem pembangunan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan (Nugroho, 2004).

Parr dalam Dahuri (2004) mengemukakan bahwa wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor dan teori tahapan pengembangan. Teori sektor di adopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangannya wilayah atau perekonomian nasional dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama (pertanian, kehutanan, perikanan), sekunder (pertambangan, manufaktur, konstruksi, utilitas publik) dan tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tersier dan meningkat pada suatu tingkat tertentu di sektor sekunder. Sementara itu teori tahapan pengembangan dikemukakan oleh pakar-pakar seperti Rostow, Fisher, Hoover, Perloff dan Stabler.

### **Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan kualitas hidup masyarakat dari suatu wilayah tertentu. Tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi sosial ekonomi dan sisi ekologis. Menurut Prod'homme (1985) dalam Triutomo (1999) pengembangan wilayah merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan



kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah Beberapa kata kunci yang terdapat dalam pengembangan wilayah, yaitu:

- Program yang menyeluruh dan terpadu.
- Sumber daya yang tersedia dan kontribusinya terhadap wilayah.
- Suatu wilayah tertentu.

Sedangkan Menurut Kamus Tata Ruang perkembangan wilayah adalah pertumbuhan fisik suatu wilayah yang disertai dengan perkembangan keadaan ekonomi dan sosial wilayah tersebut.

### **Pendekatan Pengembangan Wilayah**

Menurut Tukiyat (1999) dalam pelaksanaan pengembangan wilayah perlu ditempuh pendekatan yang cocok sesuai dengan potensi, kondisi dan nilai-nilai budaya masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga pendekatan yang diterapkan akan cocok dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan dalam pengembangan wilayah ada 2 yaitu:

- Pendekatan Sisi Permintaan
- Pendekatan Sisi Penawaran

### **Pendekatan Sisi Permintaan**

Pendekatan sisi permintaan merupakan suatu pendekatan pengembangan ekonomi wilayah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan lokal atas barang dan jasa, maka akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan selanjutnya mendorong pertumbuhan sektor industri barang dan jasa. Pertumbuhan industri barang dan jasa akan

mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga akan terjadi proses *multiplier effect* yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tukiyat, 1999).

Menurut teori sektor yang dikemukakan oleh Clark dan Fisher, perkembangan wilayah ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita berbagai wilayah pada berbagai waktu yang kemudian diiringi oleh adanya relokasi sumber daya, dengan penurunan proporsi angkatan kerja dalam kegiatan sekunder (industri) dan kemudian disusul dengan kenaikan proporsi angkatan tenaga kerja dalam sektor tersier (Glakson, 1978). Perluasan dari teori sektor adalah teori tahap (*Stages Theory*) yang menyebutkan bahwa perkembangan wilayah terdapat dalam tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama, adalah tahap perekonomian sub sistem swasembada, dimana hanya terdapat sedikit investasi dan perdagangan. Penduduk sektor pertanian menjadi basis distribusi menurut lokasi sumber daya alam.
- 2) Tahap kedua, dengan adanya kemajuan pengangkutan, wilayah yang bersangkutan mengembangkan perdagangan dan spesialisasi, maka muncullah lapisan kedua yang mengusahakan industri desa sederhana untuk memenuhi kebutuhan para petani. Karena pada mulanya semua bahan, pasar dan tenaga kerja disediakan oleh penduduk petani, maka lapisan baru ini bertempat pada lokasi yang berkaitan dengan lapisan basis.
- 3) Tahap ketiga, dengan semakin bertambahnya perdagangan interregional, wilayah yang bersangkutan maju, melalui suatu urutan perubahan tanaman pertanian dan peternakan, yaitu dari tanaman biji-bijian dan peternakan yang ekstensif ke tanaman buah-buahan dan peternakan intensif.

- 4) Tahap keempat, dengan semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkurangnya hasil pertanian wilayah yang bersangkutan, maka wilayah tersebut terpaksa mengadakan industrialisasi. Industri sekunder berkembang, mula-mula mengolah produksi primer tetapi kemudian berubah menjadi terspesialisasi.
- 5) Tahap kelima (terakhir) adalah pengembangan industri tersier yang memproduksi untuk ekspor. Wilayah seperti ini mengekspor ketrampilan jasa-jasa yang berkembang. (Glakson, 1978).

#### **Pendekatan Sisi Penawaran**

Pendekatan sisi penawaran merupakan pendekatan pengembangan wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan penawaran komoditas-komoditas tertentu yang diproses dari sumber daya lokal. Dengan adanya ekspor ke luar wilayah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan lokal yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut Teori Basis ekspor yang dikemukakan oleh Douglas C. North dalam Glasson (1978) disebutkan bahwa perkembangan suatu wilayah ditentukan oleh suatu eksploitasi kemanfaatan alamiah dan pertumbuhan basis ekspor wilayah yang bersangkutan dan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat permintaan eksternal dari wilayah-wilayah lain. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja, keuntungan eksternal dan perkembangan wilayah lebih lanjut. Teori ini memandang tingkat permintaan luar wilayah terhadap produk dari

industri-industri ekspor suatu wilayah sebagai penentu bagi perkembangan wilayah.

Berdasarkan pada pendapat North tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya teori basis ekspor mengemukakan keyakinan sebagai berikut:

- 1) Laju pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh lajunya ekspor wilayah tersebut.
- 2) Peranan ekspor dalam pembangunan wilayah akan bertambah penting apabila penduduk dan modal tidak mengalir masuk/ keluar secara berlebihan ke wilayah tersebut dan sektor ekspor memegang peranan penting dalam perekonomian wilayah.

Setelah menunjukkan peranan ekspor dalam perkembangan wilayah, kemudian North menganalisa sebab-sebab perkembangan selanjutnya. Sesuai dengan pandangannya mengenai peranan ekspor dalam perkembangan wilayah terutama diakibatkan oleh bertambahnya kedudukan ekspor wilayah tersebut di pasaran luar wilayah bersangkutan dan dapat menandingi dengan baik barang-barang ekspor yang sama atau lebih baik dari wilayah lain. Dalam menganalisa mengenai faktor-faktor yang menentukan perkembangan wilayah selanjutnya North juga menelaah mengenai perlunya industrialisasi diciptakan untuk mengubah struktur ekspor terutama dari ekspor hasil produksi primer menjadi produksi barang industri.

Metode lain yang dikemukakan, yang dimasukan faktor eksternal dalam perkembangan wilayah adalah model alokasi sumber daya interregional yang dikemukakan oleh Ohlin. Dalam model yang diasumsikan bahwa faktor produksi

terutama tenaga kerja dan modal, akan mengalir dari wilayah yang imbalannya rendah ke wilayah yang imbalannya tinggi. Jadi, jika suatu wilayah lebih rendah dari pada semua wilayah lain, maka ada kemungkinan terjadinya arus keluar modal yang hendak memanfaatkan rendahnya biaya tenaga kerja tersebut, atau juga merupakan kombinasi dari kedua kemungkinan tersebut (Glasson,1978).

Faktor lain yang tidak kalah menentukan dalam perkembangan suatu wilayah adalah faktor kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini meliputi kebijaksanaan ekonomi, kebijaksanaan sosial dan budaya serta kebijaksanaan wilayah lainnya.

### **Teori-Teori Perkembangan Wilayah**

#### **Teori tempat Pusat**

Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain adalah Losch, Berry dan Garisson dalam Glasson (1978) Teori tempat pusat merupakan suatu teori yang secara lengkap membahas susunan *urban centre*.

Aktivitas pelayanan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis yang berbeda yang berdasarkan fungsinya antara lain:

- a. Pelayanan yang secara langsung melekat pada obyek fisik.
- b. Transportasi dan distribusi barang.
- c. Proses dan distribusi informasi dalam organisasi, administrasi dan pendidikan.
- d. Pelayanan untuk kebutuhan personal maupun umum seperti keamanan dan kesehatan.

Aktivitas di atas terbentuk dalam skala besar. Sehingga membentuk suatu pusat.

### Teori Kutub Pertumbuhan

Teori kutub pertumbuhan diletakkan pada landasan konsep yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan skala regional, perkembangan keruangan maupun perkembangan sosio ekonomi. Teori kutub pertumbuhan banyak mendapat perhatian dari para ahli, salah satunya adalah perroux, yang mengemukakan bahwa “pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan tidak terjadi secara serentak, tetapi pertumbuhan tersebut terjadi pada titik-titik yang selanjutnya berperan sebagai kutub pertumbuhan, dengan intensitas yang berubah-ubah dengan pertumbuhan yang menyebar sepanjang suatu saluran yang beragam dengan efek yang juga beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian” (Glasson, 1978).

Konsep-konsep yang dikemukakan didalam teori pusat pertumbuhan antara lain

1. Konsep *leading industries* dan perusahaan propulsif, yang menyatakan bahwa di pusat-pusat pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan besar yang bersifat propulsif yaitu perusahaan yang relative besar, menimbulkan dorongan pertumbuhan nyata terhadap lingkungannya, mempunyai kemampuan inovasi tinggi, dan termasuk ke dalam industri-industri yang cepat berkembang. Perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan *leading industries* yang mendominasi kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dalam konsep ini *leading industries* adalah:
  - a. Relatif baru, dinamis, dan mempunyai tingkat teknologi maju yang mendorong iklim pertumbuhan kondusif ke dalam suatu daerah

permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi dan biasanya dijual ke pasar-pasar nasional.

- b. Mempunyai kaitan-kaitan antara industri yang kuat dengan sektor-sektor lainnya sehingga terbentuk *forward linkages* dan *backward linkages*.
2. Konsep *polarisasi*. Konsep ini mengemukakan bahwa pertumbuhan *leading industries* yang sangat cepat (*propulsive growth*) akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke kutub pertumbuhan. Proses polarisasi ini sangat bermanfaat bagi industri yang pada akhirnya akan membentuk suatu aglomerasi, baik dalam skala internal bagi perusahaan yang bersangkutan, skala eksternal bagi industri tapi internal bagi daerah perkotaan yang untuk selanjutnya disebut sebagai keuntungan urbanisasi (*urbanization economies*). Keuntungan urbanisasi meliputi berkembangnya pasar tenaga kerja perkotaan, adanya sektor swasta dan pemerintah yang menyediakan berbagai macam jasa bagi penduduk dan bagi industri, yang terdiri dari penyediaan fasilitas-fasilitas perikehidupan perkotaan, terutama fasilitas pusat perkotaan yang menyediakan pelayanan bagi daerah-daerah yang lebih luas. Aglomerasi ini juga timbul karena munculnya polarisasi geografik dengan mengalirnya sumber daya-sumber daya ke konsentrasi kegiatan ekonomi pada pusat-pusat yang jumlahnya terbatas pada suatu daerah.
3. Konsep *spread effect*. Konsep ini mengemukakan bahwa pada suatu waktu kualitas propulsif dinamis dari kutub pertumbuhan akan memencar dan memasuki ruang-ruang disekitarnya. Menurut Myrdal dan Hirscham, *spread effect* atau *trickle down effect* merupakan lawan dari *back wash effect* atau *polarization effect*.

Untuk mengidentifikasi terjadi atau tidak terjadinya *spread effect* di Nusa Tenggara Barat sebagai akibat dari dibentuknya Kapet, dilakukan analisis

mengenai ketimpangan antar Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat, digunakan alat analisis Indeks Williamson dan Indeks Ketimpangan Entropy Theil yaitu :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

$Y_i$  = PDRB Perkapita di Kabupaten i

$Y$  = PDRB Perkapita rata-rata Propinsi

$f_i$  = Jumlah Penduduk di Kabupaten i

$n$  = Jumlah Penduduk Propinsi (Kuncoro, 2004)

Dan Indeks Entropy Theil yaitu :

$$I(y) = \sum (y/Y) \times \text{Log} \left\{ (y_j/Y) / (x_j/X) \right\} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

$I(y)$  = Indeks Entropi Theil

$y_i$  = PDRB Perkapita Kabupaten j

$Y$  = Rata-rata PDRB Perkapita Propinsi

$x_j$  = Jumlah Penduduk Kabupaten j

$X$  = Jumlah Penduduk Propinsi (Kuncoro, 2004)

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment* yaitu pendapatan yang mengalir ke luar wilayah dan dari luar wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita jangka panjang dimana



presentase kenaikan output tersebut haruslah lebih besar dari pertambahan penduduk ( Tarigan, 2004).

Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu:

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- b. Meningkatnya harga diri masyarakat sebagai manusia.
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu hak asasi manusia (Todaro dalam Arsyad, 1999).

Faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah:

1. *Supply Side Influse*.

Kemampuan produksi dan menumbuhkan potensi yang ada adalah faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

2. Kemampuan faktor produksi.

Faktor yang paling berpengaruh dalam faktor produksi adalah ketersediaan lahan sebagai tempat untuk industri, ketersediaan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitasnya dan ketersediaan modal.

3. Skala Ekonomi.

Skala ekonomi terbagi atas skala ekonomi internal dan skala ekonomi eksternal. Dalam skala ekonomi internal diperlukan adanya pengurangan biaya per unit produksi sedangkan pada skala ekonomi eksternal adalah skala keuntungan yang diperoleh dari sumber eksternal diluar organisasi kerja.

4. Organisasi proses produksi.

Faktor lain yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah organisasi produksi dan proses produksi. Organisasi produksi memberi masukan untuk mendapatkan produk yang potensial.

5. Investasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Investasi adalah komponen kunci dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi baik kuantitas maupun kualitas investasi. Investasi modal berasal dari lembaga keuangan. Tabungan adalah sumber investasi. Tabungan seharusnya dihubungkan dengan investasi produksi agar dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Temple, 1994).

### **Indikator pertumbuhan ekonomi**

Menurut Arsyad (1999) Indikator pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah kesejahteraan masyarakat di mana wilayah tersebut berada, untuk mengukur kesejahteraan masyarakat tersebut terdapat indikator-indikator antara lain:

#### **Indikator Moneter**

a. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi.

b. Kesejahteraan Ekonomi bersih

*Net Economic Welfare* ini mencoba menyempurnakan pendapatan perkapita dengan koreksi positif yang mengharuskan kita untuk memperhatikan waktu senggang dan perkembangan sektor ekonomi informal. Koreksi negatif yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan.

#### **Indikator Non Moneter**

a. Indikator Sosial

Indeks kesejahteraan suatu wilayah diukur dari data:

- Jumlah Konsumsi baja dalam satu tahun.
- Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun.

- Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun.
- Jumlah persediaan pesawat radio.
- Jumlah persediaan telepon.
- Jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan.
- Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun.

Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan telah dilakukan dan ditemukan bahwa untuk menentukan tingkat kesejahteraan berdasarkan 18 jenis data antara lain:

1. Persentase anak- anak yang belajar di sekolah menengah.
  2. Persentase anak- anak yang belajar di sekolah kejuruan.
  3. Jumlah surat kabar.
  4. Jumlah telepon.
  5. Jumlah radio.
  6. Jumlah penduduk di kota- kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih
  7. Persentase laki- laki dewasa di sektor pertanian.
  8. Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi.
  9. Persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji.
  10. Persentase PDRB yang berasal dari industri pengolahan.
  11. Konsumsi energi perkapita.
  12. Konsumsi listrik perkapita.
  13. Konsumsi baja perkapita.
  14. Nilai perkapita perdagangan luar negeri.
  15. Produk pertanian rata- rata dari pekerja laki- laki di sektor pertanian.
  16. Produk Domestik Regional Bruto
- b. Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat juga menggunakan Indeks kualitas hidup (Morris dalam Arsyad, 1999). Indeks harapan hidup ini merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu tingkat harapan hidup, angka kematian dan tingkat melek huruf. Indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf masyarakat, tingkat pendapatan riil perkapita. Indeks ini besarnya antara 0 sampai 1 semakin mendekati 1 indeks kualitas hidupnya semakin tinggi.

Pada tahun 1992 Biro Pusat Statistik mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut Susenas Inti. Indikator susenas ini merupakan indikator campuran karena terdiri dari indikator sosial, ekonomi. Indikator ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pendidikan: tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan.
2. Kesehatan: rata-rata hari sakit, fasilitas kesehatan
3. Perumahan: sumber air bersih, listrik, sanitasi, dan mutu rumah tinggal
4. Angkatan kerja: partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, status pekerjaan
5. Keluarga berencana dan fertilitas: penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, penggunaan alat kontrasepsi
6. Ekonomi: tingkat konsumsi perkapita
7. Kriminalitas: jumlah pencurian pertahun, jumlah pembunuhan pertahun, jumlah perkosaan pertahun
8. Perjalanan wisata: frekuensi perjalanan wisata pertahun
9. Akses ke media masa : jumlah surat kabar, jumlah radio, jumlah televisi

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa kondisi KTI sulit berkembang karena berbagai hambatan sehingga diperlukan berbagai langkah atau kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan KTI. Dalam hubungan ini sejak tahun 1996 yang lalu pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun Kapet atau *Growth Centre* di 12 Lokasi di Indonesia.

Strategi ini banyak terdapat silang pendapat antara para ahli. Niles Hansen misalnya menyatakan bahwa strategi di atas khususnya di negara-negara berkembang mengalami banyak hambatan atau kegagalan antara lain disebabkan karena masalah keuangan, ternyata merupakan kendala terbesar bagi berhasilnya pembangunan di pusat- pusat pertumbuhan tersebut (Setiono, 2004).

Demikian pula dengan Harry. W Richardson menyatakan bahwa banyak dari negara-negara berkembang yang meninggalkan konsep pembangunan ini karena *Spread Effect* yang dihasilkan dan yang diharapkan mampu untuk mengembangkan daerah sekitarnya ternyata tidak pernah terwujud dan hanya sedikit sekali menyerap tenaga kerja. Willian G. Tyler menyatakan bahwa strategi ini hanya semakin memperbesar ketimpangan dan perbedaan regional, karena kenyataannya banyak industri-industri yang berada dalam pusat-pusat pertumbuhan itu tidak mempunyai *linkage* dengan sektor wilayah sekitarnya (Setiono, 2004)

Dalam Evaluasi Kinerja dan Rencana Pengembangan Kapet (2005) disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet antara lain:

1. Terjadinya krisis multidimensi yang tidak memungkinkan tumbuhnya investasi baru di Indonesia.
2. Dukungan pembangunan prasarana pemerintah yang belum memadai karena berbagai keterbatasan.
3. Kemampuan masing-masing Kapet (sektor unggulan dan Sumber Daya sumber daya manusia berbeda-beda).
4. Lokasi yang ditetapkan sebagai Kapet kurang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
5. Dukungan sektor khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Kapet masih belum mencerminkan harapan Badan Pengelola Kapet.
6. Dukungan sektor dalam menyediakan intensif dalam menunjang terwujudnya pelayanan langsung belum optimal.

Sedangkan menurut Abdurrahman (2005) dalam bukunya *Regional Management* faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet antara lain:

1. Pengaruh paradigma *Top Down* yang masih melekat pada konsep Kapet yang hingga kini diterapkan. Dominasi partisipasi dan kontribusi pusat, khususnya yang menyangkut aspek pendanaan proyek melalui PABN semakin menguatkan posisi tawar pusat dalam mengaplikasikan pandangan-pandangannya pada setiap kawasan Kapet.
2. Gubernur sebagai kepala daerah propinsi sebatas berkedudukan sebagai pengemban tugas dekonsentrasi dan bukannya representasi kabupaten/ kota (deksentralistik).
3. Kurangnya perlibatan dan partisipasi nyata kabupaten/ kota beserta segenap komponen pembangunannya.

4. Terjadinya tumpang tindih pengawasan yang cenderung inefektif dan inefisien.
5. Proses regionalisasi yang desentralistik belum sungguh-sungguh diterapkan di Kapet

Riyadi (2002) pun menyatakan bahwa dalam rencana pengembangan wilayah Kapet dalam skala yang sangat besar dilakukan secara *Top Down* dengan inisiatif dari pemerintah pusat dan sangat mengandalkan investasi dari luar sebagai pendorong perkembangan wilayah. Konsep-konsep pengembangan wilayah tersebut terkesan sangat sentralistik kurang dapat menangkap keinginan/aspirasi daerah dan masyarakat lokal, sehingga daerah merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana.

Setiono (2004) menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pembangunan Kapet tidak mencapai hasil yang diharapkan antara lain karena:

1. Kurangnya atau tidak adanya keberpihakan (*affirmative actions*) dari pemerintah pusat bersama lembaga-lembaga dibawahnya (departemen/instansi) dalam mendukung pengembangan Kapet.
2. Hingga saat ini hampir semua Kapet telah meminta kepada pemerintah pusat agar dapat dibangun pelabuhan laut, jaringan jalan raya dan telekomunikasi maupun tenaga listrik yang sangat diperlukan bagi pengembangan Kapet namun hasilnya dapat dikatakan tetap nihil.
3. Tidak konsistennya kebijakan mengenai pengembangan Kapet.
4. Tidak adanya koordinasi maupun dukungan dari departemen/ instansi terkait.

Poerwanto (2004) menyatakan berbagai kelemahan dan persoalan yang melekat sejak persiapan kelahiran Kapet sampai dengan saat ini adalah:

1. Terjadinya *missmatch* antara kriteria dan pelaksanaan seleksi kawasan.
2. Terciptanya kompetisi yang tidak sehat. Pemberian intensif investasi yang dimaksudkan untuk menarik investor dalam prakteknya lebih memperkesankan pemberlakuan ketidakadilan antar wilayah yang berdekatan.
3. Pengembangan infrastruktur, SDM, komoditi unggulan dan kerjasama regional yang belum proposional.
4. Rendahnya akuntabilitas lembaga yang terlibat. BP Kapet dan personil yang bekerja didalamnya telah dibentuk namun sebagian *job* deskripsinya masih sangat kabur.
5. Pemisahan kewenangan bidang-bidang yang menjadi urusan BP Kapet dan Pemda masih belum dilakukan secara jelas demikian juga dengan pemisahan urusan yang ditangani sektor atau instansi vertikal di daerah.
6. Masih dipegangnya beberapa bentuk ijin operasi oleh instansi sektor di pusat..

Dalam Laporan mengenai Pengembangan Pola Intensif dalam rangka Percepatan Pengembangan Kapet dikatakan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam kaitan dengan pemberian intensif fiskal antara lain :

1. Belum memadainya serta belum dapat diandalkannya infrastruktur yang ada.
2. Belum efisiennya prosedur bongkar muat dipelabuhan sehingga selain menyita waktu juga rawan terhadap berbagai biaya tak resmi.
3. Masih perlu disempurnakannya koordinasi lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal antar berbagai instansi yang berwenang terhadap Kapet sehingga dapat dihindarkan terjadinya benturan kepentingan baik secara vertikal antar tingkat pemerintah (pusat-propinsi-kabupaten/ kota) maupun



secara horizontal antara BP Kapet setempat dengan pemerintah daerah yang bersangkutan, terutama setelah pelaksanaan otonomi daerah.

4. Masih perlu ditingkatkannya *responsivness* BP Kapet maupun pemerintah yang berwenang dalam menghadapi berbagai keluhan investor secara kongkrit, seperti memberikan jaminan keamanan berusaha, meberikan informasi peluang bisnis yang obyektif dan memadai, memangkas jalur-jalur ilegal perijinan dan menciptakan perencanaan wilayah yang terintegrasi dan kondusif bagi berbagai kegiatan usaha.

#### **Alternatif Pengelolaan Kapet**

BP. Kapet merupakan organisasi publik Organisasi publik memang berbeda dengan organisasi bisnis karena organisasi publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Organisasi publik tidak sepenuhnya otonomi tetapi dikuasai faktor-faktor eksternal.
2. Organisasi publik secara resmi diadakan untuk pelayanan masyarakat.
3. Organisasi publik tidak dimaksud kan untuk berkembang menjadi besar sehingga merugikan organisasi publik lain
4. Kesehatan organisasi publik diukur melalui:
  - Kontribusinya terhadap tujuan politik.
  - Kemampuan mencapai hasil maksimum dengan sumber daya yang tersedia.
5. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan memberi pengaruh politik yang negatif/ merugikan.

Meskipun organisasi publik memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis akan tetapi paradigma baru Administrasi Publik yang dipelopori oleh Ted Gabler dan David Osborne dengan karyanya "*Reinventing Government*" telah memberikan inspirasi bahwa administrasi publik harus dapat beroperasi layaknya organisasi bisnis, efisien, efektif dan menempatkan masyarakat sebagai stake holder yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan Kapet dikenal istilah *Regionalisasi*. Regionalisasi sendiri terdiri dari beberapa jenis yaitu:

#### **Regionalisasi Sentralistik (Sentralisasi)**

Pada proses regionalisasi sentralistik keputusan kerjasama didominasi oleh pertimbangan teknis yang berujung pada kebijakan Pemerintah Pusat dengan demikian aspek pengambilan keputusan terhadap terjadinya perluasan wilayah didominasi oleh kebijakan yang sifatnya *Top Down* (Pemerintah Pusat) (Abdurahman, 2005).

Perencanaan dan aplikasi pembangunan disegala sektor didominasi oleh paradigma *Top Down* (Sentralistik). Hal ini terlihat dari mulai proses perencanaan hingga pengambilan keputusan yang tidak lepas dari dominasi kewenangan pusat.

Bentuk dari Regionalisasi Sentralistik antara lain:

1. Strukturnya berbentuk hirarkis dan struktural.
2. Hubungan antar wilayah direktif melalui pengarahan-pengarahan dan cenderung monologis dan bermuara pada kebijakan.
3. Kelembagaannya bersifat prosedural, birokratis dan administratif.
4. Legalitasnya ditentukan oleh keputusan kebijakan lembaga administrasi yang lebih tinggi.

5. Orientasi kegiatan yang dilakukan berpedoman pada perencanaan formal pembangunan.
6. Proses Komunikasi yang terjadi melalui tahapan dan prosedur yang formal.
7. Proses Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang dan melalui mekanisme yang formal.
8. Pendanaannya melalui anggaran pusat yang jumlahnya telah ditentukan dan disediakan sesuai dengan konsep (Abdurahman,2005).

Manfaat pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (sentralistik) antara lain :

1. Koordinasi pembangunan nasional.
2. Keseimbangan dan pemerataan daerah.
3. Pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan dan juga berlangsungnya dapat tetap dijaga.

Selain memiliki manfaat pengelolaan oleh pusat (sentralistik) juga memiliki implikasi antara lain:

1. Tidak memperkuat basis partisipasi masyarakat.
2. Tidak melibatkan adanya transfer kewenangan pada level pemerintah yang lebih rendah.

(Yuwono, 2001)

### **Regionalisasi Transformatik (Dekonsentrasi)**

Regionalisasi transformatik terjadi apabila dalam pelaksanaan regionalisasi desentralistik atau pemanfaatan paradigma sentralistik masih ditemukan berbagai kegiatan yang bersifat sentralistik (Abdurrahman, 2005).

Dimana dalam penyelenggaraannya masih didominasi oleh Pemerintah Pusat (dekonsentrasi)

Manfaat dari Dekonsentrasi adalah:

1. Terdapat *chek and balance* dalam pengelolaan.
2. Terdapat kontrol sosial dalam pengelolaan.
3. Berkurangnya peran pemerintah pusat.
4. Munculnya peran aktif masyarakat. Pemberdayaan partisipasi masyarakat termasuk dalam kehidupan perekonomian rakyat.

(Fitriyah, 2001)

### **Regionalisasi Desentralistik (Desentralisasi)**

Dalam regionalisasi desentralistik peran pemerintah pusat maupun propinsi tidak lagi sedominan seperti pada masa lalu. Mengingat pentingnya partisipasi para aktor regional dalam melaksanakan kerjasama, maka aspek komunikasi kini menempati posisi terpenting dalam komponen regionalisasi. Hal ini karena semua pihak yang berkepentingan harus duduk bersama dan mengedepankan konsensus untuk mencapai komitmen (Abdurrahman, 2005).

Bentuk dari regionalisasi desentralistik antara lain:

1. Struktur berbentuk nonhirarkis dan nonstruktural.
2. Hubungan antar wilayah berbentuk diskusi dialogis, tukar menukar pendapat/ informasi dan negosiasi yang bermuara pada komitmen.
3. Kelembagaan bersifat terbuka dapat berbentuk forum, badan kerjasama dan PPP hingga pengelolaan profesional oleh swasta.
4. Legalitas merupakan keputusan bersama para aktor regional yang dikukuhkan oleh prosedur hukum formal.
5. Orientasi kegiatan berpedoman pada kesepakatan dan program bersama.
6. Keputusan terjadi melalui kesepakatan bersama.

7. Keuangan beraal dari anggaran partisipatif antar anggota terkait dan dari sumber pendanaan lainnya.

Manfaat desentralisasi antara lain:

1. Memperbaiki terselenggaranya efisiensi dan efektifitas pelayanan Publio.
2. Akuntabilitas yang meningkat.
3. Eksperimentasi dan inovatif.
4. Motivasi personil di daerah.
5. Memperkuat partisipasi rakyat.
6. Membantu Pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempermudah masuknya investasi.

Selain memiliki manfaat desentralisasi juga mempunyai implikasi-implikasi antara lain:

1. Memperbesar perbedaan disparitas regional dalam menyediakan pelayanan publik
2. Beban penduduk lokal akan semakin berat (kendala pembiayaan).
3. Komplikasi dengan sentimen kedaerahan.
4. Menjadi tantangan bagi mereka yang bertanggungjawab untuk mendesain, mengelola dan mengimplementasikan.
5. Harus ada sebuah badan lokal yang secara konstitusional terpisah dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab pada pelayanan lokal secara signifikan.
6. Pemerintah daerah harus memiliki kekayaan sendiri, anggaran dan rekening seiring dengan otoritas untuk meningkatkan pendapatannya.
7. Harus mengembangkan kompetensi staf dengan menggaji, memecat dan mempromosikan mereka. (Adnan, 2001)

### **Pengelolaan oleh Pihak Ketiga (Konsultan Ahli)**

Yang dimaksud dengan pengelolaan oleh pihak ketiga (privatisasi) pemerintah menyerahkan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi nirlaba atau mengizinkan mereka membentuk perusahaan swasta.

Pengelolaan oleh sektor privat diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.
2. Meningkatkan produktivitas organisasi.
3. Meningkatkan akuntabilitas organisasi.
4. Profesionalisme.

Manajemen oleh sektor privat ini hasilnya akan lebih efektif bila komitmen yang membarengi misalnya sistem gaji dan intensif (Yuwono, 2001).

### **Rangkuman Literatur**

#### **Indikator Kinerja Kapet**

Kemungkinan indikator kinerja yang didapatkan dari hasil kajian literatur untuk mengukur kinerja Kapet antara lain:

1. Tingkat pendapatan (pendapatan perkapita)
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
3. Perdagangan
4. Investasi
5. Ekspor
6. Pendidikan : tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan.
7. Kesehatan: rata-rata hari sakit, fasilitas kesehatan.

8. Perumahan: sumber air bersih, listrik, sanitasi, dan mutu rumah tinggal.
9. Angkatan kerja: partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, status pekerjaan.
10. Keluarga berencana dan fertilitas: penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, penggunaan alat kontrasepsi.
11. Kriminalitas: jumlah pencurian pertahun, jumlah pembunuhan pertahun, jumlah perkosaan pertahun.
12. Perjalanan wisata: frekuensi perjalanan wisata pertahun.
13. Akses ke media masa: jumlah surat kabar, jumlah radio, jumlah televisi.
14. Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia.
15. Konsumsi protein hewani perkapita.
16. Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih.
17. Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi.
18. Persentase PDRB yang berasal dari industri pengolahan
19. Konsumsi energi perkapita.
20. Konsumsi listrik perkapita.
21. Konsumsi baja perkapita.

Melalui pendekatan teoritis (Teori Pusat Pertumbuhan) kinerja peran Kapet diukur melalui identifikasi ketimpangan antar kabupaten dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui apakah *Spread Effect (Trickle Down Effect)* yang diharapkan terjadi di wilayah Kapet Bima melalui indeks williamson dan indeks entropy theil dengan rumus sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

$Y_i$  = PDRB Perkapita di Kabupaten i  
 $Y$  = PDRB Perkapita rata-rata Propinsi  
 $f_i$  = Jumlah Penduduk di Kabupaten i  
 $n$  = Jumlah Penduduk Propinsi

(Kuncoro, 2004)

Dan Indeks Entropy Theil yaitu :

$$I(y) = \sum (y/Y) \times \text{Log} \left\{ (y_j/Y) / (x_j/X) \right\} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

$I(y)$  = Indeks Entropi Theil  
 $y_i$  = PDRB Perkapita Kabupaten j  
 $Y$  = Rata-rata PDRB Perkapita Propinsi  
 $x_j$  = Jumlah Penduduk Kabupaten j  
 $X$  = Jumlah Penduduk Propinsi

(Kuncoro, 2004)

### **Kriteria Indikator Kinerja Kapet**

Menurut Gaspersz (2004) dalam bukunya Perencanaan Strategik untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik, suatu petunjuk praktek kriteria untuk menentukan indikator kinerja antara lain:

1. Bermakna (*meaningful*), secara signifikan dan langsung berkaitan dengan misi, sasaran dan tujuan.
2. Sahih (*valid*) mewakili apa yang sedang diukur.
3. Dapat dipercaya (*credible*) berdasarkan pada data yang akurat dan dapat dipercaya.
4. Dapat diperbandingkan (*comparable*) berguna untuk perbandingan dengan data lain sepanjang waktu.
5. Mudah (*simple*) mudah menghitung dan menginterpretasikan.
6. Berguna (*useful*) secara akurat mencakup kemajuan sepanjang waktu.



Sedangkan menurut Setiawan (2004) kriteria-kriteria dalam menetapkan indikator kinerja antara lain:

1. Langsung

Sebuah indikator kinerja harus mengukur sedekat mungkin hasil yang diinginkan. Indikator tersebut tidak boleh dimasukkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari hasil yang sedang diukur. Jika menggunakan ukuran langsung tidak memungkinkan, satu atau lebih indikator alternatif akan lebih tepat. indikator alternatif dibutuhkan untuk menyediakan pendekatan yang tepat mengenai kemajuan. Penjajakan alternatif adalah penjajakan tidak langsung yang berhubungan dengan hasil, dengan satu atau lebih asumsi.

2. Kuantitatif

Jika memungkinkan indikator kuantitatif adalah numerik (jumlah persentase nilai dollar, tonase sebagai contohnya).

3. Praktis

Sebuah indikator disebut praktis jika data dapat diperoleh dengan cara yang tepat dan biaya yang layak. Para manajer menginginkan data yang dapat dikumpulkan cukup memadai untuk menginformasikan mereka mengenai kemajuan dan mempengaruhi keputusan.

4. *Specific*

Jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

5. *Relevant*

Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator.

6. *Timely*

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan.

### **Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet**

1. Industri-industri yang terdapat dalam Kapet tidak cepat berkembang (bukan *Leading Industri*).
2. *Spread Effect* yang dihasilkan dan yang diharapkan mampu untuk mengembangkan daerah sekitarnya ternyata tidak pernah terwujud dan hanya sedikit sekali menyerap tenaga kerja.
3. Industri-industri yang berada dalam pusat-pusat pertumbuhan itu tidak mempunyai linkage dengan sektor wilayah sekitarnya.
4. Terjadinya krisis multidimensi yang tidak memungkinkan tumbuhnya investasi baru di Indonesia.
5. Kemampuan masing-masing Kapet (sektor unggulan dan Sumber Daya sumber daya manusia berbeda-beda).
6. Lokasi yang ditetapkan sebagai Kapet kurang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
7. Dukungan sektor dalam menyediakan intensif dalam menunjang terwujudnya pelayanan langsung belum optimal.
8. Pengaruh paradigma *Top Down* yang masih melekat pada konsep Kapet yang hingga kini diterapkan. Dominasi partisipasi dan kontribusi pusat, khususnya yang menyangkut aspek pendanaan proyek melalui APBN semakin menguatkan posisi tawar pusat dalam mengaplikasikan pandangan-pandangannya pada setiap kawasan Kapet.

9. Gubernur sebagai kepala daerah propinsi sebatas berkedudukan sebagai pengemban tugas dekonsentrasi dan bukannya representasi kabupaten/ kota (deksentralistik).
10. Kurangnya perlibatan dan partisipasi nyata kabupaten/ kota beserta segenap komponen pembangunannya.
11. Terjadinya tumpang tindih pengawasan yang cenderung inefektif dan inefisien
12. Proses regionalisasi yang desentralistik belum sungguh-sungguh diterapkan di Kapet.
13. Kurangnya atau tidak adanya keberpihakan (*affirmative actions*) dari pemerintah pusat bersama lembaga- lembaga dibawahnya (departemen/ instansi) dalam mendukung pengembangan Kapet.
14. Tidak konsistennya kebijakan mengenai pengembangan Kapet.
15. Tidak adanya koordinasi maupun dukungan dari departemen/ instansi terkait.
16. Terjadinya mismatch antara kriteria dan pelaksanaan seleksi kawasan.
17. Terciptanya kompetisi yang tidak sehat. Pemberian intensif investasi yang dimaksudkan untuk menarik investor dalam prakteknya lebih memperkesankan pemberlakuan ketidakadilan antar wilayah yang berdekatan.
18. Pengembangan infrastruktur, SDM, komoditi unggulan dan kerjasama regional yang belum proposional.
19. Rendahnya akuntabilitas lembaga yang terlibat, BP Kapet dan personil yang bekerja didalamnya telah dibentuk namun sebgaimana *job* deskripsinya masih sangat kabur.
20. Pemisahan kewenangan bidang-bidang yang menjadi urusan BP Kapet dan pmda masih belum dilakukan secara jelas demikian juga dengan pemisahan urusan yang ditangani sektor atau instansi vertikal didaerah.

21. Masih dipegangnya beberapa bentuk ijin operasi oleh instansi sektor di pusat.
22. Masih perlu ditingkatkannya responsiveness BP Kapet maupun pemerintah yang berwenang dalam menghadapi berbagai keluhan investor secara kongkrit, seperti memberikan jaminan keamanan berusaha, memberikan informasi peluang bisnis yang obyektif dan memadai, memangkas jalur-jalur ilegal perijinan dan menciptakan perencanaan wilayah yang terintegrasi dan kondusif bagi berbagai kegiatan usaha.
23. Promosi investasi yang dilakukan masih sangat kurang sekali.

### **Manfaat dan Beban Pembinaan dan Pengelolaan Kapet**

#### **Manfaat Pembinaan dan Pengelolaan Kapet**

1. Koordinasi pembangunan nasional.
2. Keseimbangan dan pemerataan daerah.
3. Pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan dan juga berlangsungnya dapat tetap dijaga.
4. Memperbaiki terselenggaranya efisiensi dan efektifitas pelayanan publik
5. Akuntabilitas yang meningkat.
6. Eksperimentasi dan inovasi.
7. Komunikasi antar personil di daerah.
8. Memperkuat partisipasi rakyat.
9. Membantu Pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempermudah masuknya investasi.
10. Profesionalisme.

**Beban Pembinaan dan Pengelolaan Kapet**

1. Memperbesar perbedaan disparitas regional dalam menyediakan pelayanan publik.
2. Beban penduduk lokal akan semakin berat (kendala pembiayaan).
3. Komplikasi dengan sentimen kedaerahan.
4. Menjadi tantangan bagi mereka yang bertanggungjawab untuk mendesain, mengelola dan mengimplementasikan.
5. Harus ada sebuah badan lokal yang secara konstitusional terpisah dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab pada pelayanan lokal secara signifikan.
6. Pemerintah daerah harus memiliki kekayaan sendiri, anggaran dan rekening seiring dengan otoritas untuk meningkatkan pendapatannya.
7. Harus mengembangkan kompetensi staf dengan menggaji, memecat dan mempromosikan mereka.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KAPET BIMA DAN WILAYAH KABUPATEN BIMA**

### **Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu**

Lebih dari tiga dasawarsa, Pemerintah melaksanakan program pembangunan nasional, telah banyak kemajuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Namun demikian, dibalik keberhasilan tersebut, masih banyak pula berbagai kekurangan dan kelemahan yang menyertainya. Salah satu kekurangan dan kelemahan di tengah-tengah pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat tersebut, adalah terjadinya pertumbuhan yang tidak seimbang antar sector, kesenjangan ekonomi antar golongan penduduk dan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Secara regional, kesenjangan pembangunan tersebut terjadi antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah atau kawasan sebagai di atas akan sulit dilakukan apabila proses perkembangan dibiarkan tanpa adanya intervensi pemerintah. KTI yang sudah tertinggal akan semakin tertinggal apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengatasinya. Atas dasar itu, maka pada tahun 1996 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan KTI meliputi: (1) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) di KTI; (2) Pemberian Insentif Investasi; dan (3) Pengembangan Komoditas Tertentu (Setiono, 2004).

### **Pengembangan Kapet.**

Salah satu kebijakan pengembangan KTI yang diputuskan adalah mengembangkan satu kawasan andalan di setiap propinsi yang disebut Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet). Kapet ini diharapkan dapat menjadi 'Pusat Pertumbuhan' yang pada gilirannya mampu merangsang pertumbuhan wilayah sekitarnya (*hinterlands*) melalui apa yang disebut '*Trickle down effects*'. Pada Kapet - Kapet tersebut akan diprioritaskan upaya-upaya pembangunan baik berupa pengembangan infrastruktur, pengembangan sumberdaya alam, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Sesuai dengan maksud di atas, pendekatan pengembangan Kapet dilakukan melalui (1) pendekatan yang berorientasi pada sumberdaya (*resources based oriented*); (2) pendekatan yang berorientasi pada keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi (*knowledge based*); (3) pendekatan yang meletakkan manusia sebagai pusat pembangunan (*people centered approach*). Selanjutnya, melalui pendekatan tersebut, maka pengembangan Kapet diarahkan sebagai:

- Kawasan yang mempunyai kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan (*prime mover*) daerah;
- Kawasan yang mempunyai keterkaitan kuat dengan daerah lain, meliputi keterkaitan produksi, pemasaran dan transportasi;
- Kawasan yang memiliki infrastruktur yang relatif lebih baik.

(Setiono, 2004)

### **Pemberian Insentif Investasi.**

Keberhasilan percepatan pembangunan KTI sangat tergantung pada pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah, mengolah dan memasarkan produk-produk tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kegiatan sebagai di atas memerlukan dana investasi yang besar. Dengan keterbatasan dana yang dapat disediakan oleh Pemerintah, maka perlu diupayakan untuk memberikan rangsangan kepada dunia usaha dan masyarakat. Rangsangan tersebut antara lain berupa pemberian bermacam-macam insentif atau kemudahan-kemudahan kepada dunia usaha maupun masyarakat untuk menanamkan modalnya di KTI.

Insentif-insentif sebagai di atas, dapat dikelompokkan kedalam (1) Insentif yang berbentuk subsidi; (2) Insentif yang berupa keringanan pajak; (3) Insentif yang berupa kemudahan administrasi; (4) Insentif yang berupa pemberian kredit; dan (5) Insentif untuk menanggulangi mobilitas SDM.

(Setiono, 2004)

### **Pengembangan Komoditas Potensial.**

Dari identifikasi sumberdaya alam yang terdapat di KTI, diperoleh data bahwa paling tidak ada 7 (tujuh) sector (ekonomi) andalan yang dapat dikembangkan, antara lain yaitu: sector pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, pariwisata, pertambangan dan industri. Apabila potensi sector ekonomi pada masing-masing Kapet tersebut dijabarkan, maka gambarannya adalah sebagai berikut:



**TABEL III .1**  
**POTENSI KAPET**

Kapet	1	2	3	4	5	6	7
Sanggau		X		X	X		
Sejuta Lahan	X			X			
Batulicin		X	X	X	X	X	X
Sasamba		X	X	X	X	X	X
Manado.Bitung			X			X	X
Batui	X	X	X				X
Pare-Pare	X	X	X				X
Bukari	X	X	X			X	
Seram (MAL)		X	X	X	X	X	
Biak (IRJA)			X			X	X
Bima (NTB)	X	X	X				X
Mbay (NTT)	X		X				X
Jumlah	<b>7</b>	<b>9</b>			<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Keterangan: 1=Pertanian Tanaman Pangan, 2=Perkebunan, 3=Perikanan, 4=Kehutanan, 5=Pertambangan, 6=Pariwisata, 7=Industri.

Sumber: Setiono, 2004

Dari uraian di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan KTI terutama melalui pengembangan Kapet-Kapet tersebut adalah:

1. Mempercepat pertumbuhan pembangunan KTI dengan memusatkan aktivitas kegiatan perekonomian dengan mengembangkan sector-sektor unggulan pada Kapet, yang diharapkan akan dapat menjadi *'prime mover'* pembangunan daerah, serta diharapkan akan dapat menggerakkan perekonomian daerah sekitarnya.
2. Merupakan keserasian antara kebijakan yang menekankan pertumbuhan dan pemerataan, termasuk mengembangkan keterkaitan (*linkages*) dengan daerah sekitarnya dalam upaya pemerataan pembangunan;
3. Pemberian insentif investasi sebagai bagian upaya pemerintah untuk merangsang dunia usaha untuk menanamkan modalnya di KTI.

(Setiono, 2004)

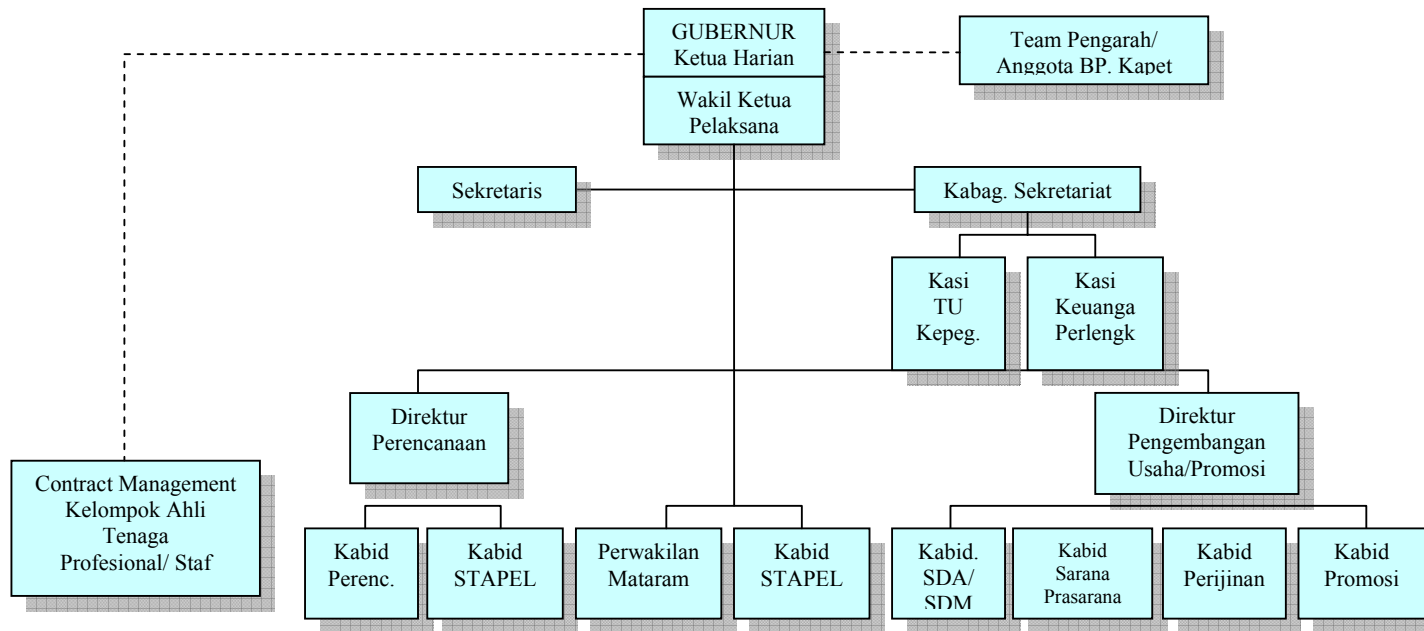
## **Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima**

### **Organisasi**

Dalam pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) terdapat beberapa produk hukum yang melegitimasinya antara lain:

1. Kepres No.166 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima.
2. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS selaku Ketua Harian DP KTI No. SK. 002/KH/DP-KTI/II/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP Kapet di Kawasan Timur Indonesia.
3. Kepres No.150 Tahun 2000 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet).
4. PP Nomor 20 tahun 2000 tentang Perpajakan Kapet.
5. PP Nomor 147 tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kapet.

Ketua BP. Kapet Bima adalah Menteri Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya organisasi Kapet di reposisi kembali. Dalam hal ini Ketua Kapet Bima adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagaimana ditetapkan dalam Kepres No. 150 Tahun 2000. Berikut ini susunan organisasi Kapet Bima berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 077/BP.KAPET Bima/SK/061/2002.



Sumber: Laporan Akhir Rencana Pengembangan Bisnis Usaha, 2004

**GAMBAR 3.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BP. KAPET BIMA**

Dalam Buku Laporan Akhir Rencana Pengembangan Usaha (Bisnis Plan) Kapet Bima dan Pra Studi Kelayakan Peluang Investasi Tahun 2004 disebutkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Kapet Bima adalah:

1. Pelaksana Pembangunan dan Pengelolaan Kapet Bima dilakukan oleh Badan Pengelola Kapet Bima.
2. Badan Pengelola harus mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kapet sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Kapet.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan usahanya, Badan Pengelola melaksanakan fungsi-fungsi:
  - a. Melaksanakan Rencana Induk Pengembangan Kapet yang ditetapkan oleh Tim Pengarah Pusat.
  - b. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan industri, perdagangan dan jasa di wilayah Kapet termasuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lain.
  - c. Memberikan dan mengendalikan perijinan usaha berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap.
4. Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Pengelola bertanggung jawab kepada Presiden RI melalui Menteri Koordinator Perekonomian/ Ketua Badan Pengembang Kapet yang secara teknisnya dilakukan oleh Menteri Kimpraswil/ Ketua Tim Teknis Badan Pengembangan Kapet.
5. Tugas Ketua dan/ Wakil Ketua/ Tim Pengarah BP. Kapet Bima:

- a. Ketua BP. Kapet bertugas: Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kapet sesuai dengan RIP/ RIK.
- b. Wakil Ketua BP. Kapet bertugas: Melaksanakan tugas sehari-hari Ketua BP. Kapet di lokasi Kapet yang bersangkutan.
- c. Tim Pengarah/ Anggota BP. Kapet mempunyai tugas:
  - Membantu Badan Pengelola Kapet sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga yang diwakili.
  - Memberikan bahan informasi dan pertimbangan bagi kelancaran tugas Badan Pengelola Kapet sesuai bidang tugas/ Profesi dan keahlian masing-masing.

### **Visi dan Misi Kapet Bima**

#### **Visi**

Berdasarkan kondisi ekonomi regional wilayah Kapet Bima dan kebijaksanaan kebijaksanaan nasional dan daerah yang telah ditetapkan maka visi pengembangannya adalah "Mewujudkan Kapet Bima sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pengembangan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang akan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah KTI dengan memanfaatkan potensi alam, khususnya pengembangan agroindustri dan wisata bahari.

#### **Misi**

Mendorong kegiatan perekonomian wilayah agar mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup penduduk lokal melalui:

1. Meningkatkan perekonomian regional dengan memanfaatkan komoditas kelautan khususnya komoditas Mutiara, Rumput Laut dan Tambak Udang
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan komoditas perkebunan dan komoditas peternakan serta industri pengolahannya.
3. Mengembangkan obyek wisata bahari yang potensial dengan memanfaatkan keuntungan lokasi Kapet Bima.

### **Kebijaksanaan**

Kebijaksanaan pengembangan Kapet Bima antara lain:

1. Pengembangan kawasan-kawasan andalan yang mempunyai potensi cepat tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Pengembangan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi wilayah lokal, nasional dan internasional.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
4. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
5. Pemberian intensif baik fiskal maupun nonfiskal kepada investor.

(Rencana Induk Pengembangan Kapet Bima, 2001)

### **Strategi Pengembangan**

Strategi-strategi kebijaksanaan sebagai upaya pengembangan visi dan misi Kapet Bima. Oleh karena itu strategi pengembangan Kapet Bima adalah:

1. Mengoptimalkan keterkaitan sistem prasarana dasar sebagai pendukung pengembangan komoditi perkebunan, perikanan dan pariwisata melalui pengembangan kawasan sentra produksi serta pusat-pusat pelayanan.

2. Membangun prasana dasar pekerjaan umum dan non pekerjaan umum serta menyiapkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sampai ketaraf yang memadai untuk pengembangan agroindustri dan agrobisnis serta mengembangkan kawasan wisata dan kawasan pertambangan.
3. Menciptakan dan menjamin kemudahan sistem dan prosedur perijinan melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Disamping itu mengembangkan prasarana pekerjaan umum dan non pekerjaan umum yang bersifat eksternal (bandar udara, pelabuhan laut) maupun yang bersifat internal (jalan, jembatan, listrik dan telepon).
4. Menciptakan kegiatan promosi dan kerjasama perdagangan industri dan pariwisata dengan berbagai pihak. Menyusun dan memperlakukan Rencana Tata Ruang yang luwes, diperkuat dengan Produk Hukum dan Peraturan Daerah.
5. Mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah Kapet Bima berdasarkan Rencana Tata Ruang.
6. Memobilisasi dan memberdayakan satuan-satuan komoditas adat maupun formal untuk membangun kesatuan citra sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan.

(Rencana Induk Pengembangan Kapet Bima, 2001)

### **Program dan Kegiatan**

Melalui strategi yang telah disebutkan di atas terdaapt beberapa program kegiatan yang dilakukan, sebagian program dan kegiatan telah dilakukan dan sebagaian lagi akan dilakukan seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini:

**TABEL III.2  
PROGRAM DAN KEGIATAN KAPET**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	BENEFIT
1	Program Investasi	* Penyusunan Rencana Teknik Kawasan Pulau Satonda	Rencana Teknik Kawasan Satonda	Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan Satonda	Masuknya investor baru dalam bid. Wisata Meningkatnya wisatawan yang datang	Meningkatnya nilai investasi yang masuk Meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah Meningkatnya kesejahteraan rakyat
		* Pembangunan Prasarana Pendukung Kawasan Pulau Satonda	Prasarana Pendukung	Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan Satonda	Masuknya investor baru dalam bid. Wisata Meningkatnya wisatawan yang datang	
		* Pembuatan Foto dan Compact Disc (CD) Gunung Tambora	Foto dan CD Gunung Tambora	Peningkatan Minat Wisatawan Gunung Tambora	Masuknya investor baru Meningkatnya wisatawan yang datang	
		* Penyusunan Rencana Teknik dan Detail Tata Ruang Pantai Lakey	Rencana Teknik dan Detail Tata Ruang Pantai Lakey	Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan Pantai lakey	Masuknya investor baru dalam bid. Wisata Meningkatnya wisatawan yang datang	
		* Pembangunan Fasilitas Jalan Lingkungan Pantai Lakey	Jalan Lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan Pantai lakey	Masuknya investor baru dalam bid. Wisata Meningkatnya wisatawan yang datang	
		* Pembangunan Pentas Terbuka Pantai Lakey	Pentas Terbuka	Peningkatan jumlah wisatawan	Meningkatnya wisatawan yang datang	
2	Program Pengembangan Komoditi Unggulan	* Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penanaman Rumput Laut	Peningkatan kuantitas dan kualitas rumput laut	Peningkatan posisi tawar rumput laut	Meningkatnya daya jual rumput laut Masuknya investor baru dalam bd. Pertanian	Meningkatnya nilai ekspor rumput laut Meningkatnya nilai ekspor udang
		* Intensifikasi dan Ekstensifikasi Tambak Udang	Peningkatan kuantitas dan Udang	Peningkatan posisi tawar Udang	Meningkatnya daya jual udang Masuknya investor baru dalam bd. Pertanian	
3	Program Peningkatan Kualitas SDM	* Pembangunan Lab. Bahasa untuk Program Angkatan Kerja ke Luar Negeri	Kemampuan Bahasa Asing Angkatan kerja	Peningkatan kualitas bahasa angkatan kerja	Meningkatnya kemampuan bahasa asing angk. kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja (investasi)
		* Latihan penguasaan Bahasa	Kemampuan Bahasa Asing Angkatan kerja	Peningkatan kualitas bahasa angkatan kerja	Meningkatnya kemampuan bahasa asing angk. kerja	

Sumber: BP. KAPET Bima, 2005



### **Pendanaan**

Pendanaan Program dan Kegiatan Kapet Bima dibebankan kepada Pemerintah Daerah setempat dan bantuan dari Investor, sedangkan pendanaan untuk operasionalisasi BP. Kapet Bima dibebankan kepada Pemerintah Pusat (APBN).

### **Peluang Kapet Bima**

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pembangunan wilayah Kapet diantaranya adalah:

Posisi geografis dalam wilayah Indonesia maupun didalam wilayah Asia Pasifik serta antar wilayah Asia (terutama Asia Timur dan Tenggara) Hal ini disebabkan sebagian besar kawasan KTI adalah merupakan wilayah kelautan yang menghubungkan antara KBI dengan wilayah Pasifik serta wilayah Asia lainnya. Sehingga berpeluang untuk menarik kegiatan untuk berlokasi di KTI. Hubungan perdagangan antara Australia dan Selandia Baru dengan negara-negara Asia Timur khususnya Jepang selalu memanfaatkan perairan KTI.

Peluang bagi pengembangan Kapet Bima antara lain dengan adanya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang Kapet antara lain :

1. Kepres No.89 tahun 1996.
2. Kepres No. 166 Tahun 1998.
3. Keputusan Presiden No. 150 tahun 2000 tentang Kapet.
4. PP Nomor 20 tahun 2000 tentang Perpajakan Kapet.
5. PP Nomor 147 tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kapet.

### **Isu dan Permasalahan Kapet Bima**

Isu dan permasalahan Kapet Bima antara lain:

1. Tingkat pendidikan SDM terbatas.
2. Minat Investor rendah, terbatas disektor peternakan dan budidaya mutiara.
3. Keterbatasan prasarana (air, listrik, sumber daya buatan, jalan).
4. Difersifikasi usaha umumnya sangat kecil sehingga mengakibatkan posisi tawar terhadap komoditi yang dihasilkan menjadi lemah karena tidak ada alternatif lain yang dapat ditawarkan untuk memenuhi adanya desakan kebutuhan hidup.

### **Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Bima**

#### **Letak Geografis dan Administrasi**

Wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur dari enam (6) kabupaten dan dua (2) Kota Madya yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis berkedudukan pada  $118^{\circ} 44'$  –  $119^{\circ} 22'$  BT dan  $08^{\circ} 08'$  –  $08^{\circ} 57'$  LS. Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Flores.
Sebelah Selatan	: Samudra Hindia.
Sebelah Timur	: Selat Sape
Sebelah Barat	: Kabupaten Dompu.

Dalam lingkup wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, letak geografis Kabupaten Bima dapat dilihat pada gambar/Peta Orientasi Kabupaten Bima No. 2.1 Luas Wilayahnya lebih kurang 437.465 Ha atau 22 % dari luas wilayah

Propinsi Nusa Tenggara Barat. Terbagi atas 14 kecamatan yang terdiri dari 150 desa dan 419 dusun. Perincian luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Bima dapat dilihat pada TABEL III.3 dibawah ini :

**TABEL III.3**  
**LUAS WILAYAH TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN BIMA (HA)**  
**TAHUN 2003**

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah	
				Desa	Dusun
1	Monta	Tangga	45.100	16	22
2	Bolo	Sila	10.141	12	55
3	Mada Pangga	Dena	18.909	8	26
4	Woha	Tente	7.525	14	44
5	Belo	Cenggu	15.230	15	36
6	Langgudu	Karumbu	28.318	11	25
7	Wawo	Maria	22.527	11	19
8	Sape	Naru	24.453	16	37
9	Lambu	Lambu	37.412	10	17
10	Wera	Tawali	39.200	9	37
11	Ambalawi	Nipa	25.550	6	24
12	Donggo	O'o	40.600	13	58
13	Sanggar	Kore	72.000	5	12
14	Tambora	Labuan Kananga	50.500	4	7
<b>Jumlah/Total</b>			<b>437.465</b>	<b>150</b>	<b>419</b>

*Sumber: Bima Dalam Angka Tahun 2003*

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Sanggar, dengan luas 72.000 Ha atau 16,46 % dan yang terkecil adalah kecamatan Woha seluas 7.525 Ha atau 1,72% dari luas wilayah Kabupaten Bima.

### **Kondisi Fisik Dasar**

#### **Klimatologi**

Kabupaten Bima dipengaruhi tipe iklim D, E dan F (menurut Schmidth dan Ferguson, 1951). Musim hujan relatif pendek, curah hujan rata-rata tahunan

sebesar 83 mm dengan hari hujan 6 hari/tahun. Suhu udara siang hari antara 28 – 32°C. Terjadi perbedaan suhu udara yang sangat besar antara siang dan malam hari. Selain curah hujan tahunan yang relative kecil, penyebarannyapun juga tidak merata, dimana bulan Mei-Oktober merupakan bulan yang jarang terjadi hujan. Keadaan dan distribusi curah hujan setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bima dapat dilihat pada TABEL III.4.

**TABEL III.4**  
**DATA HUJAN DI WILAYAH KABUPATEN BIMA**  
**DIRINCI PER KECAMATAN TAHUN 2003**

No	Kecamatan	2000		2001		2002		2003		RATA-RATA	
		CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
1	Monta	75,33	10	60,92	9,08	45,58	6	66,42	9	62	9
2	Bolo	110,4	8,25	78,33	7,42	73,08	5	102,4	6	91	7
3	Mada					1,33	0	16,5	5	4	1
4	Woha	89,5	10,2	73,08	8,75	55,25	6	78,42	7	74	8
5	Belo	76,58	7,67	85,67	6,33	311,7	5	81,42	5	139	6
6	Langgudu					10,83	2	52,75	8	16	3
7	Wawo	145,6	7,67	61,67	4,5	84,83	5	78,42	5	93	6
8	Sape	32,33	5,42	23,33	4,67	29,92	3	46,67	3	33	4
9	Lambu					10,67	1	45,67	4	14	1
10	Wera	74,83	4,58	25,83	2,73	32,5	2	38,25	3	43	3
11	Ambalawi					13,83	1	46,42	5	15	2
12	Donggo	81,83	12,8	22,75	10,08	40	9	54	6	50	9
13	Sanggar	72	7,42	70,75	2,5	133,8	5	98,83	5	94	5
14	Tambora					26,83	1	94,17	6	30	2
<b>Rata-rata Kab.</b>		<b>116,2</b>	<b>8,5</b>	<b>91,1</b>	<b>6,5</b>	<b>62,15</b>	<b>4</b>	<b>64,31</b>	<b>5</b>	<b>83</b>	<b>6</b>

Sumber Data: Bima Dalam Angka Tahun 2000-2003

### Erosi Tanah

Tingkat erosi tanah yang terjadi pada wilayah Kabupaten Bima relatif tertinggi dan luas. Hal ini terjadi di samping kondisi geografis yang memang merupakan daerah kering juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran kelestarian lingkungan dikalangan masyarakat setempat.

## Kondisi Fisik Binaan

### Luas Wilayah Dan Penggunaan Lahan

Luas Wilayah Kabupaten Bima 437.465 Ha dengan penggunaan lahan di rinci menurut lahan sawah seluas 27.939 Ha (6,387 %) dan lahan bukan sawah 409.526 Ha (93.613 %), dimana lahan sawah meliputi: sawah irigasi setengah teknis 14.161 Ha (3,237 %), Lahan sawah irigasi sederhana P.U seluas 1.671 Ha (0,382 %), Lahan sawah irigasi sederhana non P.U seluas 7.047 Ha (1,611 %), lahan sawah tadah hujan seluas 5.053 Ha (1,155 %) dan sawah pasang surut seluas 7 Ha (0,002 %). Sedang lahan bukan sawah meliputi: tanah bangunan dan pekarangan seluas 3.546 Ha (0,811%), tegal/kebun seluas 38.267 Ha (8,747%), Ladang/huma seluas 6.464 Ha (1,478 %), Padang/rumput gembalaan seluas 15.589 Ha (3,563 %), tanaman kayu-kayuan/hutan rakyat seluas 43.088 Ha (9,849 %), hutan negara seluas 247.985 Ha (62,952 %), tanah sementara tidak diusahakan seluas 23.033 Ha (5,265 %), perkebunan seluas 9.930 Ha (2,270 %), tambak seluas 2.169 Ha (0,496 %), kolam/tebat/empang seluas 6 Ha (0,001 %), rawa-rawa yang tidak ditanami seluas 287 Ha (0,066 %) dan lain-lain seluas 19.162 Ha (4,380 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada TABEL III.5.

**TABEL III.5**  
**PENGGUNAAN LAHAN DIRINCI MENURUT LAHAN SAWAH DAN LAHAN BUKAN SAWAH DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2003**

No	Jenis Penggunaan Lahan		Luas (Ha)	%
I	Lahan Sawah	a. sawah Irigasi Teknis	-	-
		b. Sawah Irigasi Setengah Teknis	14.161	3,237
		c. Sawah Irigasi Sederhana P.U	1.671	0,382
		d. Sawah Irigasi Sederhana Non P.U	7.047	1,611
		e. Sawah Tadah Hujan	5.053	1,155
		f. Sawah Pasang Surut	7	0,002
		<b>Luas Tanah Sawah</b>	<b>27.939</b>	<b>6,387</b>

Sumber Data: Bima Dalam Angka Tahun 2003

**TABEL III.5 Lanjutan**

No	Jenis Penggunaan Lahan		Luas (Ha)	%
II	Lahan Bukan	a. Tanah Bangunan dan Pekarangan	3.546	0,811
		b. Tegall/Kebun	38.267	8,747
		c. Ladang/Huma	6.464	1,478
		d. Padang/Rumput Pengembalaan	15.589	3,563
		e. Tanaman Kayu-Kayuan/Hutan Rakyat	43.088	9,849
		f. Hutan Negara	247.985	62,952
		g. Tanah Sementara Tidak Usahakan	23.033	5,265
		h. Perkebunan	9.930	2,270
		I. Tambak	2.169	0,496
		J. Kolam/Tebat/Empang	6	0,001
		k. Rawa-rawa yang tidak ditanami	287	0,066
		l. Lain-lain	19.162	4,380
		<b>Luas Bukan Sawah</b>		<b>409.526</b>
<b>Luas Total</b>			<b>437.465</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Bima Dalam Angka Tahun 2003

### Status Penguasaan Tanah

Untuk merencanakan pemanfaatan ruang serta program-program pembangunan dalam ruang tersebut, diperlukan informasi mengenai status penguasaan tanah. Status tanah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok penguasaan yaitu tanah milik, tanah negara dan tanah kehutanan (kawasan hutan).

Tanah milik adalah tanah yang telah dikuasai oleh perorangan baik tanah yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), hak pakai maupun hak pengelolaan.

Tanah Negara adalah tanah diluar kawasan hutan yang masih dikuasai oleh Negara, termasuk didalamnya HGU. Sedangkan tanah kehutanan adalah tanah yang berdasarkan TGHK termasuk dalam kawasan hutan yang mencakup hutan lindung. Hutan produksi terbatas (HPT), Hutan Produksi Biasa (HPB), cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata dan taman bunga. Dan status penguasaan

tanah di kabupaten Bima untuk tiap-tiap kecamatan secara rinci disajikan pada

TABEL III.6.

**TABEL III.6**  
**STATUS TANAH DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2003**

No	Kecamatan	Status Tanah (Ha)			Jumlah	
		Milik	Negara	Kehutanan	Ha	%
1	Belo	4.396	8.912	4.810	18.118	4
2	Bolo/Madapangga	10.402	168	19.881	30.451	7
3	Donggo	10.038	22.035	14.476	46.549	11
4	Monta	5.941	12.549	30.391	48.881	11
5	Sanggar/Tambora	2.795	5.383	102.393	110.571	25
6	Sape/Lambu	8.053	13.574	41.830	63.457	14
7	Wawo / Langgudu	6.175	10.313	29.091	45.579	10
8	Wera/Ambalawi	5.303	35.424	23.870	64.597	15
9	Woha	4.070	3.935	2.552	10.557	2
<b>Jumlah/Total</b>		57.173	112.293	269.294	438.760	
<b>%</b>		13	26	61	<b>437.465</b>	100

Sumber Data: RTRW Kabupaten Bima

### Sebaran dan luas lahan kritis, rawan bencana, kerusakan hutan

Lahan Kering di Kabupaten Bima seluas 409.526 Ha (93,6 %) dari luas wilayah seluruhnya sedangkan lahan sawahnya seluas 27.939 Ha (6,4 %) dari luas wilayah. Seperti pada TABEL III.7.

**TABEL III.7**  
**LAHAN SAWAH DAN LAHAN KERING**

No	Kecamatan	Jenis Lahan				Jumlah (Ha)
		Lahan sawah	%	Lahan Kering	%	
1	Monta	3790	8.4	41310	91.6	45100
2	Bolo	1993	19.7	8148	80.3	10141
3	Mada Pangga	3751	19.8	15158	80.2	18909
4	Woha	2642	35.1	4883	64.9	7525
5	Belo	3301	21.7	11929	78.3	15230
6	Langgudu	1308	4.6	27010	95.4	28318
7	Wawo	2351	10.4	20176	89.6	22527
8	Sape	1894	7.7	22559	92.3	24453

Sumber Data: Bima Dalam Angka, 2003

**TABEL III.7 Lanjutan**

No	Kecamatan	Jenis Lahan				Jumlah (Ha)
		Lahan sawah	%	Lahan Kering	%	
9	Lambu	1963	5.2	35449	94.8	37412
10	Wera	1346	3.4	37854	96.6	39200
11	Ambalawi	557	2.2	24993	97.8	25550
12	Donggo	1686	4.2	38914	95.8	40600
13	Sanggar	1111	1.5	70889	98.5	72000
14	Tambora	246	0.5	50254	99.5	50500
<b>Jumlah Total</b>		<b>27.939</b>	<b>6.4</b>	<b>409.526</b>	<b>93.6</b>	<b>437.465</b>

Sumber Data: Bima Dalam Angka, 2003

## **Sarana dan Prasarana**

### **Transportasi**

#### **Transportasi Darat.**

Jaringan jalan merupakan prasarana utama untuk melayani kebutuhan pergerakan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, harus didukung oleh kualitas jaringan dan kapasitas yang mencukupi kebutuhan.

Jaringan jalan berdasarkan kewenangan pengelolaannya yaitu Jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Panjang jalan negara baik untuk tahun 2002-2003 adalah 102,53 km dengan konstruksi seluruhnya aspal. Panjang jalan propinsi Untuk tahun 2002 adalah 458,56 km dengan konstruksi aspal 297,86 km, kerikil 63,22 km, tanah 48,83 km dan lain-lain/ tidak dirinci 48,65 km, sedangkan untuk tahun 2003 penurunan menjadi 397,33 km dengan konstruksi aspal 309,3 km, kerikil 59,73 km dan tanah 28,3 km. Dan untuk jalan kabupaten pada tahun 2002 sepanjang 822,67 km dengan konstruksi aspal 249,65 km, kerikil 98,55 km, dan jalan tanah 474,47 km, Sedangkan untuk tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 838,02 km dengan konstruksi aspal 306,22 km, kerikil 141,9



km, jalan tanah 375,9 km dan lain-lain atau jenis permukaan jalan yang tidak di rinci 14 km.

Berkaitan dengan kondisi jalan baik jalan Negara, propinsi dan jalan kabupaten dominan dalam kondisi baik. Untuk lebih jelas mengenai panjang jalan dan kondisinya dapat dilihat pada TABEL III.8.

**TABEL III.8**  
**PANJANG JALAN MENURUT KEADAAN STATUS JALAN (KM)**  
**DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2003**

Keadaan		Status Jalan					
		Jalan Negara		Jalan Propinsi		Jalan Kabupaten	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003
I	Jenis Permukaan						
	Aspal	102.53	102.53	297.86	309.3	249.65	306.22
	Kerikil	-		63.22	59.73	98.55	141.9
	Tanah	-		48.83	28.3	474.47	375.9
	Tidak Dirinci	-		48.65	-	-	14
	<b>Jumlah Total</b>	<b>102.53</b>	<b>102.53</b>	<b>458.56</b>	<b>397.33</b>	<b>822.67</b>	<b>838.02</b>
II	Kondisi Jalan						
	Baik	47.32	68.53	174.74	204.72	14.4	116.52
	Sedang	18.7	11	68	84.06	32.55	113.05
	Rusak	36.51	20.5	127.05	108.55	211.6	37.7
	Rusak Berat	-	2.5	88.77	-	564.12	570.75
	<b>Jumlah Total</b>	<b>102.53</b>	<b>102.53</b>	<b>458.56</b>	<b>397.33</b>	<b>822.67</b>	<b>838.02</b>
III	Kelas Jalan						
	Kelas I	-	-	-	-	-	-
	Kelas II	-	-	174.59	204.72	-	-
	Kelas III	-	-	-	-	-	-
	Kelas IIIA	102.53	102.53	234.57	148.91	-	-
	Kelas IIIB	-	-	-	-	822.67	838.02
	Kelas IIIC	-	-	-	-	-	-
	Tidak Dirinci	-	-	49.4	43.7	-	-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>102.53</b>	<b>102.53</b>	<b>458.56</b>	<b>397.33</b>	<b>822.67</b>	<b>838.02</b>

Sumber Data: Bima Dalam Angka, 2003

### Transportasi Udara

Di wilayah perencanaan terdapat satu Bandar Udara yang terletak di wilayah Desa Belo Kecamatan Belo, Bandar Udara Muhammad Salahuddin

melayani jalur penerbangan ke barat (Mataram-Denpasar-Surabaya-Jakarta) dan penerbangan ke timur (Ende, Kupang, Labuhan Bajo, Tambulaka dan Waingapu). Perusahaan penerbangan yang melintasi jalur tersebut adalah PT. Merpati Air Lines dan PT. Pelita Air Services. Kedatangan Pesawat pada Bandara Salahudin tergantung dari besarnya penumpang yang datang dan berangkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada TABEL III.9.

**TABEL III.9**  
**DATA ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA**  
**PENERBANGAN DOMESTIK TAHUN 2000-2003**

No.	Tahun	Pesawat		Penumpang	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
1.	2000	633	633	6.834	7.837
2.	2001	734	734	7.771	7.555
3.	2002	642	697	6.152	7.411
5.	2003	898	898	12.307	12.068

*Sumber: Bima Dalam Angka Tahun 2003*

### **Transportasi Laut**

Pelabuhan laut yang berperan di Kabupaten Bima adalah pelabuhan penyebrangan (pelabuhan ferry) di Kecamatan Sape. Sarana ini untuk memperlancar arus penumpang, barang dan jasa lewat jalur lintas penyebrangan : Sape - Pulau komodo dan Labuan Bajo di flores. Selain dimanfaatkan untuk umum, lintasan ini juga untuk keperluan khusus yaitu memperlancar arus wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo dan tempat-tempat lain di Nusa Tenggara Timur, demikian pula sebaliknya dari Nusa Tenggara Timur ke Bali, Jawa dan lain-lain. Arus bongkar muat penumpang antar pulau di Pelabuhan Sape dapat dilihat pada TABEL III.10.

**TABEL III.10**  
**BONGKAR MUAT BARANG ANTAR PULAU MELALUI**  
**PELABUHAN SAPE DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2000-2003**

Tahun	Barang/Kayu		Hewan		Penumpang	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Debarkasi	Embarkasi
2000	3.833	-	-	9.191	13.106	17.885
2001	2.943	-	75	8.374	27.650	22.202
2002	82.880	1.781	-	5.852	25.851	18.802
2003	352	208	-	-	1.205	1.064

*Sumber Data: Bima Dalam Angka Tahun 2003*

### Utilitas.

#### Jaringan listrik

Fasilitas listrik di Kabupaten Bima sudah dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat, terutama didaerah ibukota kecamatan, serta sebagian daerah pedesaan melalui program listrik masuk desa.

Sumber tenaga listrik yang dikelola oleh perusahaan listrik Negara (PLN) Wilayah XI cabang Bima sebagian besar menggunakan menggunakan tenaga listrik yang dibangkitkan oleh Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tersebar di beberapa kecamatan. Sedangkan Kecamatan Sanggar meskipun memiliki pembangkit tenaga listrik berupa diesel sendiri namun pengawasan dan laporannya masuk wilayah operasi PLN Cabang Dompus. Untuk lebih jelasnya energi listrik dapat dilihat pada TABEL III.11.

**TABEL III.11**  
**KEADAAN PLN WILAYAH XI CABANG BIMA**  
**DI MASING-MASING KECAMATAN TAHUN 2002**

URAIAN	PLTD Unit Kecamatan											Jumlah
	Monta	Bolo	Woha	Langgudu	Wawo	Sape	Lambu	Ambalawi	Wera	Donggo	Sanggar	
Produksi Energi Listrik(KWh)	247,713	-	-	-	-	1,760,756	15,471	574,561	787,141	101,190	500,820	3,987,652
Energi Listrik Dipakai Untuk Pembangkit(KWh)	-	-	-	-	-	43,642	-	-	-	-	-	43,642
Energi Listrik Disalurkan(KWh)	247,713	-	-	-	-	1,717,114	15,471	574,561	787,141	101,190	500,820	3,944,010
Energi Listrik Dipakai Untuk Konsumen(KWh Jual)	1,391,589	4,040,262	4,822,439	816,273	757,407	3,674,746	14,662	391,801	736,423	536,021	585,495	17,767,118
Jumlah Pelanggan Listrik (KK)	2,915	7,335	88,881	1,506	2,021	7,086	114	1,241	2,646	1,378	1,245	116,368
Jumlah Daya Tersambung (VA)	1,526,200	3,816,518	4,998,380	879,450	1,017,950	3,850,540	59,750	645,300	1,334,900	793,000	639,350	19,561,338
Panjang JTM (Meter)	38,991	52,416	57,640	21,150	45,052	54,935	-	23,845	16	36,425	23	330,493
Panjang JTR (Kms)	24,877	37,156	52,421	22,530	14,268	42,745	1	16,272	25	24,662	13,592	248,549
Jumlah Gardu (Bh)	18	22	30	10	12	25	-	9	8	17	7	158
KVA Gardu	850	1,425	2,160	635	720	1,514	-	710	450	825	450	9,739
Jumlah Mesin	6	-	-	-	-	8	2	2	7	5	5	35

Sumber: Bima Dalam Angka, 2003

### Telekomunikasi

Sarana komunikasi di Kabupaten Bima ada 9 kantor pos pembantu yang tersebar pada 9 kecamatan. Sedangkan jumlah kapasitas telepon terpasang hingga bulan Agustus tahun 2004 telah mencapai 1.369 Satuan Sambungan Telepon (SST). Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran lokasi Kantor Pos Pembantu per kecamatan dapat dilihat pada TABEL III.12.

**TABEL III.12**  
**JUMLAH DAN SEBARAN KANTOR POS PEMBANTU**  
**DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2003**

No	Lokasi		Jumlah
	Desa	Kecamatan	
1	Tangga	Monta	1
2	Rato	Bolo	1
3	-	Madapangga	-
4	Tente	Woha	1
5	Belo	Belo	1
6	-	Langgudu	-
7	Maria	Wawo	1
8	Naru	Sape	1
9	-	Lambu	-
10	Nipa	Wera	1
11	-	Ambalawi	-
12	Bajo	Donggo	1
13	Kore	Sanggar	1
14	-	Tambora	-
<b>Jumlah Total</b>			<b>9</b>

*Sumber Data: Bima Dalam Angka, 2003*

### **Potensi Sumber Daya Alam**

#### **Pertanian**

#### **Sub Sektor Tanaman Pangan**

Tanaman pertanian tanaman pangan di kabupaten Bima terdiri dari padi sawah dan ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang ijo, kacang

kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe, terong, tomat, ketimun, kacang panjang dan kubis dengan perkembangan produksi seperti pada TABEL III.13 di bawah ini:

**TABEL III.13**  
**PERKEMBANGAN LUAS PANEN DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN**  
**DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2002- 2003**

No.	Pertanian	Tahun 2002			Tahun 2003		
		Luas Panen (Ha)	Prod (Ton)	Rata Rata Prod	Luas Panen (Ha)	Prod (Ton)	Rata Rata Prod
1	Padi sawah ladang	45924	190188	4.14	48756	204773	4.2
2	Jagung	6613	13988	2.12	4455	4455	1.00
3	Ubi kayu	1986	22361	11.26	2023	22729	11.24
4	Ubi Jalar	332	3670	11.05	522	5834	11.18
5	Kacang Tanah	7307	13166	1.80	10956	10956	1.00
6	Kacang Ijo	2257	1128	0.50	821	647	0.79
7	Kacang Kedelai	19460	19269	0.99	21039	24940	1.19
8	Bawang Merah	6472	66076	10.21	6467	61824.14	9.56
9	Bawang Putih	87	550	6.32	145	1276	8.80
10	Cabe	122	935	7.66	195	1399.39	7.18
11	Terong	38	303	7.97	42	341.32	8.13
12	Tomat	87	774	8.90	88	782.7	8.89
13	Ketimun	54	429	7.94	72	579.89	8.05
14	Kacang Panjang	141	778	5.52	112	630.34	5.63
15	Bayam	33	517	15.67	31	504.76	16.28
16	Kangkung	28	189	6.75	30	218.01	7.27
17	Kubis	155	2190	14.13	136	2226.32	16.37
<b>TOTAL</b>		<b>91096</b>	<b>336511</b>	<b>3.69</b>	<b>95890</b>	<b>344117</b>	<b>3.59</b>

Sumber: Bima Dalam Angka 2003

### **Sub Sektor Kehutanan**

Pada sub sektor Kehutanan tanaman yang potensial untuk dibudidayakan antara lain Jati. Sebagai gambaran potensi lahan kering yang potensial untuk ditanami Jati adalah 641.777 Ha. Komoditi yang potensial lainnya adalah Vanili, Murbei dan Ulat Sutra.

### **Sub Sektor Perkebunan**

Perkebunan yang terdapat di Kabupaten Bima terdiri dari 14 komoditi dengan luas panen terbesar adalah komoditas kelapa yaitu sebesar 5104,89 Ha dan

yang terkecil adalah Vanili dengan luas panen 1,75 Ha. Komoditi yang mempunyai produksi terbesar adalah asam dengan jumlah produksi 2033.54 Ton seperti terlihat pada TABEL III.14 dibawah ini:

**TABEL III.14**  
**JENIS KOMODITI PERKEBUNAN DI KABUPATEN BIMA**  
**TAHUN 2002- 2003**

No	Komoditi	Tahun 2002			Tahun 2003		
		Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Rata Rata	Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Rata Rata
1	Kelapa	3231.75	1670.83	0.52	3280	1388.71	0.42
2	Kapas	50.75	6.5	0.13	122.85	18.7	0.15
3	Tembakau	59.25	44.75	0.76	53.75	41	0.76
4	Kopi	953.25	211	0.22	944	766.45	0.81
5	Kapuk	350.25	174.75	0.50	350.25	89.15	0.25
6	Kakao	40.5	1.5	0.04	21.5	1.28	0.06
7	Asam	916.65	1307.82	1.43	916.65	1556.65	1.70
8	Cengkeh	5	0.5	0.10	5	2	0.40
9	Tebu	53.5	34.59	0.65	42.25	27.21	0.64
10	Jambu Mete	4719.29	306.82	0.07	5596.5	452.83	0.08
11	Pinang	160.5	19.85	0.12	160.5	27.1	0.17
12	Jarak	851	485.45	0.57	614.85	345.6	0.56
13	Vanili	0	0	0	1.35	0	0
14	Kemiri	1482	1868	1.26	1482	1305.45	0.88
	<b>TOTAL</b>	<b>12874</b>	<b>6132.36</b>	<b>0.48</b>	<b>13591</b>	<b>6022.13</b>	<b>0.44</b>

Sumber: Bima Dalam Angka 2003

### **Sub Sektor Peternakan**

Peternakan ternak besar yang ada di Kabupaten Bima meliputi Sapi, Kerbau dan Kuda dengan rata- rata produksi seperti terlihat pada TABEL III.15 dibawah ini:

**TABEL III.15**  
**PERKEMBANGAN TERNAK BESAR DI KABUPATEN BIMA**  
**TAHUN 2000- 2003**

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (ekor)			
		2000	2001	2002	2003
1	Sapi	53473	55555	55932	55822
2	Kerbau	28414	29363	28687	29079
3	Kuda	9209	8731	8767	8481
	<b>TOTAL</b>	<b>91096</b>	<b>93649</b>	<b>93386</b>	<b>93382</b>

Sumber: Bima Dalam Angka 2003

### **Sub Sektor Perikanan**

Perikanan dan kelautan di Kabupaten Bima merupakan salah satu komoditas andalan. Potensi perikanan yang ada berupa udang, rumput laut, serta mutiara seperti terlihat pada TABEL III.16 dibawah ini:

**TABEL III.16**  
**POTENSI PRODUKSI PERIKANAN DIRINCI MENURUT JENIS**  
**TAHUN 2002- 2003**

No	Kecamatan	Tahun 2002			Tahun 2003		
		Perikanan Laut	Rumput Laut	Tambak	Perikanan Laut	Rumput Laut	Tambak
1	Monta		528	2394		1.135	269
2	Bolo			1047			21
3	Madapangga						
4	Woha			983			1026
5	Belo			306			220
6	Langgudu	390	1285	899	1958	528	930
7	Wawo						
8	Sape	1987.8	2442	190	1696	2077	132
9	Lambu	6930		65	3742		21
10	Wera			615			615
11	Ambalawi		607			607	
12	Donggo			48			40
13	Sanggar	951.9	364	132	695	364	110
14	Tambora						
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.260</b>	<b>5.226</b>	<b>6.679</b>	<b>8.091</b>	<b>4.711</b>	<b>3.384</b>

Sumber: Bima Dalam Angka 2003

### **Sektor Industri**

Salah satu peluang investasi dibidang industri adalah industri garam rkyat oleh karena didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Adanya iklim geografis yang cocok (curah hujan rendah).
- Ladang garam yang ada cukup potensial.



### Sektor Pariwisata

KAPET Bima (Kabupaten Bima) memiliki potensi wisata yang beragam yang sangat dominan adalah wisata pantai yaitu Pantai Rontu yang ombaknya dapat digunakan untuk berselancar. Selain itu terdapat juga wisata alam Tambora.

### Sektor Pertambangan dan Energi

Potensi pertambangan yang ada di kabuapten Bima berupa bahan galian B dan Galian C berupa : Emas, Mangan, Pasir Besi, Batu Gamping, batu Apung, gipsum Silikon, Lempung Kaolin dan Sirtu seperti pada TABEL III.17 di bawah ini.

**TABEL III.17**  
**POTENSI TAMBANG**

No	Lokasi		Mutu dan Jumlah Sumberdaya	Keterdapatan dan Keterjadian
	Administrasi	Geografi		
1	G. Dorolopi, Desa Sumi, Kec. Sape	119 <sup>00</sup> '31" BT – 08 <sup>37</sup> '17" LS	Berwarna abu-abu gelap, berfosil dan keras, kristalin, masif, mengandung urat-urat kalsit, kuat tekan 839 kg/cm <sup>2</sup> , ketahanan aus 0,082 mm/menit, penyerapan 0,36%, BJ 2,69, kekekalan bentuk baik.  Komposisi: - CaO 54,10% - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0,45% - Fe) 0,26% - MgO 0,33% - Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0,10% - SiO <sub>3</sub> 1,89%  Mutu baik untuk marmer lantai maupun batu tempel/hias dan bahan bangunan  Jumlah sumberdaya tertunjuk: 7.578.125 m <sup>3</sup>	Berupa batu gamping terumbu kristalin/marmeran yang tersebar pada perbukitanberelief kasar yangjarang.  Luas sebaran + 75,8 ha.

Sumber: RTRW Kab. Bima, 2004

TABEL III.17 Lanjutan

No	Lokasi	Mutu dan Jumlah Sumberdaya	Ketersediaan dan Keterjadian
2	Desa Ncera, Kec. Belo. Terletak di sisi jalan Ncera – Kumbe (± 10,5 tenggaran Tente)	118 <sup>0</sup> 45'23" BT – 08 <sup>0</sup> 38'55" LS  Dapat digunakan untuk batu hias, batu tempel, dan bahan bangunan.  Blok Ncera  Jumlah sumberdaya: - Tereka : 52.875.000 m <sup>3</sup> - Tertunjuk : 637.500 m <sup>3</sup>	Tersebar pada perbukitan berelief kasar, 25-45%, 200-300 m dpl. Berupa batu gamping marmeran dan berselingan dengan metasedimen dan lava andesit.  Luas sebaran: 42,5 ha  Luas sebaran: 105,75 ha
3	Doro Ngara dan doro Daluwaru, Dusun Pela, Desa Simpasai, Kec. Monta (37 km dari Bima, di sisi jalur Jalan Tente - Paradewina	118 <sup>0</sup> 38'05" BT – 08 <sup>0</sup> 42'15" LS  Komposisi: - CaO 53,85% - MgO 0,56% - Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0,22%  Mutu baik untuk marmer lantai maupun batu tempel/hias  Jumlah sumberdaya: - Tereka : 3.420.000.000 m <sup>3</sup> - Tertunjuk : 20.800.000 m <sup>3</sup>  <b>Blok Doro Daluwaru</b>  Jumlah sumberdaya hipotek: ± 10.500.000 m <sup>3</sup>  Jumlah sumberdaya: - Hipotek : ± 6.000.000 m <sup>3</sup> - Terukur : 4.705.920 m <sup>3</sup>	Berwarna abu-abu putih s/d abu-abu kehitaman, kristalin, berbutir halus s/d sedang, keras dan kompak. Kuat tekan 742 - 977 kg/cm <sup>2</sup> , ketahanan aus 0,075 mm/menit, kekekalan bentuk baik. Secara mikroskopis terdiri dari mineral kalsit, granular, hubungan antar butir rapat, berbutir halus – sedang, urat-urat halus.  Berupa batu gamping terumbu kristalin/marmeran yang tersebar pada perbukitan berelief kasar yang jarang.  Luas sebaran + 75,8 ha.  Luas sebaran 68,40 ha  Luas sebaran 40 ha  Luas sebaran 68,4 ha

Sumber: RTRW Kab. Bima, 2004

TABEL III.17 Lanjutan

No	Lokasi		Mutu dan Jumlah Sumberdaya	Ketersediaan dan Keterjadian
4	Desa Kumbe, 12 km dari Bima ke arah timur (pinggir jalan Raba – Sape)	118 <sup>0</sup> 45'00" BT – 08 <sup>0</sup> 30'00" LS	Berwarna abu-abu putih s/d abu-abu gelap dan pink, sebagian masif, tekstur semikristalin, berbutir halus s/d sedang, keras dan kompak.  Dapat digunakan untuk batu tempel dan batu hias, bahan mentah industri semen, karbit, tambahan dalam peleburan biji dan logam, pemutih dan soda abu.  Jumlah sumberdaya tereka: 95.000.000 m <sup>3</sup>  Blok Kumbe:  Jumlah sumberdaya tereka: 999.500 m <sup>3</sup>	Tersebar pada perbukitan berelief kasar 20-35%, 400-500 m dpl, merupakan batu gamping marmeran, berlapis 1 – 1,5 m, N2400E/18.  Ketebalan 30-40 m menumpang pada breksi lava. Luas sebaran 950 m.  Luas sebaran + 20 ha.
5	Doro Kabuju, Desa Kaleo, 2,6 km ke arah barat dari Sape	118 <sup>0</sup> 44'00" BT – 08 <sup>0</sup> 35'08" LS	Berwarna abu-abu putih s/d abu-abu gelap, tekstur kristalin, halus s/d sedang, keras dan kompak, kuat tekan 677.196 kg/cm <sup>2</sup> .  Kurang baik untuk marmer lantai, baik untuk batuhias dan batu tempel.  Jumlah sumberdaya tereka: 95.000.000 m <sup>3</sup>  Blok Kumbe:  Jumlah sumberdaya tertunjuk: 19.235.000 m <sup>3</sup>	Berupa batu gamping terumbu, bersifat marmeran, tersebar pada perbukitan berelief kasar, 15-35%, ketinggian kurang dari 250 m dpl.  Luas sebaran 192,35 ha. Tebal endapan 10 m.
6	Desa Ambarata, Desa Kowo, Kec. Sape (4,5 km dari kota Kec. Sape ke arah timur laut)	119 <sup>0</sup> 00'16" BT – 08 <sup>0</sup> 33'47" LS	Berwarna abu-abu muda s/d abu-abu tua, tekstur kristalin, keras, berbutir kasar, kuat tekan 756.836 kg/cm <sup>2</sup> .  Dapat digunakan sebagai batu hias (ornamen).  Jumlah sumberdaya tertunjuk: 1.496.000 m <sup>3</sup>	Berupa batu gamping yang tersingkap pada lereng jala.  Tebal endapan ± 5 m Luas sebaran 29,92 ha
7	Doro Mpuri, Dusun Mpuri, Kec. Bolo	119 <sup>0</sup> 32'58" BT – 08 <sup>0</sup> 33'14" LS	Batu gamping marmeran berwarna abu-abu terang hingga gelap berkekar dan banyak urat-urat kalsit.  Cukup baik untuk bahan bangunan atau ornamen.  Jumlah sumberdaya hipotek: 1.000.000 m <sup>3</sup>	Tersebar pada perbukitan yang tingginya ± 60 m dpl.  Luas sebaran ± 20 ha.

Sumber: RTRW Kab. Bima, 2004

## Ekonomi

### Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Bima digambarkan dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Seperti terlihat pada TABEL III.18 berikut ini:

**TABEL III.18**  
**PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000 – 2002**

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2000	2001	2002
1	Pertanian	218.043,42	227.041,86	203.652,49
2	Pertambangan dan penggalian	12.966,72	13.971,04	14.319,76
3	Industri Pengolahan	22.715,94	23.763,15	18.058,89
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.378,48	2.545,72	1.300,30
5	Bangunan	34.517,82	36.202,29	29.228,14
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	85.291,12	89.161,46	69.508,87
7	Pengangkutan dan Komunikasi	55.331,46	58.532,87	39.619,74
8	Keuangan dan Persewaan Jasa Perusahaan	7.015,86	8.016,15	5.769,11
9	Jasa- Jasa	85.251,82	82.668,62	50.078,74
	<b>TOTAL</b>	<b>519.512,64</b>	<b>541.903,16</b>	<b>431.536,04</b>

Sumber: Bima Dalam Angka 2003

### Penanaman Modal Dalam Negeri

Berdasarkan data terakhir yang didapatkan dari Badan Penanaman Modal Daerah didapatkan investasi yang masuk ke dala Wilayah Kabupaten Bima seperti terlihat pada TABEL III.19 dibawah ini:

**TABEL III.19**  
**JUMLAH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**  
**DI KABUPATEN BIMA SAMPAI DENGAN TAHUN 2004**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas ( Ha )	Ijin		Investasi
				Peruntukan	Tahun	
1	PT. Bima Budidaya Mutiara	Kec. Sanggar	1.175	Budidaya Mutiara	1977	200 Juta-
2	PT. Bima Sakti Mutiara	Kec. Lambu	11	Budidaya Mutiara	1978	1 Milyar-
3	PT. Trisula Marmer	Kec. Monta	500	Marmer	1982	200 juta-

Sumber: Badan Penanaman Modal Kab. Bima, 2004

**TABEL III.19 Lanjutan**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas ( Ha )	Ijin		Investasi
				Peruntukan	Tahun	
4	PT. Tirta Mas Mutiara	Kec. Langgudu	10	Budidaya Mutiara	1983	470 juta-
5	PT Anugerah	Kota Bima	3.715	Pengembang	1997	500 Juta
6	PT. Gindi Utama Permai	Kota . Bima	10	Pengembang	1998	200 Juta
7	PT. PG Budiono Madura	Kota Bima	7.82	Garam	2000	500 Juta
8	PT. Budidaya Mutiara	Kab. Bima	3,42	Budidaya Mutiara	2001	500 Juta
9	PT. Mariza Mutiara	Kab. Bima	-	Budidaya Mutiara	2003	500 Juta

Sumber: Badan Penanaman Modal Kab. Bima, 2004

Investasi yang ada tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bima terdapat 6 investasi di Kabupaten Bima dan 3 investasi di Kota Bima.

Untuk lebih jelasnya lokasi dari masing masing investasi yang masuk dapat dilihat seperti pada peta berikut ini:



## **Rangkuman**

### **Potensi dan Permasalahan Kapet Bima**

#### **Potensi Kapet Bima**

a. Pertanian

Dalam sektor pertanian komoditas yang diunggulkan adalah bawang merah sedangkan dari sektor perkebunan komoditas yang dapat diunggulkan antara lain adalah Kopi dengan luas lahan sebesar 8.771 ha baru dimanfaatkan sebesar 7.142 ha dan Jambu Mete dengan lahan seluas 14.375 ha yang telah dimanfaatkan sebesar 6.004 ha.

b. Pertambangan

Potensi Komoditas yang cukup menonjol dari sektor pertambangan di Kabupaten Bima adalah Marmer. Potensi marmer di Kabupaten Bima ini cukup murah dan mudah untuk dikembangkan. Ada tujuh lokasi bahan galian marmer yang cukup potensial untuk dikembangkan dan ada yang sudah operasional dengan lokasi strategis dari jalur transportasi.

c. Perindustrian

Terdapat potensi untuk mendirikan industri garam rakyat, mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bima adalah wilayah pesisir pantai.

d. Perikanan

Wilayah kabupaten Bima sebagian besar adalah perairan karena itu potensi perikanan di Kabupaten Bima sangat besar antara lain adalah Mutiara, Rumput laut, Udang Windu dan Ikan Tuna.

e. Pariwisata

Di Kabupaten Bima terdapat beberapa wisata pantai yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain Pantai Rontu yang ombaknya dapat dipakai untuk berselancar.

**Permasalahan Kapet Bima**

1. Tingkat pendidikan SDM terbatas.
2. Minat Investor rendah, terbatas disektor peternakan dan budidaya mutiara.
3. Keterbatasan prasarana (air, listrik, sumber daya buatan, jalan).
4. Difersifikasi usaha umumnya sangat kecil dan kondisi iklim yang tidak mendukung (curah hujan, erosi tanah) sehingga mengakibatkan posisi tawar terhadap komoditi yang dihasilkan menjadi lemah.

**Peluang Kapet Bima**

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pembangunan wilayah Kapet diantaranya adalah:

Posisi geografis dalam wilayah indonesia maupun didalam wilayah Asia Pasifik serta antar wilayah Asia (terutama Asia Timur dan Tenggara) Hal ini disebabkan sebagian besar kawasan KTI adalah merupakan wilayah kelautan yang menghubungkan antara KBI dengan wilayah Pasifik serta wilayah Asia lainnya. Sehingga berpeluang untuk menarik kegiatan untuk berlokasi di KTI. Hubungan



perdagangan antara Australia dan Selandia Baru dengan negara-negara Asia Timur khususnya Jepang selalu memanfaatkan perairan KTI.

Peluang bagi pengembangan Kapet Bima antara lain dengan adanya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang Kapet antara lain:

6. Keputusan Presiden No. 150 tahun 2000 tentang Kapet.
7. PP Nomor 47 tahun 1997 tentang perlakuan perpajakan di Kapet.
8. PP Nomor 20 tahun 2000 tentang Perpajakan Kapet.
9. PP Nomor 147 tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kapet.

### **Variabel Penelitian**

Dari hasil kajian yang telah dilakukan didapatkan beberapa Variabel Penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini antara lain: Indikator Kinerja, Kriteria Indikator Kinerja, Indeks Ketimpangan antar Kabupaten, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja, Faktor Internal dan Eksternal serta Manfaat dan Beban Pembinaan dan Pengelolaan Kapet. Seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini:

**TABEL III.20**  
**VARIABEL PENELITIAN**

NO	VARIABEL	PARAMETER
1	<b>INDIKATOR KINERJA KAPET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendapatan (pendapatan perkapita)</li> <li>• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</li> <li>• Perdagangan</li> <li>• Investasi</li> <li>• Ekspor</li> <li>• Pendidikan : tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan.</li> <li>• Kesehatan : rata-rata hari sakit, fasilitas kesehatan</li> <li>• Perumahan : sumber air bersih, listrik, sanitasi, dan mutu rumah tinggal</li> <li>• Angkatan kerja : partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, status pekerjaan</li> <li>• Keluarga berencana dan fertilitas : penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, penggunaan alat kontrasepsi</li> <li>• Kriminalitas : jumlah pencurian pertahun, jumlah pembunuhan pertahun, jumlah perkosaan pertahun</li> <li>• Perjalanan wisata : frekuensi perjalanan wisata pertahun</li> <li>• Akses ke media masa : jumlah surat kabar, jumlah radio, jumlah televisi</li> <li>• Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>• Konsumsi protein hewani perkapita</li> <li>• Jumlah penduduk di kota- kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih</li> <li>• Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi</li> <li>• Persentase PDRB yang berasal dari industri pengolahan</li> <li>• Konsumsi energi perkapita</li> <li>• Konsumsi listrik perkapita</li> <li>• Konsumsi baja perkapita</li> </ul>
2	<b>KRITERIA INDIKATOR KINERJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bermakna (Meaningful), secara signifikan dan langsung berkaitan dengan misi, sasaran dan tujuan.</li> <li>• Sahih (Valid) mewakili apa yang sedang diukur</li> <li>• Dapat dipercaya (credible) berdasarkan pada data yang akurat dan dapat dipercaya.</li> <li>• Dapat diperbandingkan (comparable) berguna untuk perbandingan dengan data lain sepanjang waktu.</li> <li>• Mudah (simple) mudah menghitung dan menginterpretasikan.</li> <li>• Berguna (Useful) secara akurat mencakup kemajuan sepanjang waktu.</li> </ul>

Sumber: Peneliti, 2005

TABEL III.20 Lanjutan

NO	VARIABEL	PARAMETER
3	<b>INDEKS KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN DALAM PROPINSI NTB</b>	<p>Indeks Williamson dan Indeks Entrophy Theil dengan rumus sebagai berikut :</p> $IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$ <p>Dimana :</p> <p><math>Y_i</math> = PDRB Perkapita di Kabupaten i  <math>Y</math> = PDRB Perkapita rata-rata Propinsi  <math>f_i</math> = Jumlah Penduduk di Kabupaten i  <math>n</math> = Jumlah Penduduk Propinsi  (Kuncoro, 2004)</p> <p>Dan Indeks Entropy Theil yaitu :</p> $I(y) = \sum (y/Y) \times \log \left( (y_j/Y) / (x_j/X) \right)^{-1}$ <p>Dimana :</p> <p><math>I(y)</math> = Indeks Entropi Theil  <math>y_i</math> = PDRB Perkapita Kabupaten j  <math>Y</math> = Rata-rata PDRB Perkapita Propinsi  <math>x_j</math> = Jumlah Penduduk Kabupaten j  <math>X</math> = Jumlah Penduduk Propinsi</p>
4	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri-industri yang terdapat dalam Kapet tidak cepat berkembang (bukan <i>Leading Industri</i>).</li> <li>▪ <i>Spread Effect</i> yang dihasilkan dan yang diharapkan mampu untuk mengembangkan daerah sekitarnya ternyata tidak pernah terwujud dan hanya sedikit sekali menyerap tenaga kerja.</li> <li>▪ Indutri-industri yang berada dalam pusat-pusat pertumbuhan itu tidak mempunyai <i>linkage</i> dengan sektor wilayah sekitarnya.</li> <li>▪ Terjadinya krisis multidimensi yang tidak memungkinkan tumbuhnya investasi baru di Indonesia.</li> <li>▪ Kemampuan masing-masing Kapet (sektor unggulan dan Sumber Daya sumber daya manusia berbeda-beda).</li> <li>▪ Lokasi yang ditetapkan sebagai Kapet kurang memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> <li>▪ Dukungan sektor dalam menyediakan intensif dalam menunjang terwujudnya pelayanan langsung belum optimal.</li> <li>▪ Pengaruh paradigma <i>Top Down</i> yang masih melekat pada konsep Kapet yang hingga kini diterapkan. Dominasi partisipasi dan kontribusi pusat, khususnya yang menyangkut aspek pendanaan proyek melalui APBN semakin menguatkan posisi tawar pusat dalam mengaplikasikan pandangan-pandangannya pada setiap kawasan Kapet.</li> </ul>

Sumber: Peneliti, 2005

TABEL III.20 Lanjutan

NO	VARIABEL	DATA
4	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi sebatas berkedudukan sebagai pengemban tugas dekonsentrasi dan bukannya representasi kabupaten/ Kota (Dekonsentralistik).</li> <li>▪ Kurangnya perlibatan dan partisipasi nyata Kabupaten/ Kota beserta segenap komponen pembangunannya.</li> <li>▪ Terjadinya tumpang tindih pengawasan yang cenderung inefektif dan inefisien</li> <li>▪ Proses regionalisasi yang desentralistik belum sungguh-sungguh diterapkan di Kapet.</li> <li>▪ Kurangnya atau tidak adanya keberpihakan (<i>affirmative actions</i>) dari pemerintah pusat bersama lembaga- lembaga dibawahnya (Departemen/ Instansi) dalam mendukung pengembangan Kapet.</li> <li>▪ Tidak konsistennya kebijakan mengenai pengembangan KAPET.</li> <li>▪ Tidak adanya koordinasi maupun dukungan dari departemen/ instansi terkait.</li> <li>▪ Terjadinya <i>missmatch</i> antara kriteria dan pelaksanaan seleksi kawasan.</li> <li>▪ Terciptanya kompetisi yang tidak sehat. Pemberian intensif investasi yang dimaksudkan untuk menarik investor dalam prakteknya lebih memperkeraskan pemberlakuan ketidakadilan antar wilayah yang berdekatan.</li> <li>▪ Pengembangan infrastruktur, SDM, Komoditi Unggulan dan kerjasama regional yang belum proposional.</li> <li>▪ Rendahnya akuntabilitas lembaga yang terlibat. BP Kapet dan personil yang bekerja didalamnya telah dibentuk namun sebagaian job deskripsinya masih sangat kabur.</li> <li>▪ Pemisahan kewenangan bidang- bidang yang menjadi urusan BP dan Pemda masih belum dilakukan secara jelas demikian juga dengan pemisahan urusan yang ditangani sektor atau instansi vertikal di daerah.</li> <li>▪ Masih dipegangnya beberapa bentuk ijin operasi oleh instansi sektor di pusat.</li> <li>▪ Masih perlu ditingkatkannya responsiveness BP Kapet maupun pemerintah yang berwenang dalam menghadapi berbagai keluhan investor secara kongkrit, seperti memberikan jaminan keamanan berusaha, memberikan informasi peluang bisnis yang obyektif dan memadai, memangkas jalur- jalur ilegal perijinan dan menciptakan perencanaan wilayah yang terintegrasi dan kondusif bagi berbagai kegiatan usaha.</li> <li>▪ Promosi investasi yang dilakukan masih sangat kurang sekali.</li> <li>▪ Tingkat pendidikan SDM terbatas.</li> <li>▪ Minat Investor rendah, terbatas disektor peternakan dan budidaya mutiara.</li> <li>▪ Difersifikasi usaha umumnya sangat kecil dan kondisi iklim (curah hujan dan tanah) sehingga mengakibatkan posisi tawar terhadap komoditi yang dihasilkan menjadi lemah karena tidak ada alternatif lain yang dapat ditawarkan untuk memenuhi adanya desakan kebutuhan hidup</li> </ul>

Sumber: Peneliti, 2005

**TABEL III.20 Lanjutan**

NO	VARIABEL	DATA
5	<b>FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL</b>	<p><b>FAKTOR INTERNAL KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian Dalam sektor pertanian komoditas yang diunggulkan adalah bawang merah sedangkan dari sektor perkebunan komoditas yang dapat diunggulkan antara lain adalah Kopi dengan luas lahan sebesar 8.771 ha baru dimanfaatkan sebesar 7.142 ha dan Jambu Mete dengan lahan seluas 14.375 ha yang telah dimanfaatkan sebesar 6.004 ha</li> <li>2. Pertambangan Potensi Komoditas yang cukup menonjol dari sektor pertambangan di Kabupaten Bima adalah Marmer. Potensi marmer di Kabupaten Bima ini cukup murah dan mudah untuk dikembangkan. Ada tujuh lokasi bahan galian marmer yang cukup potensial untuk dikembangkan dan ada yang sudah operasional dengan lokasi strategis dari jalur transportasi.</li> <li>3. Perindustrian Terdapat potensi untuk mendirikan industri garam rakyat, mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bima adalah wilayah pesisir pantai.</li> <li>4. Perikanan Wilayah kabupaten Bima sebagian besar adalah perairan karena itu potensi perikanan di Kabupaten Bima sangat besar antara lain adalah Mutiara, Rumput laut, Udang Windu dan Ikan Tuna</li> <li>5. Pariwisata Di Kabupaten Bima terdapat beberapa wisata pantai yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain Pantai Rontu yang ombaknya dapat dipakai untuk berselancar</li> </ol> <p><b>FAKTOR EKSTERNAL PELUANG</b></p> <p>Posisi geografis dalam wilayah indonesia maupun didalam wilayah Asia Pasifik serta antar wilayah Asia (terutama Asia Timur dan Tenggara). Sehingga berpeluang untuk menarik kegiatan untuk berlokasi di KTI. Hubungan perdagangan antara Australia dan Selandia Baru dengan negara-negara Asia Timur khususnya Jepang selalu memanfaatkan perairan KTI.</p> <p>Peluang bagi pengembangan Kapet Bima antara lain dengan adanya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang KAPET antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Presiden No. 150 tahun 2000 tentang Kapet</li> <li>• PP Nomor 47 tahun 1997 tentang perlakuan perpajakan di KAPET</li> <li>• PP Nomor 20 tahun 2000 tentang Perpajakan Kapet</li> <li>• PP Nomor 147 tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kapet</li> </ul>

Sumber: Peneliti, 2005

**TABEL III.20 Lanjutan**

NO	VARIABEL	DATA
6	<b>MANFAAT DAN BEBAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KAPET.</b>	<p><u>Manfaat Pembinaan dan Pengelolaan Kapet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pembangunan nasional</li> <li>• Keseimbangan dan pemerataan daerah</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan dan juga berlangsungnya dapat tetap dijaga.</li> <li>• Memperbaiki terselenggaranya efisiensi dan efektifitas pelayanan publik</li> <li>• Akuntabilitas yang meningkat</li> <li>• Eksperimentasi dan inovasi</li> <li>• Motivasi personil di daerah</li> <li>• Memperkuat partisipasi rakyat</li> <li>• Membantu Pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempermudah masuknya investasi</li> <li>• Profesionalisme</li> </ul> <p><u>Beban Pembinaan dan Pengelolaan Kapet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbesar perbedaan disparitas regional dalam menyediakan pelayanan publik</li> <li>• Beban penduduk lokal akan semakin berat (Kendala Pembiayaan)</li> <li>• Komplikasi dengan sentimen kedaerahan</li> <li>• Menjadi tantangan bagi mereka yang bertanggungjawab untuk mendesain, mengelola dan mengimplementasikan</li> <li>• Harus ada sebuah badan lokal yang secara konstitusional terpisah dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab pada pelayanan lokal secara signifikan</li> <li>• Pemerintah daerah harus memiliki kekayaan sendiri, anggaran dan rekening seiring dengan otoritas untuk meningkatkan pendapatannya</li> <li>• Harus mengembangkan kompetensi staf dengan menggaji, memecat dan mempromosikan mereka.</li> </ul>

Sumber: Peneliti, 2005

## **BAB IV**

### **ANALISIS KINERJA KAPET DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**

#### **Identifikasi Indikator Kinerja dengan Metode Skoring (Skala Likert)**

Berdasarkan rata-rata hasil penilaian nara sumber (*Lampiran B.3*) di dapatkan hasil indikator terpilih yang akan digunakan untuk mengukur kinerja Kapet di Kabupaten Bima dengan rata-rata nilai antara 48-60 adalah:

1. Pendapatan Perkapita
2. Produk Domestik Regional Bruto
3. Nilai Investasi
4. Ekspor
5. Indeks Pembangunan Manusia
6. Presentase PDRB dari Industri Pengolahan

#### **Penilaian Kinerja Kapet**

Penilaian kinerja peran Kapet dilakukan melalui 2 langkah, langkah pertama adalah Penilaian Kinerja dengan metode skoring berdasarkan indikator kinerja hasil penilaian narasumber

#### **Pengukuran Kinerja Kapet dengan Metode Skoring (Skala Thurstone/ Skala Statistik)**

Untuk melakukan pengukuran kinerja, terlebih dahulu harus dilakukan pengukuran tingkat pertumbuhan indikator kinerja untuk wilayah Kabupaten Bima dan Nasional dengan menggunakan rumus:

$$P_n = P_0(1+r)^n \dots\dots\dots(1)$$

Dimana

$P_n$  = Indikator Kinerja Tahun ke-n

$P_0$  = Indikator kinerja Tahun awal

$r$  = Tingkat pertumbuhan

$n$  = Tahun ke-n

Data yang digunakan harus diseragamkan tahunnya dalam hal ini data yang dipergunakan adalah data tahun 1996 sampai tahun 2003.

1. Indikator Kinerja dalam Wilayah Kabupaten Bima.
2. Indikator Kinerja dalam Wilayah Nasional.

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan (*Lampiran C.1*) didapatkan hasil sebagai berikut:

**TABEL IV.1**  
**INDIKATOR KINERJA KAPET PADA TAHUN 1996-2003**  
**PADA KABUPATEN BIMA**

Indikator	Tingkat Pertumbuhan		Skor
	Kabupaten Bima	Nasional	
Pendapatan Perkapita	0,0052	0,012088	0
PDRB Atas Harga Konstan 1993	0,0265	0,18226	0
Nilai Investasi	0,02051	0,0266	0
Ekspor	0	0,17	0
Indeks Pembangunan Manusia			
• Rata-rata Lama Sekolah	0,01550	0,007710	1
• Angka Harapan Hidup	0,00346	0,00410300	0
• Angka Melek Huruf	0,00396	0,00625	0
Presentase PDRB dari Industri Pengolahan	0,00338	0,01970	0
<b>T O T A L</b>			<b>1</b>

*Sumber: Hasil Analisa, 2005, Lampiran C.1*

Total Skor yang didapatkan adalah 1, hal ini menunjukkan bahwa nilai indikator kinerja Kapet di wilayah Kabupaten Bima sebanyak < 50 % berada dibawah rata-rata nasional (4) sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja peran Kapet di wilayah Kabupaten Bima pada tahun 1996-2003 adalah **TIDAK BERHASIL**



Bila dilihat dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Kapet *Bab III Sub Bab 3.2.5 Program dan Kegiatan Kapet* maka didapatkan *benefit* yang diharapkan terjadi, tetapi melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan di atas *benefit* yang diharapkan ternyata tidak terjadi.

### **Identifikasi Spread Effect di Kabupaten Bima**

Selain Pengukuran Kinerja dengan Metode Skoring, Kinerja Kapet Bima di Kabupaten Bima dapat juga diketahui dengan cara mengidentifikasi apakah *Spread Effect* yang diharapkan terjadi karena adanya Pusat Pertumbuhan baru terjadi di Kabupaten Bima Untuk mengidentifikasi terjadi atau tidak terjadinya *Spread Effect* di Kabupaten Bima sebagai akibat dari dibentuknya Kapet, dilakukan analisis mengenai ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Bima, digunakan alat analisis Indeks Williamson dan Indeks Ketimpangan Entropy Theil yaitu :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

- $Y_i$  = PDRB Perkapita di Kabupaten i
- $Y$  = PDRB Perkapita rata-rata Propinsi
- $f_i$  = Jumlah Penduduk di Kabupaten i
- $n$  = Jumlah Penduduk Propinsi

(Kuncoro, 2004)

Dan Indeks Entropy Theil yaitu :

$$I(y) = \sum (y_j/Y) x \text{ Log } \left\{ (y_j/Y) / (x_j/X) \right\} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

- $I(y)$  = Indeks Entropi Theil
- $y_i$  = PDRB Perkapita Kabupaten j
- $Y$  = Rata-rata PDRB Perkapita Propinsi
- $x_j$  = Jumlah Penduduk Kabupaten j
- $X$  = Jumlah Penduduk Propinsi

(Kuncoro, 2004)

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan indeks williamson dan indeks entropi theil (*Lampiran C.2*) masing-masing kabupaten selama kurun waktu 7 tahun yaitu dari tahun 1996-2002 sebagai berikut:

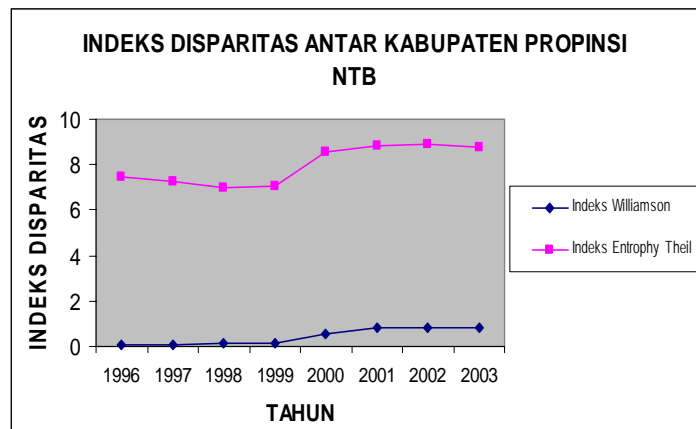
Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

**TABEL IV.2**  
**INDEKS DISPARITAS PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	TAHUN	INDEKS WILLIAMSON	INDEKS ENTROPHI THEIL
1	1996	0,064632066	7,447684769
2	1997	0,074006906	7,282843321
3	1998	0,105644931	6,968411764
4	1999	0,121973477	7,086683011
5	2000	0,578145819	8,568070045
6	2001	0,808013387	8,834283527
7	2002	0,848448704	8,901914321
8	2003	0,8091584	8,785320611

*Sumber: Hasil Analisa, 2006*

Indeks Disparitas antar kabupaten dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada Grafik Berikut ini :



*Sumber : Hasil Analisa, 2005*

**GAMBAR 4.1**  
**GRAFIK INDEKS DIPARITAS**  
**DALAM PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketimpangan yang terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Barat cenderung meningkat selama periode 1996-2003 hal ini terlihat dari kenaikan angka indeks williamson dan indeks entropi theil Propinsi Nusa Tenggara Barat dari 0,064632066 dan 7,447684769 pada tahun 1996 menjadi 0,848448704 dan 8,901914321 pada tahun 2002 walaupun mengalami penurunan pada tahun 2003 yaitu sebesar 0,8091 dan 8,785 namun secara keseluruhan selama kurun waktu 8 tahun sejak berdirinya Kapet tidak terjadi *Spread Effect (Trickle Down Effect)* seperti yang diharapkan, malah selama kurun waktu tersebut ketimpangan pendapatan antar kabupaten dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat cenderung semakin mebesar.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan dari 2 aspek penilaian Kinerja Kapet dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bima NTB dapat dinyatakan **TIDAK BERHASIL**

### **Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet**

#### **Analisis Kebijakan Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu**

Dasar utama pembentukan Kapet adalah adanya Dewan Pengembangan Kawasan Indonesia Timur yang pertama-tama dibentuk berdasarkan Kepres No.120 Tahun 1993 yang kemudian beberapa kali mengalami perubahan sampai pada Kepres No. 44 Tahun 2002 . Pada periode awal ini telah berhasil dirumuskan empat permasalahan pokok yang dihadapi KTI, oleh DP-KTI, yaitu:

- (1) Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

- (3) Pengembangan prasarana dan sarana pembangunan.
- (4) Pengembangan kelembagaan dan sistem informasi pembangunan.

Berdasarkan permasalahan pokok tersebut, telah dibuat pokok kebijakan pengembangan KTI, yaitu:

- (i) Pengembangan 13 Kapet di KTI.
- (ii) Pemberian insentif investasi.
- (iii) Pengembangan komoditas unggulan.
- (iv) Pengembangan kerjasama regional.

Selanjutnya dikeluarkan Kepres No.89 Tahun 1996 Dalam periode ini dilakukan kegiatan sebagai berikut: identifikasi dan penetapan insentif, penetapan Kapet di masing-masing propinsi, identifikasi komoditas unggulan, dan identifikasi kawasan tertentu yang potensial. Identifikasi dan penetapan pemberian insentif investasi dilakukan dengan alasan bahwa infrastruktur di KTI jauh tertinggal dengan yang ada di KBI. Penetapan satu Kapet di setiap propinsi di KTI diambil mengingat luasnya wilayah KTI dan keterbatasan sumber daya pembangunan. Kriteria yang dipakai dalam menentukan lokasi Kapet ini adalah:

- (1) Mempunyai potensi untuk cepat tumbuh, dan atau
- (2) Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, dan atau
- (3) Memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya.

Kapet yang terpilih tersebut diambil dari kawasan andalan yang tercantum pada RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). *Site selection* ini sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing gubernur dan kemudian dibahas dalam rapat pleno. Dalam periode ini juga ditetapkan bentuk insentif investasi dan upaya pengembangan Kapet. Dalam rangka pemberian insentif investasi, dikeluarkan Keppres 89/96 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Keputusan tersebut memuat juga beberapa insentif fiskal yang diberikan kepada dunia usaha yang membuka usaha di Kapet. Kemudahan-kemudahan tersebut adalah dalam bentuk pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), pengurangan pajak penghasilan (PPh) atas deviden, amortisasi dan depresiasi yang dipercepat, serta pemberian insentif fiskal untuk kontraktor. Disamping insentif fiskal, juga diberikan insentif nonfiskal, antara lain: pemberian kemudahan dan kelancaran perijinan investasi dengan pelayanan satu atap (*one stop service*), kemudahan pengurusan visa dan pembebasan fiskal bagi pelintas batas.

Penjabaran kebijakan pengembangan Kapet pada periode ini berupa:

- (a) Pemantapan landasan hukum bagi pengembangan Kapet,
- (b) Penyusunan rencana induk Kapet (RIK),
- (c) Pemasyarakatan Kapet, dan
- (d) Pengembangan sistem informasi pendukung pengelolaan Kapet.

Menyusul Keppres 89/96 tadi, dikeluarkan Keppres 90/96 (diperbarui dengan Keppres 10/98) tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak. Inilah Kapet pertama yang memiliki legalitas operasional. Kapet Bima sendiri dibentuk berdasarkan Kepres No. 166 Tahun 1998 pada saat ini pula ditetapkan BP. Kapet yang diketuai oleh menteri kabinet. Kapet Bima diketuai oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang kemudian diperkuat dengan Kepmen SK Mennegristik/Ka BPPT selaku Ketua Harian DP-KTI No. 002/KH/DP-KTI/II/98 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP Kapet di KTI. Selanjutnya dikeluarkan Kepres No. 150 Tahun 2000 yang isinya merubah struktur kepengurusan B. Kapet yang tadinya diketuai oleh Menteri Kabinet menjadi Gubernur. Yang kemudian didukung dengan keluarnya PP. No 20 Tahun 2000 tentang perlakuan perpajakan di Kapet yang disusul perubahannya yaitu PP. No 147 Tahun 2000

Bila dilihat perubahannya seperti pada Tabel berikut ini:

**TABEL IV.3**  
**KEBIJAKAN PENETAPAN KAPET**

NO	KEBIJAKAN	TENTANG	PERUBAHAN	DAMPAK
1	Kepres No.44 tahun 2002	Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia		Kepres ini dimaksudkan agar pembangunan Kawasan Timur Indonesia dapat segera ditangani untuk meminimalisasi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia
2	Kepres No.89 tahun 1996 dan Kepres No.90 Tahun 1996	Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet)	Penetapan Kapet Bima dan Tim Pengarah Kapet dimana BP. Kapet bertanggung jawab terhadap Tim Pengarah dalam Kepres ini belum dijelaskan mengenai BP. Kapet Bima	Penetapan Kapet diharapkan dapat menggerakkan perkonomian di Kawasan Indonesia Timur sehingga mengurangi disparitas antara Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia. Untuk Kabupaten Bima dengan adanya Kepres ini dampak yang akan mungkin terjadi adalah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3	Kepres No.166 Tahun 1998	Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Bima	Penetapan Kapet Bima dan Tim Pengarah Kapet dimana BP. Kapet bertanggung jawab terhadap Tim Pengarah dalam Kepres ini BP. Kapet Bima diketuai oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata	Penetapan Kapet diharapkan dapat menggerakkan perkonomian di Kawasan Indonesia Timur sehingga mengurangi disparitas antara Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia. Untuk Kabupaten Bima dengan adanya Kepres ini dampak yang akan mungkin terjadi adalah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4	Kepmen Menristek SK No.002/KH/DP-KTI/II/1998	Organisasi dan Tata Kerja BP. Kapet di Kawasan Timur Indonesia	Kepmen ini menjelaskan mengenai struktur organisasi Kapet yaitu BP. Kapet diketuai oleh seorang Menteri untuk Kapet Bima diketuai oleh Menteri Pariwisata dan Budaya	Selain dampak diatas dikeluarkannya Kepmen ini dimaksudkan untuk memperjelas manajemen Kapet dengan adanya Stuktur Organisasi BP. Kapet sehingga dapat memperlancar proses pengembangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia

*Sumber: Hasil Analisa,2006*

**TABEL IV.3 Lanjutan**

NO	KEBIJAKAN	TENTANG	PERUBAHAN	DAMPAK
5	Kepres No.150 Tahun 2000	Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet)	Kepres ini menstrukturisasi organisasi BP. Kapet yang semula diketuai oleh seorang Menteri menjadi Gubernur	Strukturisasi Organisasi BP. Kapet dengan digantinya Ketua BP. Kapet dari Menteri Pariwisata dan Budaya menjadi Gubernur dimaksudkan untuk lebih mempermudah koordinasi dalam pengelolaan Kapet. Hal ini juga dimaksudkan untuk mempermudah ijin investasi yang dilakukan oleh pada investor
6	PP. No 20 Tahun 2000	Perlakuan Perpajakan di Kapet	Peraturan pemerintah ini berisi tentang perlakuan perpajakan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Kapet	Insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya, sehingga berdampak pada meningkatnya nilai investasi yang masuk di wilayah Kapet
7	PP. No 147 Tahun 2000	Perlakuan Perpajakan di Kapet	Peraturan pemerintah ini berisi tentang perlakuan perpajakan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Kapet	Mengingat sedikitnya investor yang berminat pemerintah menstrukturisasi perlakuan perpajakan di wilayah Kapet dengan menambah insentif fiskal untuk menarik investor yang ingin menanamkan modalnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah investasi yang masuk lebih dari sebelumnya.

Sumber: Hasil Analisa, 2006

Kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat membantu pengembangan wilayah di Kabupaten Bima, dampak yang diharapkan terjadi di wilayah Kapet adalah pengembangan wilayah melalui meningkatnya investasi yang masuk kedalam wilayah Kapet.

Meskipun telah mengalami beberapa perubahan dan perbaikan, mulai dari Kepres No. 89 Tahun 1996 sampai pada Kepres No.150 Tahun 2000 kebijakan mengenai penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ini tidak juga memperoleh hasil seperti yang diinginkan, hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan di atas. Pengembangan wilayah yang diharapkan dapat terjadi dengan cara menarik investasi untuk masuk tidak berlangsung seperti yang diharapkan, bahkan disparitas antar daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Intensif fiskal yang diberikan melalui PP No.20 Tahun 2000 yang disempurnakan lagi dengan PP No 147 Tahun 2000 tidak juga mampu untuk menarik investasi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

#### **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kapet**

Dari hasil penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet di Kabupaten Bima pada *Lampiran D.4*, keluaran yang perlu diinterpretasikan adalah nilai KMO dan signifikan (*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling*) nilai ini menunjukkan apakah proses analisis faktor yang telah



dilakukan layak untuk dianalisis lebih lanjut, bila nilai KMO  $>0,5$  dan signifikansi  $<0,05$  dari hasil analisis yang telah dilakukan terlihat pada tabel dibawah ini terlihat bahwa nilai KMO =  $0,621 > 0,5$  dan nilai signifikansi =  $0,000 > 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

**TABEL IV.4**  
**KMO AND BARTLETT'S TEST**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,621
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	862,974
	df	325
	Sig.	,000

*Sumber: Hasil Analisa, 2005*

Selanjutnya pada *Anti Image Matrix* perhatikan nilai MSA (*Measure of Sampling Adequacy*) bila nilai MSA  $> 0,5$  maka faktor tersebut dapat diperhitungkan tapi bila nilai MSA  $< 0,5$  maka faktor tersebut kurang berpengaruh secara signifikan dari hasil analisis terlihat bahwa faktor yang memiliki MSA  $> 0,5$  adalah faktor "Inefektif dan Inefisiensi, krisis, mismatch dan Kompetisi Sehingga dalam proses analisis selanjutnya faktor yang memiliki nilai MSA di bawah  $0,5$  tidak dimasukkan. Sehingga didapatkan hasil yang lebih signifikan seperti yang terlihat di bawah ini :

**TABEL IV.5**  
**KMO AND BARTLETT'S TEST**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,671
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	770,599
	df	231
	Sig.	,000

*Sumber: Hasil Analisa, 2005*

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan melalui Analisis Faktor dengan menggunakan *Software SPSS V.13* didapatkan hasil berupa *Rotated Component Matrix* seperti yang terlihat dibawah ini :

**TABEL IV. 6**  
**ROTATED COMPONENT MATRIX(A)**

	Component				
	1	2	3	4	5
Lead_Industri	-,230	,797	-,153	-,052	-,097
Spread_Effect	-,223	,780	-,265	-,063	-,117
Linkage	-,126	,836	-,188	-,056	-,006
SD_SU_KAPET	,281	,659	-,068	-,337	-,184
Lokasi	,248	,646	-,084	-,238	-,320
Intensif	,658	-,057	,205	-,131	,351
Top_Down	,209	-,116	-,408	,187	,686
Dekpnstrasi	,059	-,258	-,236	-,118	,755
Partisipasi	,091	-,212	,780	,004	-,024
Regionalisasi	,190	-,291	-,155	-,223	,738
Affirmative_action	,192	,100	,252	,145	,746
Konsistensi	,843	-,121	-,009	,137	-,015
Koordinasi	,904	-,153	-,038	,078	,074
Infrastruktur	,088	-,168	,908	,012	-,148
Akuntabilitas	,888	,011	,074	,065	,148
Kewenangan	,861	-,013	,096	,089	,060
Ijin_Operasi	,716	,050	,267	-,164	,316
Responsivness	,553	-,537	-,012	-,196	-,350
SDM	,041	-,153	-,099	,886	-,039
Investasi	,021	-,072	,076	,874	-,016
Difersifikasi	,077	-,108	,004	,874	,021
Promosi	,153	-,215	,842	-,003	-,065

Sumber: Hasil Analisa,2005

Berdasarkan hasil analisa pada Tabel IV.6 di atas terlihat bahwa distribusi faktor yang terjadi berdasarkan *Factor Loading* dengan nilai  $> 0,5$  adalah sebagai berikut dengan faktor awal sebanyak 26 faktor berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan terbentuk 5 faktor baru dimana faktor 1 terdiri dari 7 faktor, faktor 2 terdiri dari 5 faktor, faktor 3 terdiri dari 3 faktor, faktor 4 terdiri

dari 3 faktor dan faktor 5 terdiri dari 4 faktor dan terdapat 4 faktor yang tidak termasuk dalam proses analisis. Distribusi tersebut seperti terlihat pada Tabel IV. 7 berikut ini:

**TABEL IV.7**  
**DISTRIBUSI FAKTOR**

NO	FAKTOR	FAKTOR AWAL
1	Faktor 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Sektor dalam menyediakan intensif dalam menunjang terwujudnya pelayanan langsung belum optimal</li> <li>2. Tidak Konsistennya kebijakan mengenai pengembangan Kapet</li> <li>3. Tidak adanya koordinasi maupun dukungan dari instansi terkait</li> <li>4. Rendahnya akuntabilitas lembaga yang terlibat. BP Kapet dan personil yang bekerja didalamnya telah dibentuk namun sebagian besar <i>Job Description</i> nya masih sangat kabur</li> <li>5. Pemisahan kewenangan bidang-bidang yang menjadi urusan BP Kapet dan Pemda masih belum dilakukan secara jelas demikian juga dengan pemisahan urusan yang ditangani oleh sektor atau instansi vertikal di daerah</li> <li>6. Masih dipegangnya beberapa bentuk ijin operasi oleh instansi sektor di pusat</li> <li>7. Masih perlu ditingkatkannya <i>Responsivness</i> BP. Kapet maupun pemerintah yang berwenang dalam menghadapi berbagai keluhan investor secara kongkrit. Seperti memberikan jaminan keamanan berusaha, memberikan informasi peluang bisnis yang obyektif dan memadai, memangkas jalur-jalur ilegal perijinan dan menciptakan perencanaan wilayah yang terintegrasi dan kondusif bagi berbagai kegiatan usaha.</li> </ol>
2	Faktor 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri industri yang terdapat di dalam Kapet tidak cepat berkembang (bukan <i>Leading Industri</i>)</li> <li>2. <i>Spread Effect</i> yang dihasilkan dan yang diharapkan mampu untuk mengembangkan daerah sekitarnya ternyata tidak pernah terwujud dan hanya sedikit sekali menyerap tenaga kerja.</li> <li>3. Industri-industri yang berada didalam pusat-pusat pertumbuhan itu tidak mempunyai linkage dengan sektor wilayah sekitarnya.</li> <li>4. Kemampuan masing-masing Kapet (Sektor unggulan, Sumber Daya dan Sumber Daya Manusia berbeda-beda)</li> <li>5. Lokasi yang ditetapkan sebagai Kapet kurang memenuhi kriteria yang ditetapkan</li> </ol>
3	Faktor 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya perlibatan dan partisipasi nyata dari Kabupaten/ Kota beserta segenap komponen pembangunannya</li> <li>2. Pengembangan infrastruktur, komoditi unggulan dan kerjasama regional yang belum proposional</li> <li>3. Promosi yang dilakukan kurang menarik</li> </ol>
4	Faktor4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pendidikan SDM terbatas</li> <li>2. Minat Investor rendah hanya terbatas pada sektor peternakan dan budidaya mutiara</li> <li>3. Difersifikasi usaha umumnya sangat kecil sehingga mengakibatkan posisi tawar terhadap komoditi yang dihasilkan sangat rendah.</li> </ol>

Sumber: Hasil Analisa, 2005

TABEL IV.7 Lanjutan

NO	FAKTOR	FAKTOR AWAL
5	Faktor 5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh paradigma <i>Top Down</i> yang masih melekat dalam konsep Kapet yang hingga kini diterapkan. Dominasi partisipasi dan kontribusi Pusat, khususnya yang menyangkut aspek pendanaan proyek melalui APBN semakin menguatkan posisi tawar Pusat dalam mengaplikasikan pandangan-pandangannya pada setiap kawasan Kapet.</li> <li>2. Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi sebatas berkedudukan sebagai pengemban tugas dekonsentrasi dan bukannya representasi daerah.</li> <li>3. Proses Regionalisasi Desentralistik yang belum sungguh-sungguh diterapkan di Kapet</li> <li>4. Kurangnya atau tidak adanya keberpihakan (<i>Affirmative action</i>) dari pemerintah pusat bersama lembaga-lembaga dibawahnya (<i>Departemen/Instansi</i>) dalam mendukung pengembangan Kapet</li> </ol>

Sumber: Hasil Analisa, 2005

Berdasarkan distribusi faktor awal terhadap faktor yang telah terbentuk terbentuk 5 faktor dengan nama:

1. Kinerja lembaga BP Kapet yang belum optimal dalam pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima).

Kinerja lembaga BP. Kapet belum optimal dalam pengembangan wilayah di kabupaten Bima, hal ini terlihat dari tidak dapat dijalankannya seluruh rencana kegiatan yang direncanakan dalam jangka menengah (*Lampiran D.2*).

2. Kabupaten Bima tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan.

Kabupaten Bima tidak tepat sebagai pusat pertumbuhan mengingat Konsep Pusat Pertumbuhan yaitu *Leading Industri, Linkages, Polarisasi* dan *Spread Effect* tidak terdapat dan terjadi di Kabupaten Bima, dan juga terjadi *Mismatch* antara kriteria penetapan Kapet oleh Departemen Pekerjaan Umum dan konsep pusat pertumbuhan (teori pusat pertumbuhan) seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV. 8**  
**KONSEP PENETAPAN KAPET**

NO	KONSEP TEORI PUSAT PERTUMBUHAN	KRITERIA PENETAPAN KAPET
1	Terdapatnya <i>Leading Industri</i> yang mempunyai <i>Linkages</i> dengan daerah sekitarnya	Memiliki Potensi Unggulan
2	Terjadinya Polarisasi sebagai akibat dari adanya <i>Leading Industri</i>	Berpotensi untuk cepat tumbuh
3	Terjadi <i>Spread Effect</i>	Membutuhkan biaya yang besar bagi pengembangannya

*Sumber: Hasil Analisa, 2006*

Bila dilihat dari perbandingan di atas terdapat perbedaan yang sangat besar sekali sehingga Kabupaten Bima (Kapet Bima) tidak tepat sebagai pusat pertumbuhan. Selain itu Kabupaten Bima juga tidak memenuhi konsep pusat pertumbuhan antara lain: tidak memiliki *leading industri* yang dapat menggerakkan perekonomian sekitarnya, tidak terjadi polarisasi dan tidak terjadi *Spread Effect (Trickle Down Effect)* seperti yang diharapkan.

3. Kurangnya keberpihakan dari pemerintah kabupaten/ kota dalam mendukung pengembangan Kapet

Kurangnya keberpihakan dari pemerintah kabupaten/ kota dalam mendukung pengembangan Kapet terlihat dari kurangnya koordinasi antara BP. Kapet dan pemerintah kabupaten/ kota dalam struktur organisasi BP. Kapet tidak terdapat garis koordinasi antara BP. Kapet dengan pemerintah daerah setempat, dalam pembagian tugas dan kewenangan juga terdapat tumpang tindih kewenangan antara BP. Kapet dengan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Dan tidak terdapat kejelasan mengenai pembagian kewenangan antara BP. Kapet dengan Badan Penanaman Modal Daerah, bila dilihat dari tugas dan fungsi BP. Kapet terdapat tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah setempat, hal ini seharusnya mendapat penjelasan lebih lanjut namun sampai pada saat ini kejelasan mengenai kewenangan dan tupoksi BP. Kapet dan Pemerintah Daerah setempat belum juga ada.

4. Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam)

Penetapan Kapet dilakukan melalui paradigma *Top Down* yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pada awal pembentukannya Gubernur memberikan usulan mengenai wilayah yang akan dijadikan Kapet kemudian Pemerintah Pusat menetapkan. Dalam proses ini pemerintah daerah setempat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses penetapan Kapet (diwakili oleh Gubernur) seiring dengan adanya Otonomi Daerah menuntut terjadinya perubahan dalam lembaga BP. Kapet sehingga SDM lokal diajak ikut serta dalam pengelolaan Kapet, namun mengingat SDM Lokal tidak dilibatkan sejak awal pembentukan Kapet menyebabkan tidak siapnya SDM lokal menghadapi tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

5. Manajemen Pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat. (Hasil Analisa, 2005)

### **Analisis Strategi Pengembangan Kapet dengan SWOT**

#### **Tahap pertama Pengambilan Data yaitu Faktor Eksternal dan Internal**

Berdasarkan hasil analisis faktor yang telah dilakukan didapatkan 5 faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet Bima di Kabupaten Bima yaitu:

1. Kinerja Lembaga BP Kapet yang belum optimal dalam pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima).
2. Kabupaten Bima tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan.
3. Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam).
4. Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung pengembangan Kapet.

5. Manajemen Pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat

### **Faktor Eksternal**

Dari ke 5 faktor tersebut bila diidentifikasi maka yang termasuk dalam faktor eksternal (Tantangan) adalah:

#### **Tantangan**

1. Kinerja BP. Kapet yang belum optimal dalam mendukung pengembangan Kapet Bima.
2. Manajemen Pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat.

#### **Peluang**

1. Posisi geografis dalam wilayah indonesia maupun didalam wilayah asia pasifik serta antar wilayah asia (terutama asia timur dan tenggara) Hal ini disebabkan sebagian besar kawasan KTI adalah merupakan wilayah kelautan yang menghubungkan antara KBI dengan wilayah pasifik serta wilayah asia lainnya. Sehingga berpeluang untuk menarik kegiatan untuk berlokasi di KTI. Hubungan perdagangan antara australia dan selandia baru dengan negara-negara Asia Timur khususnya jepang selalu memanfaatkan perairan KTI.
2. Keputusan Presiden No. 150 tahun 2000 tentang Kapet.
3. PP Nomor 47 tahun 1997 tentang perlakuan perpajakan di Kapet.
4. PP Nomor 20 tahun 2000 tentang Perpajakan Kapet.
5. PP Nomor 147 tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kapet.

### **Faktor Internal**

Sedangkan yang termasuk dalam Faktor Internal (Kelemahan) adalah:

#### **Kelemahan**

1. Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam).
2. Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung pengembangan Kapet.

### 3. Kabupaten Bima tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan.

#### **Kekuatan**

#### a. Pertanian/ perkebunan.

Dalam sektor pertanian komoditas yang diunggulkan adalah bawang merah sedangkan dari sektor perkebunan komoditas yang dapat diunggulkan antara lain adalah kopi dengan luas lahan sebesar 8.771 ha baru dimanfaatkan sebesar 7.142 ha dan jambu mete dengan lahan seluas 14.375 ha yang telah dimanfaatkan sebesar 6.004 ha.

#### b. Pertambangan.

Potensi Komoditas yang cukup menonjol dari sektor pertambangan di Kabupaten Bima adalah Marmer. Potensi marmer di Kabupaten Bima ini cukup murah dan mudah untuk dikembangkan.

Ada tujuh lokasi bahan galian marmer yang cukup potensial untuk dikembangkan dan ada yang sudah operasional dengan lokasi strategis dari jalur transportasi.

#### c. Perindustrian

Terdapat potensi untuk mendirikan industri garam rakyat, mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bima adalah wilayah pesisir pantai.

#### d. Perikanan

Wilayah kabupaten Bima sebagian besar adalah perairan karena itu potensi perikanan di Kabupaten Bima sangat besar antara lain adalah Mutiara, Rumput laut, Udang Windu dan Ikan Tuna.

#### e. Pariwisata

Di Kabupaten Bima terdapat beberapa wisata pantai yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain Pantai Rontu yang ombaknya dapat dipakai untuk berselancar.



### Perhitungan Bobot dan Rating Faktor Internal dan Eksternal

Perhitungan bobot dan rating tiap-tiap faktor dapat dilakukan dengan cara kuisioner maupun pengambilan data kuantitatif secara langsung (Marimin, 2004).

Dalam penelitian ini perhitungan bobot dan rating tiap-tiap faktor dilakukan dengan cara kuisioner dengan kuisioner **MODEL E.2** dan **MODEL E.3** (*Lampiran E*), kemudian dari nilai tiap responden diambil rata-rata nilai bobot dan rating. Berdasarkan perhitungan bobot dan rating FAKTOR INTERNAL (*Lampiran E.5 dan E.6*) didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL IV.9**  
**BOBOT DAN RATING FAKTOR INTERNAL**

NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING
	Kekuatan			
1	Komoditas pertanian berupa Bawang Merah, Kopi, Jambu Mete	0,13750	3,500	0,48125
2	Komoditas Pertambangan berupa marmer	0,17917	3,500	0,627083333
3	Komoditas Perikanan berupa Udang Windu, Ikan Tuna	0,20000	4,000	0,8
4	Obyek wisata pantai	0,14167	3,500	0,495833333
				2,404166667
	Kelemahan			
1	SDM kurang dan rendahnya posisi tawar komoditas unggulan	0,18333	3,750	0,6875
2	Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,15833	3,667	0,580555556
3	Kabupaten Bima Tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan	0,12917	3,167	0,409027778
				1,268055556
				1,136111111

Sumber: Hasil Analisa, 2005

Berdasarkan perhitungan Bobot dan Rating FAKTOR EKSTERNAL yang telah dilakukan melalui Kuisioner **MODEL E.2** dan Kuisioner **MODEL E.3** pada *Lampiran E.2 dan E.3* dan perhitungan bobot dan rating FAKTOR

EKSTERNAL yang telah dilakukan pada *Lampiran E.5 dan E.6* maka didapatkan hasil perhitungan seperti pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.10**  
**BOBOT DAN RATING FAKTOR EKSTERNAL**

NO	FAKTOR	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING
	Peluang			
1	Posisi geografis Indoensia yang strategis	0,11667	2,667	0,311111111
2	Kepres No.150 Tahun 2005 tentang KAPET	0,12083	2,667	0,322222222
3	PP No. 47 Tahun 1997 tentang perlakuan perpajakan di KAPET	0,07917	3,167	0,250694444
4	PP No. 20 tahun 2000 tentang Perpajakan KAPET	0,08333	3,000	0,25
5	PP. No. 147 Tahun 2000 tentang perlakuan perpajakan di KAPET	0,12083	3,000	0,3625
				1,496527778
	Tantangan			
1	Kinerja BP KAPET yang belum optimal	0,18333	3,750	0,6875
2	Manajemen pengelolaan KAPET yang masih didominasi Pusat	0,16667	3,917	0,652777778
				1,340277778
				0,15625

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Berdasarkan hasil perhitungan bobot dan rating FAKTOR EKSTERNAL seperti yang terlihat pada tabel di atas didapatkan nilai koordinat (1.136,0,15625) berarti posisi pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima) berada pada kuadran ke I , dimana kuadran ke I memiliki peluang dan kekuatan untuk pengembangan selanjutnya.

### Pengambilan Keputusan

Dalam tahap pengambilan keputusan matriks SWOT ini perlu merujuk kembali matriks internal dan eksternal yang menghasilkan posisi Kapet saat ini. Kemudian dibuat matriks strategi. Matriks ini menggambarkan secara jelas

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Kapet dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Seperti terlihat di bawah ini :

**TABEL IV.11  
MATRIX STRATEGI**

	<b>OPPORUNITY (PELUANG)</b>	<b>THREAT (ANCAMAN)</b>
	Posisi geografis Indoensia yang strategis  Kepres No.150 Tahun 2005 tentang KAPET PP No. 47 Tahun 1997 tentang perlakuan perpajakan di KAPET PP No. 20 tahun 2000 tentang Perpajakan KAPET PP. No. 147 Tahun 2000 tentang perlakuan perpajakan di KAPET	Kinerja BP KAPET yang belum optimal Manajemen pengelolaan KAPET yang masih didominasi Pusat
<b>STRENGH (KEKUATAN)</b>	<b>STRATEGI S-O</b>	<b>STRATEGI S-T</b>
Komoditas pertanian berupa Bawang Merah, Kopi, Jambu Mete Komoditas Pertambangan berupa marmer Komoditas Perikanan berupa Udang Windu, Ikan Tuna Obyek wisata pantai	Peningkatan kualitas komoditas unggulan untuk meningkatkan posisi tawar komoditas unggulan  Melakukan promosi investasi	Optimalisasi kinerja BP KAPET  Reformasi Manajemen Pengelolaan KAPET
<b>WEAKNESS (KELEMAHAN)</b>	<b>STRATEGI W-O</b>	<b>STRATEGI W-T</b>
SDM kurang dan rendahnya posisi tawar komoditas unggulan  Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten Bima tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan	Peningkatan kualitas SDM  Peningkatan kinerja sarana& prasarana wilayah dalam mendukung pengembangan KAPET	Peningkatan koordinasi antara BP KAPET dengan Pemda/pemkot Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Manajemen KAPET

Sumber: Hasil Analisa, 2005

Matriks ini dapat menghasilkan 8 strategi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Komoditas unggulan untuk meningkatkan posisi tawar komoditas Unggulan.
2. Melakukan promosi investasi.
3. Peningkatan kualitas SDM.

4. Peningkatan kinerja sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung pengembangan Kapet.
5. Optimalisasi kinerja BP Kapet.
6. Reformasi manajemen pengelolaan Kapet.
7. Peningkatan koordinasi antara BP Kapet dengan pemda/ Pemkot.
8. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen Kapet.

### **Prioritas Strategi dan langkah Operasional**

Berdasarkan hasil pemetaan interaksi antara faktor internal dan eksternal seperti pada tabel diatas selanjutnya disusun prioritas strategi dengan metode QSPM (*Quantitatif Strategis Planning Matrix*) dengan cara melakukan penilaian pada tiap- tiap strategi atas fator internal dan eksternalnya. Setiap strategi diberikankan *Attractive Score (AS)* yang akan diisi oleh Narasumber kemudian tiap- tiap strategi diambil nilai rata- rata *Attractive Score (AS)* dengan skala penilaian:

- 1 : Berarti tidak menarik (tidak prioritas)
- 2 : Berarti kurang menarik (kurang prioritas)
- 3 : Berarti Menarik (Prioritas)
- 4 : berarti sangat Menarik (Sangat Prioritas)

Berdasarkan nilai *Attractive Score (AS)* dari setiap strategi yang telah disusun didapatkan bahwa strategi dengan nilai *Total Attractive Score (TAS)* tertinggi merupakan strategi dengan prioritas utama.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan (*Lampiran E.7*) didapatkan hasil seperti terlihat pada Tabel berikut ini:

**TABEL IV.12**  
**PRIORITAS STRATEGI**

NO	STRATEGI	TOTAL ATTRACTIVE SCORE	PRIORITAS
1	Peningkatan Kualitas Komoditas Unggulan	7,237847	7
2	Promosi Investasi	8,600347222	2
3	Peningkatan kualitas kinerja Sarana dan Prasarana Wilayah	7,916435185	3
4	Peningkatan Kualitas SDM	7,616666667	5
5	Optimalisasi Kinerja BP Kapet	7,889467593	4
6	Reformasi Manajemen Pengelolaan Kapet	8,655902778	1
7	Peningkatan Koordinasi BP KAPET dengan Pemda/Pemkot	7,546875	6
8	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Manajemen Kapet	6,270833333	8

*Sumber: Hasil Analisa, 2005*

### **Analisis Strategi Pengembangan Kapet**

Berdasarkan hasil analisa didapatkan beberapa strategi yang perlu diterapkan dalam upaya pengembangan Kapet antara lain:

1. Reformasi Manajemen Pengelolaan Kapet, tidak berhasilnya Kapet selama ini antara lain disebabkan oleh pengelolaan Kapet yang selama ini masih didominasi oleh Pemerintah Pusat karena itu perlu dilakukan perombakan dalam manajemen Kapet.
2. Melakukan Promosi mengenai peluang-peluang investasi dalam Kapet melalui media cetak dan elektronik untuk dapat memasarkan potensi-potensi Kapet.
3. Peningkatan kualitas kinerja sarana dan prasarana wilayah yang menunjang kegiatan produksi seperti transportasi, irigasi, komunikasi dan listrik

4. Optimalisasi kinerja BP. Kapet, peningkatan kinerja dilakukan dengan cara melakukan evaluasi secara periodik mengenai kinerja Kapet.
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, terutama yang memiliki jiwa wirausaha untuk mendukung pengembangan Kapet.
6. Peningkatan Koordinasi antara BP. Kapet dengan pemerintah daerah setempat agar saling mendukung dalam upaya pengembangan wilayah.
7. Peningkatan kualitas komoditas unggulan untuk menaikkan posisi tawar komoditas unggulan wilayah agar investor berminat untuk menanamkan modalnya.
8. Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan Kapet

Dalam Buku Rencana Induk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima terdapat strategi-strategi yang telah ditetapkan antara lain:

1. Mengoptimalkan keterkaitan sistem prasarana dasar sebagai pendukung pengembangan komoditi perkebunan, perikanan dan pariwisata melalui pengembangan kawasan sentra produksi serta pusat- pusat pelayanan.
2. Membangun prasana dasar pekerjaan umum dan non pekerjaan umum serta menyiapkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sampai ketaraf yang memadai untuk pengembangan agroindustri dan agrobisnis serta mengembangkan kawasan wisata dan kawasan pertambangan.
3. Menciptakan dan menjamin kemudahan sistem dan prosedur perijinan melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Disamping itu mengembangkan prasarana pekerjaan umum dan non pekerjaan umum yang bersifat eksternal (Bandar

Udara, Pelabuhan Laut) maupun yang bersifat internal (Jalan, Jembatan, Listrik dan Telepon).

4. Menciptakan kegiatan promosi dan kerjasama perdagangan industri dan pariwisata dengan berbagai pihak. Menyusun dan memperlakukan Rencana Tata Ruang yang luwes, diperkuat dengan Produk Hukum dan Peraturan Daerah.
5. Mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah Kapet Bima berdasarkan Rencana Tata Ruang.
6. Memobilisasi dan memberdayakan satuan-satuan komoditas adat maupun formal untuk membangun kesatuan citra sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan.

Dari strategi yang telah disusun oleh penulis bila dibandingkan dengan strategi yang telah ditetapkan oleh Kapet terlihat seperti dibawah ini:

**TABEL IV.13**  
**STRATEGI PENGEMBANGAN KAPET**

STRATEGI KAPET	STRATEGI PENELITI	ALASAN
	Reformasi Manajemen Pengelolaan Kapet, tidak berhasilnya Kapet selama ini antara lain disebabkan oleh pengelolaan Kapet yang selama ini masih didominasi oleh Pemerintah Pusat karena itu perlu dilakukan perombakan dalam manajemen Kapet	Manajemen Pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat
Menciptakan kegiatan promosi dan kerjasama perdagangan industri dan pariwisata dengan berbagai pihak. Menyusun dan memperlakukan Rencana Tata Ruang yang luwes, diperkuat dengan Produk Hukum dan Peraturan Daerah	Melakukan Promosi mengenai peluang-peluang investasi dalam Kapet melalui media cetak dan elektronik untuk dapat memasarkan potensi-potensi Kapet	Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung pengembangan Kapet Promosi yang dilakukan selama ini kurang menarik sehingga investor kurang begitu tertarik untuk menanamkan modalnya
	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, terutama yang memiliki jiwa wirausaha untuk mendukung pengembangan Kapet	Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam) Kurangnya kualitas SDM terutama SDM yang memiliki jiwa wirausaha dalam memasarkan wilayah.
	Peningkatan kualitas komoditas unggulan untuk menaikkan posisi tawar komoditas unggulan wilayah agar investor berminat untuk menanamkan modalnya	Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam) Difersikasi usaha sangat kecil sekali dan juga kondisi iklim (curah hujan dan tanah) yang menyebabkan posisi tawar produk unggulan tidak begitu bagus.

Sumber: Hasil Analisa, 2006



TABEL IV.13 Lanjutan

STRATEGI KAPET	STRATEGI PENELITI	ALASAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengoptimalkan keterkaitan sistem prasarana dasar sebagai pendukung pengembangan komoditi perkebunan, perikanan dan pariwisata melalui pengembangan kawasan sentra produksi serta pusat-pusat pelayanan.</li> <li>▪ Membangun prasana dasar pekerjaan umum dan non pekerjaan umum serta menyiapkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sampai ketaraf yang memadai untuk pengembangan agroindustri dan agrobisnis serta mengembangkan kawasan wisata dan kawasan pertambangan.</li> </ul>	<p>Peningkatan kualitas kinerja sarana dan prasarana wilayah yang menunjang kegiatan produksi seperti transportasi, irigasi, komunikasi dan listrik</p>	<p>Sarana dan prasarana wilayah yang ada sangat minim sekali dalam menunjang pemasaran wilayah dikarenakan kurang adanya partisipasi dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menciptakan dan menjamin kemudahan sistem dan prosedur perijinan melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Disamping itu mengembangkan prasarana pekerjaan umum dan non pekerjaan umum yang bersifat eksternal (Bandar Udara, Pelabuhan Laut) maupun yang bersifat internal (Jalan, Jembatan, Listrik dan Telepon)</li> <li>• Mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah Kapet Bima berdasarkan Rencana Tata Ruang</li> <li>• Memobilisasi dan memberdayakan satuan- satuan komoditas adat maupun formal untuk membangun kesatuan citra sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Koordinasi antara BP. Kapet dengan Pemerintah Daerah setempat agar saling mendukung dalam upaya pengembangan wilayah.</li> <li>▪ Optimalisasi kinerja BP. Kapet, peningkatan kinerja dilakukan dengan cara melakukan evaluasi secara periodik mengenai kinerja Kapet</li> <li>▪ Aspek penting dari peningkatan kinerja Kapet adalah Transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan Kapet</li> </ul>	<p>Kinerja Lembaga BP Kapet yang belum optimal dalam pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima)</p>

Sumber: Hasil Analisa, 2006

Bila dilihat dari hasil perbandingan di atas terdapat beberapa Strategi yang mirip dan juga terdapat beberapa strategi yang baru muncul dalam penelitian ini. Seperti analisis-analisis yang telah dilakukan di atas terdapat beberapa faktor (*Hasil Analisis Faktor*) mengapa strategi-strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan Kapet tidak mampu membuat Kabupaten Bima berkembang antara lain:

- Kinerja Lembaga BP Kapet yang belum optimal dalam pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima). BP Kapet sendiri sebagai lembaga pengelola Kapet belum melakukan kinerja yang optimal karena berbagai hal antara lain : Dukungan Sektor dalam menyediakan intensif dalam menunjang terwujudnya pelayanan langsung belum optimal, Tidak Konsistennya kebijakan mengenai pengembangan Kapet, Tidak adanya koordinasi maupun dukungan dari instansi terkait, Rendahnya akuntabilitas lembaga yang terlibat. BP Kapet dan personil yang bekerja didalamnya telah dibentuk namun sebagian besar *Job Description* nya masih sangat kabur, Pemisahan kewenangan bidang-bidang yang menjadi urusan BP Kapet dan Pemda masih belum dilakukan secara jelas demikian juga dengan pemisahan urusan yang ditangani oleh sektor atau instansi vertikal di daerah, Masih dipegangnya beberapa bentuk ijin operasi oleh instansi sektor di pusat dan masih kurangnya *Responsivness* BP. Kapet maupun pemerintah yang berwenang dalam memasarkan wilayah.
- Kabupaten Bima tidak tepat sebagai pusat pertumbuhan karena kurang memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan, industri industri yang terdapat di dalam Kabupaten Bima (Kapet) tidak cepat

berkembang (bukan *Leading Industri*), *Spread Effect* yang dihasilkan dan yang diharapkan mampu untuk mengembangkan daerah sekitarnya ternyata tidak pernah terwujud dan hanya sedikit sekali menyerap tenaga kerja, Industri-industri yang berada didalam pusat-pusat pertumbuhan itu tidak mempunyai linkage dengan sektor wilayah sekitarnya, Kemampuan masing-masing Kapet (sektor unggulan, Sumber Daya dan Sumber Daya Manusia berbeda-beda).

- Kurangnya keberpihakan dari pemerintah kabupaten/ kota dalam mendukung pengembangan Kapet baik dalam pengembangan infrastruktur, komoditi unggulan dan kerjasama regional yang belum proposional serta dalam memasarkan wilayah promosi yang dilakukan kurang menarik selama ini pengelolaan Kapet mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah sendiri terkesan tidak mau peduli dan tidak merasa memiliki Kapet tersebut.
- Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam).
- Manajemen pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat, manajemen pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat menyebabkan besarnya posisi tawar Pemerintah Pusat dalam menentukan kebijakan-kebijakan mengenai Kapet, hal ini juga berpengaruh dalam hal pendanaan. Karena dianggap merupakan kebijakan pusat Pemerintah Daerah enggan mengeluarkan dana untuk pengembangan Kapet.

### **Analisis Strategi Reformasi Manajemen Kapet dengan AHP (Analytical Hierarchy Process)**

Strategi Reformasi manajemen Kapet lebih lanjut diuraikan dalam Pemilihan Alternatif strategi pengelolaan, strategi ini perlu diuraikan lebih lanjut karena: Era Otonomi Daerah menyebabkan bentuk Pengelolaan yang ada sekarang sudah tidak lagi relevan, Dominasi Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Kapet, Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Daerah/Kota dalam mendukung pengembangan Kapet dan Merupakan Prioritas Strategi yang harus dilakukan yaitu :”Reformasi Pengelolaan Kapet”.

### **Manfaat dan Beban Pembinaan dan Pengelolaan Kapet**

Penyusunan Hirarki Manfaat dan Beban dalam Pembinaan dan Pengelolaan Kapet dilakukan oleh Peneliti berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan sebelumnya Hirarki manfaat dan beban Pembinaan dan pengelolaan Kapet Bima seperti terlihat pada gambar terlampir (*Lampiran F.2*)

### **Hasil Penilaian Alternatif Bentuk Pembinaan dan Pengelolaan**

#### **Kapet Bima**

Penilaian alternatif bentuk pembinaan dan pengelolaan Kapet menggunakan metode proses hirarki analitik, perhitungan dilakukan dengan menggunakan program komputer (*Expert Choice*) sebagai masukan dalam proses analisis adalah nilai perbandingan berpasangan (*pairwise comparasion*) dari setiap kriteria utama, sub kriteria dan alternatif. Nilai perbandingan tersebut merupakan persepsi nara sumber yang telah diperoleh dengan menggunakan kuisioner (lihat

*Lampiran F.3* ) Skala pembandingan yang digunakan untuk penilaian adalah antara 1-9 (Saaty, 1980) seperti terlihat pada *lampiran F.1*.

Responden dalam penelitian ini ditetapkan berjumlah 12 orang dipilih dari mereka yang mengetahui dan memahami kondisi perkembangan Kapet (Lihat *Lampiran A*). Sebagai pembandingan penilaian nara sumber peneliti juga melakukan penelitian dengan maksud antara lain : (a) Menguji pemahaman peneliti akan kinerja Kapet dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (b) untuk mengetahui kesahihan hirarki yang disusun berdasarkan wawasan, rasionalitas dan intuisi peneliti (c) kontrol terhadap kuisioner yang dipergunakan.

Pengisian persepsi peneliti dan nara sumber dilakukan sampai diperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan atau dengan nilai *Consistency Index* (CI)  $\leq 0,1$ . Keluaran utama dari proses hirarki analitik adalah nilai "eigenfactor" yang terdiri atas nilai prioritas global per matriks pada hirarki alternatif meruakan nilai bobor manfaat dan bobot beban setiap alternatif bentuk pembinaan dan pengelolaan Kapet. Keluaran bobot prioritas global dan rangkuman hasil penilaian dari masing-masing alternatif dapat dilihat pada *Lampiran F.4*.

### **Hasil Penilaian Manfaat dan Beban dari Setiap Alternatif**

Penentuan alternatif terbaik bentuk pembinaan dan pengelolaan Kapet Bima didasarkan pada asas maksimalisasi keuntungan dan miimalisasi kerugian atau suatu nilai perbandingan terbesar antara bobot manfaat dan bobot beban sebagaimana dimaksudkan Saaty " Salah satu cara dalam pengambilan keputusan adalah dengan menentukan berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, kemudian dipilih alternatif mana yang paling besar

manfaat dibandingkan dengan bebannya dalam mencapai tujuan melalui perhitungan bobot dari masing-masing alternatif dalam pencapaian tujuan tersebut”

Berdasarkan penilaian prioritas global per matriks dari setiap alternatif (lihat *Lampiran F.4*), diketahui bobot manfaat dan bobot beban dari keempat alternatif pembinaan dan pengelolaan Kapet Bima sebagai berikut:

#### **Manfaat dari Setiap Alternatif**

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan (*Lampiran F.4*) didapatkan hasil manfaat dari setiap alternatif pilihan yang merupakan rata-rata penilaian nara sumber yaitu:

**TABEL IV.14  
MANFAAT DARI SETIAP ALTERNATIF**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,1143
ALTERNATIF 2	0,1401
ALTERNATIF 3	0,4253
ALTERNATIF 4	0,3205

*Sumber: Hasil Analisa, 2005*

Manfaat terbesar terdapat pada Alternatif 3 yaitu regionalisasi desentralistik dengan nilai 0,4253 sedangkan manfaat terkecil adalah alternatif 1 yaitu regionalisasi sentralistik dengan nilai 0,1143.

#### **Beban dari Setiap Alternatif**

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan (*Lampiran F.4*) didapatkan hasil manfaat dari setiap alternatif pilihan yang merupakan rata-rata penilaian nara sumber yaitu:

**TABEL IV.15**  
**BEBAN DARI SETIAP ALTERNATIF**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,3103
ALTERNATIF 2	0,2249
ALTERNATIF 3	0,1766
ALTERNATIF 4	0,2883

*Sumber: Hasil Analisa, 2005*

Beban terbesar terdapat pada alternatif 1 yaitu regionalisasi sentralistik dengan nilai 0,3103 sedangkan beban terkecil pada alternatif 3 regionalisasi desentralistik dengan nilai 0,1766.

**Perbandingan Manfaat dan Beban dari Setiap Alternatif**

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan (*Lampiran F.4*) didapatkan hasil perbandingan manfaat dan beban (*Benefic- Cost Ratio*) dari setiap alternatif pilihan yang merupakan rata-rata penilaian nara sumber yaitu:

**TABEL IV.16**  
**PERBANDINGAN MANFAAT DAN BEBAN**  
**DARI SETIAP ALTERNATIF**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,3731
ALTERNATIF 2	0,6259
ALTERNATIF 3	2,4740
ALTERNATIF 4	1,1344

*Sumber: Hasil Analisa, 2005*

Terlihat bahwa alternatif yang memiliki *Benefit-Cost Ratio* terbesar adalah alternatif 3 yaitu regionalisasi desentralistik maka alternatif terbaik untuk pembinaan dan pengelolaan Kapet adalah alternatif 3 yaitu regionalisasi desentralistik.

### **Analisis Manfaat dan Beban pada Kriteria Utama**

Untuk melengkapi hasil penilaian diatas, berikut dibahas mengenai manfaat dan beban keempat alternatif pada kriteria utama penilaian yang merupakan tugas pokok pemerintahan antara lain: pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

#### **Manfaat dan Beban pada Kriteria Pemerintahan (Organisasi)**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil berupa manfaat dan beban setiap alternatif pada kriteria utama, pada kriteria utama pemerintahan (organisasi) seperti terlihat pada tabel di bawah ini

**TABEL IV.17**  
**PERBANDINGAN MANFAAT DAN BEBAN**  
**DARI SETIAP ALTERNATIF PADA KRITERIA PEMERINTAHAN**

ALTERNATIF	Manfaat	Beban	Manfaat/ Beban
ALTERNATIF 1	0,0125	0,0173	0,7474
ALTERNATIF 2	0,0155	0,0270	0,5856
ALTERNATIF 3	0,0433	0,0674	0,6449
ALTERNATIF 4	0,0700	0,0714	0,9934

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dalam kriteria pemerintahan (organisasi) alternatif dengan nilai terbesar adalah alternatif 4 yaitu pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga (konsultan) dengan nilai 0,9934.

#### **Manfaat dan Beban pada Kriteria Pembangunan**

Kriteria selanjutnya dari hirarki manfaat dan beban dalam pembinaan dan pengelolaan Kapet Bima adalah kriteria pembangunan dengan nilai manfaat dan beban untuk setiap alternatif seperti terlihat pada tabel di bawah ini:



**TABEL IV.18**  
**PERBANDINGAN MANFAAT DAN BEBAN**  
**DARI SETIAP ALTERNATIF PADA KRITERIA PEMBANGUNAN**

ALTERNATIF	Manfaat	Beban	Manfaat/ Beban
ALTERNATIF 1	0,0542	0,0403	1,3445
ALTERNATIF 2	0,0811	0,0643	1,2734
ALTERNATIF 3	0,3197	0,1490	2,2069
ALTERNATIF 4	0,2522	0,3420	0,7373

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Dari kriteria pembangunan terlihat bahwa alternatif dengan nilai tertinggi adalah alternatif 3 yaitu regionalisasi desentralistik.

**Manfaat dan Beban pada Kriteria Sosial Kemasyarakatan**

Selanjutnya pada kriteria sosial kemasyarakatan hasil analisa terlihat seperti pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.19**  
**PERBANDINGAN MANFAAT DAN BEBAN**  
**DARI SETIAP ALTERNATIF**  
**PADA KRITERIA SOSIAL KEMASYARAKATAN**

ALTERNATIF	Manfaat	Beban	Manfaat/ Beban
ALTERNATIF 1	0,1171	0,5782	0,2027
ALTERNATIF 2	0,1691	0,3561	0,4909
ALTERNATIF 3	0,5478	0,1227	4,5408
ALTERNATIF 4	0,3118	0,1970	1,7690

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Dari tabel di atas terlihat bahwa alternatif dengan nilai terbesar adalah alternatif 3 yaitu regionalisasi desentralistik dengan nilai 4,5408 hal ini berarti bahwa alternatif terbaik untuk kriteria sosial kemasyarakatan adalah alternatif 3 yaitu regionalisasi desentralistik.

### **Analisis Manfaat dan Beban pada Sub Kriteria Penilaian**

Manfaat dan beban pembinaan dan pengelolaan Kapet Bima pada kriteria utama dijabarkan dalam sub kriteria penilaian. Sub kriteria penilaian yang mempunyai arti penting adalah yang memiliki nilai lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata. Tolak ukur penilaian yang dipergunakan adalah rata-rata penelitian (penilaian peneliti dan rata-rata nara sumber).

Hasil penilaian rata-rata penelitian terhadap manfaat dan beban keempat alternatif pembinaan dan pengelolaan Kapet Bima pada sub kriteria penilaian adalah seperti terlihat pada *Lampiran F* dan pada tabel dibawah ini:

#### **Manfaat pada Sub Kriteria**

1. Manfaat pada Sub Kriteria Kesejahteraan Rakyat.

**TABEL IV.20  
MANFAAT PADA SUB KRITERIA  
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,0878
ALTERNATIF 2	0,1460
ALTERNATIF 3	0,4660
ALTERNATIF 4	0,2819

*Sumber: Hasil Analisa, 2005*

Dari hasil analisa pada tabel di atas terlihat bahwa pada sub kriteria kesejahteraan rakyat alternatif 3 memiliki nilai tertinggi yaitu 0,4660 berarti regionalisasi desentralistik lebih dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat dibandingkan alternatif yang lainnya.

## 2. Manfaat pada Sub Kriteria Partisipasi Masyarakat.

**TABEL IV.21**  
**MANFAAT PADA SUB KRITERIA**  
**PERTISIPASI MASYARAKAT**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,0293
ALTERNATIF 2	0,0231
ALTERNATIF 3	0,0818
ALTERNATIF 4	0,0298

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Dari hasil analisis manfaat tiap alternatif pada sub kriteria partisipasi masyarakat terlihat bahwa untuk partisipasi masyarakat alternatif 3 yaitu regionalisasi desentralistik memiliki nilai manfaat yang terbesar dibanding dengan alternatif lainnya yaitu 0,0818. hal ini berarti bahwa pembinaan dan pengelolaan oleh pemerintah daerah lebih dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dibandingkan dengan ketiga alternatif lainnya.

## 3. Manfaat pada Sub Kriteria Pemerataan.

**TABEL IV.22**  
**MANFAAT PADA SUB KRITERIA PEMERATAAN**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,0398
ALTERNATIF 2	0,0613
ALTERNATIF 3	0,2488
ALTERNATIF 4	0,1703

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Untuk sub kriteria pemerataan alternatif 3 yaitu regionalisasi desentralistik lebih bisa menjamin terjadinya pemerataan pembangun dibandingkan dengan

ketiga alternatif lainnya hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai manfaat yaitu 0,2488.

4. Manfaat pada Sub Kriteria Investasi.

**TABEL IV.23**  
**MANFAAT PADA SUB KRITERIA INVESTASI**

ALTERNATIF	RATA
	RATA
ALTERNATIF 1	0,0053
ALTERNATIF 2	0,0077
ALTERNATIF 3	0,0245
ALTERNATIF 4	0,0357

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Pada sub kriteria investasi alternatif 4 yaitu pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga (konsultan) lebih dapat menjamin masuknya investasi ke dalam Kapet hal ini ditunjukkan dengan nilai manfaat terbesar dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya yaitu 0,0357.

5. Manfaat pada Sub Kriteria Pertumbuhan Ekonomi.

**TABEL IV.24**  
**MANFAAT PADA SUB KRITERIA**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI**

ALTERNATIF	RATA
	RATA
ALTERNATIF 1	0,0092
ALTERNATIF 2	0,0121
ALTERNATIF 3	0,0464
ALTERNATIF 4	0,0463

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Pada sub kriteria pertumbuhan ekonomi alternatif 3 yaitu regionalisasi desentralistik lebih memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding dengan 3 alternatif lainnya dengan besarnya nilai manfaat yaitu sebesar 0,0464.

## 6. Manfaat pada Sub Kriteria Akuntabilitas.

**TABEL IV.25**  
**MANFAAT PADA SUB KRITERIA**  
**AKUNTABILITAS**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,0040
ALTERNATIF 2	0,0073
ALTERNATIF 3	0,0193
ALTERNATIF 4	0,0328

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Pada sub kriteria akuntabilitas alternatif 4 memiliki nilai yang terbesar dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya yaitu sebesar 0,0328 hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga Lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya.

## 7. Manfaat pada Sub Kriteria Efektif dan Efisiensi.

**TABEL IV.26**  
**MANFAAT PADA SUB KRITERIA**  
**EFEKTIF DAN EFISIENSI**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,0033
ALTERNATIF 2	0,0028
ALTERNATIF 3	0,0108
ALTERNATIF 4	0,0156

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Pada sub kriteria efektif dan efisiensi alternatif 4 memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan 3 alternatif lainnya yaitu sebesar 0,0156 hal ini menunjukkan bahwa alternatif 4 yaitu pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga (konsultan) lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

## 8. Manfaat pada Sub Kriteria Inovasi.

**TABEL IV.27**  
**MANFAAT PADA SUB KRITERIA**  
**INOVASI**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,0013
ALTERNATIF 2	0,0014
ALTERNATIF 3	0,0056
ALTERNATIF 4	0,0080

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Pada sub kriteria inovasi alternatif 4 memiliki nilai manfaat lebih besar dibandingkan 3 alternatif lainnya yaitu sebesar 0,0080 hal ini menunjukkan bahwa alternatif 4 yaitu pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga (konsultan) lebih memiliki inovasi dan motivasi bagi personil (karyawan) dibanding dengan 3 alternatif lainnya.

## 9. Manfaat pada Sub Kriteria Profesionalisme.

**TABEL IV.28**  
**MANFAAT PADA SUB KRITERIA**  
**PROFESIONALISME**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,0022
ALTERNATIF 2	0,0025
ALTERNATIF 3	0,0033
ALTERNATIF 4	0,0088

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Pada sub kriteria profesionalisme alternatif 4 memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya yaitu sebesar 0,0088 hal ini menunjukkan bahwa alternatif 4 yaitu pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga (konsultan) memiliki profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan 3 alternatif lainnya.

10. Manfaat pada Sub Kriteria Koordinasi.

**TABEL IV.29**  
**MANFAAT PADA SUB KRITERIA**  
**KOORDINASI**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,0018
ALTERNATIF 2	0,0014
ALTERNATIF 3	0,0044
ALTERNATIF 4	0,0048

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Pada sub kriteria koordinasi alternatif 4 juga memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan 3 alternatif lainnya yaitu sebesar 0,0048 hal ini menunjukkan bahwa alternatif 4 yaitu pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga (konsultan) lebih mudah dalam aspek koordinasi dibandingkan 3 alternatif lainnya.

**Beban pada Sub Kriteria**

Beban untuk Sub Kriteria berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan seperti yang terlihat dibawah ini :

1. Beban pada Sub Kriteria Disparitas

**TABEL IV.30**  
**BEBAN PADA SUB KRITERIA DISPARITAS**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,4768
ALTERNATIF 2	0,2941
ALTERNATIF 3	0,0982
ALTERNATIF 4	0,1723

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Pada sub kriteria disparitas beban terbesar dimiliki oleh alternatif 1 dengan nilai sebesar 0,4768 hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya regionalisasi sentralistik dapat menyebabkan disparitas antar daerah lebih besar dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya, sedangkan beban terkecil terdapat

pada alternatif 3 dengan besar 0,0982 hal ini menunjukkan bahwa alternatif 3 yaitu regionalisasi desentralistik dapat menyebabkan disparitas antara daerah lebih kecil dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya.

2. Beban pada Sub Kriteria Sentimen Kedaerahan.

**TABEL IV.31**  
**BEBAN PADA SUB KRITERIA**  
**SENTIMEN KEDAERAHAN**

ALTERNATIF	RATA
	RATA
ALTERNATIF 1	0,1013
ALTERNATIF 2	0,0620
ALTERNATIF 3	0,0245
ALTERNATIF 4	0,0247

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Pada sub kriteria sentimen kedaerahaan alternatif 1 memiliki nilai terbesar yaitu 0,1013 dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya yaitu sebesar 0,1013 hal ini menunjukkan bahwa regionalisasi sentralistik dapat menimbulkan sentimen kedaerahan yng lebih besar dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya, sedangkan alternatif 3 memiliki nilai yang terkecil yaitu sebesar 0,0245 hal ini menunjukkan bahwa regionalisasi desentralistik dapat menyebabkan timbulnya sentimen kedaerahan lebih kecil dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya.

3. Beban pada Sub Kriteria Beban Penduduk Lokal.

**TABEL IV.32**  
**BEBAN PADA SUB KRITERIA**  
**BEBAN PENDUDUK LOKAL**

ALTERNATIF	RATA
	RATA
ALTERNATIF 1	0,0333
ALTERNATIF 2	0,0539
ALTERNATIF 3	0,1244
ALTERNATIF 4	0,2870

*Sumber: Hasil Analisa,2005*



Pada sub kriteria beban penduduk lokal dengan adanya pembinaan dan pengelolaan Kapet ini alternatif 4 memiliki nilai terbesar yaitu 0,2870 hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga (konsultan) memberi beban yang lebih besar kepada penduduk dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya, sedangkan alternatif 1 memiliki nilai terkecil yaitu 0,0333 hal ini menunjukkan bahwa regionalisasi sentralistik memberikan beban terkecil kepada penduduk dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya.

#### 4. Beban pada Sub Kriteria Pembiayaan.

**TABEL IV.33**  
**BEBAN PADA SUB KRITERIA**  
**PEMBIAYAAN**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,0069
ALTERNATIF 2	0,0103
ALTERNATIF 3	0,0246
ALTERNATIF 4	0,0550

*Sumber: Hasil Analisa, 2005*

Pada sub kriteria pembiayaan dengan adanya pembinaan dan pengelolaan Kapet alternatif 4 memiliki nilai terbesar yaitu 0,0550 hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga (konsultan) membutuhkan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya. Sedangkan alternatif 1 memiliki nilai terkecil hal ini menunjukkan bahwa menurut narasumber bahwa regionalisasi sentralistik membutuhkan biaya lebih kecil dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya.

## 5. Beban pada Sub Kriteria Regulasi.

**TABEL IV.34**  
**BEBAN PADA SUB KRITERIA**  
**REGULASI**

ALTERNATIF	RATA
	RATA
ALTERNATIF 1	0,0105
ALTERNATIF 2	0,0159
ALTERNATIF 3	0,0419
ALTERNATIF 4	0,0376

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Pada sub kriteria regulasi atau penyusunan aturan dan konstitusi alternatif 3 memiliki nilai terbesar yaitu 0,0419 hal ini menunjukkan bahwa regionalisasi desentralistik memiliki kesulitan yang lebih besar didalam menyusun aturan dibandingkan 3 alternatif lainnya, sedangkan alternatif 1 memiliki nilai terkecil yaitu 0,0105 hal ini menunjukkan bahwa regionalisasi sentralistik memiliki kemudahan menyusun aturan dan konstitusi dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya.

## 6. Beban pada Sub Kriteria Kompetensi Staf.

**TABEL IV.35**  
**BEBAN PADA SUB KRITERIA**  
**KOMPETENSI STAF**

ALTERNATIF	RATA
	RATA
ALTERNATIF 1	0,0053
ALTERNATIF 2	0,0091
ALTERNATIF 3	0,0196
ALTERNATIF 4	0,0253

*Sumber: Hasil Analisa,2005*

Pembinaan dan pengelolaan Kapet membutuhkan staf yang kompeten. Pada sub kriteria kompetensi staf alternatif 4 memiliki nilai terbesar hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga (konsultan)

memiliki beban yang lebih besar dalam menyediakan staf yang kompeten dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya sedangkan alternatif 1 memiliki nilai terkecil yaitu 0,0053 hal ini menunjukkan bahwa regionalisasi sentralistik memiliki beban yang lebih kecil dalam peyediaan staf yang kompeten dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya.

7. Beban pada Sub Kriteria Fasilitas.

**TABEL IV.36**  
**BEBAN PADA SUB KRITERIA**  
**FASILITAS**

ALTERNATIF	RATA RATA
ALTERNATIF 1	0,0016
ALTERNATIF 2	0,0020
ALTERNATIF 3	0,0059
ALTERNATIF 4	0,0086

*Sumber: Hasil Analisa, 2005*

Dalam pembinaan dan pengelolaan Kapet juga diperlukan fasilitas yang menunjang seperti gedung perkantoran, peralatan kantor dan sebagainya. Pada sub kriteria fasilitas alternatif 4 memiliki nilai terbesar yaitu 0,0086 hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga (konsultan) memiliki beban yang lebih besar dalam penyediaan fasilitas dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya, sedangkan alternatif 1 memiliki nilai terkecil hal ini menunjukkan bahwa regionalisasi sentralistik memiliki beban yang lebih kecil dalam penyediaan fasilitas dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya.

**Alternatif terpilih**

Dari seluruh penilaian yang telah dilakukan di atas maka alternatif terbaik untuk pembinaan dan pengelolaan Kapet Bima adalah alternatif 3 yaitu

regionalisasi desentralistik karena mempunyai nilai perbandingan manfaat dan beban terbesar dalam 2 kriteria dan memiliki nilai perbandingan manfaat dan beban yang terbesar untuk rata-rata semua kriteria seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.37**  
**MANFAAT DAN BEBAN ALTERNATIF TERPILIH**

KRITERIA	Manfaat	Beban	Manfaat/ Beban
PEMERINTAHAN (ORGANISASI)	0,0433	0,0674	0,6449
PEMBANGUNAN	0,3197	0,1490	2,2069
SOSIAL KEMASYARAKATAN	0,5478	0,1227	4,5408
RATA-RATA	0,4253	0,1766	2,4740

*Sumber: Hasil Analisa, 2005*

Ratio manfaat dan beban terbesar dari alternatif terpilih yaitu pada kriteria sosial kemasyarakatan, pembinaan dan pengelolaan oleh pemerintah daerah adalah memungkinkan terjadinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya bersifat *top down* tetapi *bottom up* selain itu manfaat lainnya adalah lebih memungkinkan terjadinya Peningkatan kesejahteraan rakyat karena dengan adanya model pembangunan yang bersifat *bottom up* diharapkan hasil-hasil pembangunan yang tepat seperti yang dibutuhkan oleh rakyat.

Ratio manfaat dan beban selanjutnya yaitu dalam kriteria pembangunan pembinaan dan pengelolaan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi yang masuk kedalam daerah dan dengan meningkatnya nilai investasi ini dapat menyebabkan meningkatnya pertumbuhan

ekonomi daerah. Selain manfaat diatas regionalisasi desentralistik juga diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dalam daerah.

Dalam kriteria organisasi ratio manfaat dan beban pembinaan dan pengelolaan oleh pemerintah daerah nilainya sangat kecil yaitu dibawah 1 hal ini menunjukkan bahwa dalam kriteria organisasi yaitu aspek-aspek akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, profesionalisme, inovasi dan motivasi personil serta koordinasi regionalisasi desentralistik masih sangat lemah, hal ini dapat diatasi dengan melakukan manajemen seperti pihak ketiga (konsultan) karena dalam kriteria organisasi pembinaan dan pengelolaan oleh pihak ketiga (konsultan) memiliki ratio manfaat dan beban yang terbesar dibandingkan semua alternatif lainnya.

#### **Alternatif Terpilih dibandingkan *Status Quo***

Asumsi yang digunakan agar dapat membandingkan antara alternatif terpilih dan *status quo* adalah pembinaan dan pengelolaan Kapet memberikan manfaat yang sama dengan beban dengan kata lain ratio manfaat dan beban pembinaan dan pengelolaan Kapet adalah 1. berdasarkan asumsi ini tolak ukur yang digunakan untuk perbandingan adalah:

- Apabila ratio manfaat dan beban dari alternatif terpilih lebih besar dari satu ( $>1$ ), maka alternatif terpilih lebih baik dari *Status Quo*.
- Apabila ratio manfaat dan beban dari alternatif terpilih lebih kecil dari satu ( $<1$ ) maka alternatif terpilih tidak lebih baik dari *Status Quo*

- Apabila ratio manfaat dan beban dari alternatif terpilih sama dengan satu ( $=1$ ) maka alternatif terpilih sama dengan *Status Quo*

Berdasarkan Tabel IV. 37 diatas terlihat bahwa kemampuan alternatif terpilih yaitu regionalisasi desentralistik adalah sebagai berikut

- Pada kriteria pemerintahan (organisasi) ratio manfaat dan beban adalah  $0,6449 < 1$  hal ini berarti bahwa pada kriteria pemerintahan (organisasi) alternatif terpilih tidak lebih baik dari pada *Status Quo* hal ini hendaknya menjadi perhatian
- Pada kriteria pembangunan ratio manfaat dan beban adalah  $2,2069 > 1$  hal ini berarti pada kriteria pembangunan alternatif terpilih lebih baik dari pada *Status Quo*
- Pada kriteria sosial kemasyarakatan ratio manfaat dan beban adalah  $4,5408 > 1$  hal ini berarti dalam kriteria sosial kemasyarakatan alternatif terpilih lebih baik dari pada *Status Quo*

### **Sintesa**

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan melalui Input-Proses-Output seperti yang terlihat pada kerangka pikir pembahasan maka seluruh hasil analisis dapat diuraikan seperti yang terlihat pada Tabel IV.38 dibawah ini :

**TABEL IV.38**  
**SINTESA HASIL PENELITIAN**

NO	INPUT	PROSES	OUTPUT
1	<p><b>INDIKATOR KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendapatan (pendapatan perkapita)</li> <li>• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</li> <li>• Perdagangan</li> <li>• Investasi</li> <li>• Ekspor</li> <li>• Pendidikan : tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan.</li> <li>• Kesehatan : rata-rata hari sakit, fasilitas kesehatan</li> <li>• Perumahan : sumber air bersih, listrik, sanitasi, dan mutu rumah tinggal</li> <li>• Angkatan kerja : partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, status pekerjaan</li> <li>• Keluarga berencana dan fertilitas : penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, penggunaan alat kontrasepsi</li> <li>• Kriminalitas : jumlah pencurian pertahun, jumlah pembunuhan pertahun, jumlah perkosaan pertahun</li> <li>• Perjalanan wisata : frekuensi perjalanan wisata pertahun</li> <li>• Akses ke media masa : jumlah surat kabar, jumlah radio, jumlah televisi</li> <li>• Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>• Konsumsi protein hewani perkapita</li> <li>• Jumlah penduduk di kota- kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih</li> <li>• Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi</li> <li>• Persentase PDRB yang berasal dari industri pengolahan</li> <li>• Konsumsi energi perkapita</li> <li>• Konsumsi listrik perkapita</li> <li>• Konsumsi baja perkapita</li> </ul> <p><b>KRITERIA INDIKATOR KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bermakna (<i>Meaningful</i>), secara signifikan dan langsung berkaitan dengan misi, sasaran dan tujuan.</li> <li>▪ Sahih (<i>Valid</i>) mewakili apa yang sedang diukur</li> <li>▪ Dapat dipercaya (<i>credible</i>) berdasarkan pada data yang akurat dan dapat dipercaya.</li> <li>▪ Dapat diperbandingkan (<i>comparable</i>) berguna untuk perbandingan dengan data lain sepanjang waktu.</li> <li>▪ Mudah (<i>simple</i>) mudah menghitung dan menginterpretasikan.</li> <li>▪ Berguna (<i>Useful</i>) secara akurat mencakup kemajuan sepanjang waktu.</li> </ul>	Identifikasi Indikator Kinerja melalui Metode Skoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendapatan Perkapita Masyarakat</li> <li>▪ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</li> <li>▪ Nilai Investasi</li> <li>▪ Ekspor</li> <li>▪ Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>▪ Persentase PDRB dari Industri Pengolahan</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisa, 2005

TABEL IV.38 Lanjutan

NO	INPUT	PROSES	OUTPUT
2	<b>INDIKATOR KINERJA HASIL SKORING (TAHUN 1996-2002)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendapatan Perkapita Masyarakat</li> <li>▪ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</li> <li>▪ Nilai Investasi</li> <li>▪ Ekspor</li> <li>▪ Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>▪ Persentase PDRB dari Industri Pengolahan</li> </ul>	Penilaian Kinerja melalui Metode Skoring dengan cara membandingkan dengan indikator nasional bila nilai indikator diatas nilai indikator nasional maka diberi skor 1 sedangkan bila berada di bawah diberi skor 0	Dari hasil penilaian indikator kinerja terdapat lebih dari 50% yaitu sebanyak.....indikator kinerja berada dibawah indikator nasional. Hal ini menunjukkan kinerja Kapet BURUK
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PDRB Perkapita Kabupaten tahun 1996-2004</li> <li>▪ PDRB perkapita Propinsi NTB Tahun 1996-2004</li> <li>▪ Jumlah Penduduk Kabupaten Tahun 1996-2004</li> <li>▪ Jumlah penduduk Propinsi NTB Tahun 1996-2004</li> </ul>	Identifikasi Ketimpangan antar Kabupaten dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Indeks Williamson dan Indeks Entrophy Theil	Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa dalam kurun waktu 1996-2002 ketimpangan antar kabuapten dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat semakin besar hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kapet BURUK

Sumber: Hasil Analisa, 2005



TABEL IV.38 Lanjutan

NO	INPUT	PROSES	OUTPUT
4	<p><b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri-industri yang terdapat dalam Kapet tidak cepat berkembang (bukan <i>Leading Industri</i>).</li> <li>▪ <i>Spread Effect</i> yang dihasilkan dan yang diharapkan mampu untuk mengembangkan daerah sekitarnya ternyata tidak pernah terwujud dan hanya sedikit sekali menyerap tenaga kerja.</li> <li>▪ Industri-industri yang berada dalam pusat-pusat pertumbuhan itu tidak mempunyai <i>linkage</i> dengan sektor wilayah sekitarnya.</li> <li>▪ Terjadinya krisis multidimensi yang tidak memungkinkan tumbuhnya investasi baru di Indonesia.</li> <li>▪ Kemampuan masing-masing Kapet (sektor unggulan dan Sumber Daya sumber daya manusia berbeda-beda).</li> <li>▪ Lokasi yang ditetapkan sebagai Kapet kurang memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> <li>▪ Dukungan sektor dalam menyediakan intensif dalam menunjang terwujudnya pelayanan langsung belum optimal.</li> <li>▪ Pengaruh paradigma <i>Top Down</i> yang masih melekat pada konsep Kapet yang hingga kini diterapkan. Dominasi partisipasi dan kontribusi pusat, khususnya yang menyangkut aspek pendanaan proyek melalui APBN semakin menguatkan posisi tawar pusat dalam mengaplikasikan pandangan- pandangannya pada setiap kawasan Kapet.</li> <li>▪ Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi sebatas berkedudukan sebagai pengemban tugas dekonsentrasi dan bukannya representasi kabupaten/ Kota (Dekonsentralistik).</li> <li>▪ Kurangnya perlibatan dan partisipasi nyata Kabupaten/ Kota beserta segenap komponen pembangunannya.</li> <li>▪ Terjadinya tumpang tindih pengawasan yang cenderung inefektif dan inefisien</li> <li>▪ Proses regionalisasi yang desentralistik belum sungguh-sungguh diterapkan di Kapet.</li> <li>▪ Kurangnya atau tidak adanya keberpihakan (<i>affirmative actions</i>) dari pemerintah pusat bersama lembaga- lembaga dibawahnya (Departemen/ Instansi) dalam mendukung pengembangan Kapet.</li> <li>▪ Tidak konsistennya kebijakan mengenai pengembangan Kapet</li> <li>▪ Tidak adanya koordinasi maupun dukungan dari departemen/ instansi terkait.</li> <li>▪ Terjadinya <i>missmatch</i> antara kriteria dan pelaksanaan seleksi kawasan.</li> <li>▪ Terciptanya kompetisi yang tidak sehat. Pemberian intensif investasi yang dimkasudkan untuk menarik investor dalam prakteknya lebih memperkesankan pemerlakuan ketidakadilan antar wilayah yang berdekatan.</li> </ul>	<p>Analisis Faktor untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet di Kabupaten Bima antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinerja Lembaga BP Kapet yang belum optimal dalam pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima)</li> <li>▪ Kabupaten Bima tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan</li> <li>▪ Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung pengembangan Kapet</li> <li>▪ Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam)</li> <li>▪ Manajemen Pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisa, 2005

TABEL IV.38 Lanjutan

NO	INPUT	PROSES	OUTPUT
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan infrastruktur, SDM, Komoditi Unggulan dan kerjasama regional yang belum proposional.</li> <li>▪ Rendahnya akuntabilitas lembaga yang terlibat. BP Kapet dan personil yang bekerja didalamnya telah dibentuk namun sebagaian job deskripsinya masih sangat kabur.</li> <li>▪ Pemisahan kewenangan bidang- bidang yang menjadi urusan BP dan Pemda masih belum dilakukan secara jelas demikian juga dengan pemisahan urusan yang ditangani sektor atau instansi vertikal di daerah.</li> <li>▪ Masih dipegangnya beberapa bentuk ijin operasi oleh instansi sektor di pusat.</li> <li>▪ Masih perlu ditingkatkannya responsivness BP Kapet maupun pemerintah yang berwenang dalam menghadapi berbagai keluhan investor secara kongkrit, seperti memberikan jaminan keamanan berusaha, meberikan informasi peluang bisnis yang obyektif dan memadai, memangkas jalur- jalur ilegal perijinan dan menciptakan perencanaan wilayah yang terintegrasidan kondusif bagi berbagai kegiatan usaha.</li> <li>▪ Tingkat pendidikan SDM terbatas.</li> <li>▪ Minat Investor rendah, terbatas disektor peternakan dan budidaya mutiara.</li> <li>▪ Difersifikasi usaha umumnya sangat kecil dan kondisi iklim (curah hujan dan tanah) sehingga mengakibatkan posisi tawar terhadap komoditi yang dihasilkan menjadi lemah karena tidak ada alternatif lain yang dapat ditawarkan untuk memenuhi adanya desakan kebutuhan hidup.</li> <li>▪ Promosi investasi yang dilakukan masih sangat kurang sekali.</li> </ul>	<p>Analisis Faktor untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kinerja KAPET di Kabupaten Bima antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinerja Lembaga BP Kapet yang belum optimal dalam pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima)</li> <li>▪ Kabupaten Bima tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan</li> <li>▪ Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung pengembangan Kapet Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam)</li> <li>▪ Manajemen Pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisa,2005

TABEL IV.38 Lanjutan

NO	INPUT	PROSES	OUTPUT
5	<p><u>Faktor Eksternal</u></p> <p><b>Tantangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja BP Kapet yang belum optimal dalam mendukung pengembangan KAPET Bima</li> <li>• Manajemen Pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat</li> </ul> <p><b>Peluang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi geografis dalam wilayah indonesia maupun didalam wilayah asia pasifik serta antar wilayah ais (terutama asia timur dan tenggara) Hal ini disebabkan sebagian besar kawasan KTI adalah merupakan wilayah kelautan yang menghubungkan antara KBI dengan wilayah pasiifik serta wilayah asia lainnya. Sehingga berpeluang untuk menarik kegiatan untuk berlokasi di KTI. Hubungan perdagangan antara australia dan selandia baru dengan negara- negara Asia Timur khususnya jepang selalu memanfaatkan perairan KTI</li> <li>• Keputusan Presidan No. 150 tahun 2000 tentang Kapet</li> <li>• PP Nomor 47 tahun 1997 tentang perlakuan perpajakan di Kapet</li> <li>• PP Nomor 20 tahun 2000 tentang Perpajakan KAPET</li> <li>• PP Nomor 147 tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kapet</li> </ul> <p><u>Faktor Internal</u></p> <p><b>Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam)</li> <li>• Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung pengembangan Kapet</li> <li>• Kabupaten Bima tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan</li> </ul>	Analisis SWOT	<p><b>PRIORITAS STRATEGI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Reformasi Manajemen Pengelolaan Kapet, tidak berhasilnya Kapet selama ini antara lain disebabkan oleh pengelolaan Kapet yang selama ini masih didominasi oleh Pemerintah Pusat karena itu perlu dilakukan perombakan dalam manajemen Kapet</li> <li>9. Melakukan Promosi mengenai peluang-peluang investasi dalam Kapet melalui media cetak dan elektronik untuk dapat memasarkan potensi-potensi Kapet</li> <li>10. Peningkatan kualitas kinerja sarana dan prasarana wilayah yang menunjang kegiatan produksi seperti transportasi, irigasi, komunikasi dan listrik</li> <li>11. Optimalisasi kinerja BP Kapet, peningkatan kinerja dilakukan dengan cara melakukan evaluasi secara periodik mengenai kinerja Kapet</li> </ol>

Sumber: Hasil Analisa,2005

TABEL IV.38 Lanjutan

NO	INPUT	PROSES	OUTPUT
5	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian/ perkebunan Dalam sektor pertanian komoditas yang diunggulkan adlah bawang merah sedngkan dari sektor perkebunan komoditas yang dapat diunggulkan antara lain adalah kopi dengan luas lahan sebesar 8.771 ha baru dimanfaatkan sebesar 7.142 ha dan jambu mete dengan lahan seluas 14.375 ha yang telah dimanfaatkan sebesar 6.004 ha</li> <li>• Pertambangan Potensi Komoditas yang cukup menonjol dari sektor pertambangan di Kabupaten Bima adalah Marmer. Potensi marmer di Kabupaten Bima ini cukup murah dan mudah untuk dikembangkan Ada tujuh lokasi bahan galian marmer yang cukup potensial untuk dikembangkan dan ada yang sudah operasional dengan lokasi strategis dari jalur transportasi.</li> <li>• Perindustrian Terdapat potensi untuk mendirikan industri garam rakyat, mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bima adalah wilayah pesisir pantai.</li> <li>• Perikanan Wilayah kabupaten Bima sebagian besar adalah perairan karena itu potensi perikanan di Kabupaten Bima sangat besar antara lain adalah Mutiara, Rumput laut, Udang Windu dan Ikan Tuna</li> <li>• Pariwisata Di Kabupaten Bima terdapat beberapa wisata pantai yang sangat potensial untuk dikembagkan antara lain Pantai Rontu yang ombaknya dapat dipakai untuk berselancar</li> </ul>		<p>12.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, terutama yang memiliki jiwa wirausaha untuk mendukung pengembangan Kapet</p> <p>13.Peningkatan Koordinasi antara BP. Kapet dengan Pemerintah Daerah setempat agar saling mendukung dalam upaya pengembangan wilayah.</p> <p>14.Peningkatan kualitas komoditas unggulan untuk menaikkan posisi tawar komoditas unggulan wilayah agar investor berminat untuk menanamkan modalnya</p> <p>15.Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan Kapet</p>

Sumber: Hasil Analisa,2005

**TABEL IV.38 Lanjutan**

NO	INPUT	PROSES	OUTPUT
6	Hirarki Manfaat dan Beban Pengelolaan Kapet (Terlampir)	Dilakukan Pemilihan alternatif Pengelolaan Kapet Bima melalui Proses Hirarki Analitik	Dari hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil Alternatif Pengelolaan yang terpilih adalah Regionalisasi Desentralistik dengan Rasio Manfaat dan Beban terbesar dibandingkan alternatif lainnya yaitu 2,2470

Sumber: Hasil Analisa, 2006

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Uraian dalam Bab V ini merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang disusun dalam tiga sub bab yaitu : Kesimpulan dan Rekomendasi, dalam sub bab Kesimpulan diuraikan tentang indikator kinerja yang dipakai dalam penilaian kinerja Kapet yang didapatkan menurut pendapat nara sumber, kinerja Kapet hasil penilaian yang telah dilakukan, faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet berdasarkan hasil analisis faktor, Dalam sub bab rekomendasi dikemukakan mengenai strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan Kapet yang didapatkan melalui analisis SWOT dan alternatif pembinaan dan pengelolaan Kapet Bima yang didapatkan melalui Proses Hirarki Analitik. Dan beberapa temuan dari penelitian yang penting untuk diperhatikan.

#### **Kesimpulan**

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh BP. Kapet tidak mencapai hasil seperti yang diinginkan. Seperti terlihat dari hasil penilaian indikator kinerja yang telah dilakukan. Sehingga dapat dikatakan Visi dan Misi Kapet Bima selama kurun waktu (1996-2003) belum tercapai. dan proses *Trickle Down Effect* yang diharapkan terjadi tidak terjadi yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai indeks disparitas (ketimpangan) antar kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja peran Kapet dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Bima **TIDAK BERHASIL**. Buruknya kinerja Kapet di Kabupaten Bima antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Kinerja lembaga BP Kapet yang belum optimal dalam pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima)
- Kapet Bima (Kabupaten Bima ) tidak tepat sebagai pusat pertumbuhan.
- Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam)
- Kurangnya keberpihakan dari pemerintah kabupaten/ kota dalam mendukung pengembangan Kapet
- Manajemen pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh pemerintah pusat

### **Rekomendasi**

Bila dilihat dari *missmatch* yang terjadi antara kriteria Kapet dengan konsep teori pusat pertumbuhan maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah menambah wilayah Kapet dengan wilayah yang memiliki *Leading Industri* dan *Linkages* dengan wilayah sekitarnya yaitu Kabupaten Sumbawa (Industri Emas/ PT. New Mount Nusa Tenggara). Juga penelitian lebih dalam mengenai pemilihan lokasi Kapet.

Sebagai arahan bagi pengembangan Kapet selanjutnya prioritas strategi yang harus dilakukan adalah

1. Reformasi manajemen Kapet, harus segera dilakukan reformasi dalam manajemen Kapet agar dapat melakukan kinerja yang lebih optimal.
2. Melakukan promosi investasi mengenai Kapet untuk dapat menarik investor agar mau berinvestasi didalam Kapet.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah, sarana dan prasarana wilayah adalah salah satu faktor penting yang mendukung pemasaran dalam

wilayah dan juga merupakan daya tarik bagi investor untuk berinvestasi dalam suatu wilayah.

4. Optimalisasi kinerja BP Kapet, perlu dilakukan peningkatan kinerja dengan jalan melakukan evaluasi kinerja dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.
5. Peningkatan kualitas SDM agar dapat mendukung strategi-strategi yang lainnya perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan mengelola Kapet .
6. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah/ pemerintah kota, koordinasi perlu untuk dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih program yang dilakukan oleh Kapet dan pemerintah daerah sehingga dapat saling mendukung.
7. Peningkatan kualitas komoditas unggulan perlu dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan yang dimiliki dalam Kapet agar investor tertarik untuk berinvestasi dalam Kapet
8. Peningkatan dan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Kapet perlu untuk dilakukan agar tercipta suatu kondisi yang efektif dan efisien terutama dalam penggunaan anggaran.

Selain strategi yang telah disebutkan diatas untuk pengembangan lebih lanjut perlu dilakukan reformasi dalam manajemen pengelolaan Kapet yang dilakukan melalui Proses Hirarki Analitik dengan alternatif terpilih adalah **Regionalisasi Desentralistik**, yang selanjutnya akan dibentuk *Regional Management* sebagai lembaga pengelolanya mengingat pendekatan pengembangan wilayah yang dilakukan selama ini melalui pendekatan *top down* maka direkomendasikan untuk merubah pendekatan yang dilakukan dalam



pengembangan wilayah menjadi *bottom up* melalui proses **Regionalisasi Desentralistik**. Kerjasama yang akan dilakukan merupakan inisiatif dari masing-masing daerah yang bersangkutan.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai *Regionalisasi Desentralistik* dan *Regional Management* dalam pengelolaan Kapet direkomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai *Regionalisasi Desentralistik* dan *Regional Management* dalam Pengelolaan Kapet.

Mengingat berbagai macam kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini direkomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Melakukan identifikasi faktor eksternal dan internal berdasarkan persepsi stakeholder selaku narasumber yang benar-benar mengerti akan permasalahan yang sedang dihadapi.
- Untuk penelitian dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik pada saat pengisian kuisioner peneliti nara sumber (responden) harus didampingi oleh peneliti agar didapatkan Indeks Konsistensi  $\leq 0,1$  . Dalam penelitian ini responden (nara sumber) yang tidak didampingi cenderung melakukan penilaian yang tidak memenuhi syarat konsistensi sehingga perlu dilakukan perubahan.
- Melakukan penelitian lebih lanjut dengan ruang lingkup wilayah yang lebih besar termasuk Kabupaten Dompu dan Kota Bima.
- Melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan narasumber dari pemerintah pusat sebagai penggagas utama Kapet
- Memperhatikan keakuratan data yang dipakai dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, Benyamin, 2005, *Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing*, IAP Jateng
- Adnan, Muhammad, 2001, *Otonomi Daerah Kaya Teori Lemah Praktek*, CL. GAPPS Diponegoro University, Semarang
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Aziz, Iwan Jaya, 1994, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Dunn, William. N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press
- Fitriyah, 2001, *Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, CL. GAPPS Diponegoro University, Semarang
- Garpesz, Vincent, 2003, *Metode Analisis untuk Peningkatan Kualitas*, PT. Gramedia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Perencanaan Strategik untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik*, Gramedia, Jakarta
- Glasson, John, 1978, *An Introduction To Regional Planning Concept Theory and Practice*, Open University Press Hutchinson and Co Publisher Ltd, London
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kukinski, Antoni. R, 1972, *Growth Pole and Growth Centres in Regional Planning*, Mouton Paris The Hague, Netherland
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta,
- Marimin, 2004, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*, Grasindo, Jakarta
- Moekijat, 1995, *Analisis Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung

- Moenir, HAS, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nasution, S, 2004, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nugroho, Iwan, Rochmin Dahuri, 2004, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta
- Oppenheim, Norbert, 1980, *Applied Models in Urban and Regional Analysis*, Prentice Hall Inc Englewood Cliffs, New York
- Rankin, Peter Dunn, 1983, *Scaling Method*, Lawrence Erlbaum Associates Publisher, London
- Rangkuti, Fredy, 2004, *Analisis SWOT Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia, Jakarta,
- Rasul Syahrudin, 2004, *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Konsep dan Prinsip Dasar*, UAD Press, Yogyakarta
- Riyadi, Dodi Slamet, 2002, *Pengembangan Wilayah Teori dan Konsep Dasar*, BPPT, Jakarta
- Sawicki, David S, Carl. V patton, 1986, *Basic Method of Policy Analysis and Planning*, Prentice Hall, London
- Saaty, Thomas L, 1993, *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin : Proses untuk pengambilan Keputusan pada Situasi Kompleks*, Alih Bahasa Setiono Liani, Cetakan Kedua, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
- Tangkilasan, Hessel Nogi, 2004, *Analisis Kebijakan Publik Kontemporer*, Lukman Offset, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta
- Tarigan, Robinson, 2004, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Temple, Marion, 1994, *Regional Economic*, St. Martin Press, New York
- Triutomo, Sugeng, 2001, *Pengembangan Wilayah Melalui Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu*, BPPT, Jakarta
- Yuwono, Teguh, 2001, *Paradigma baru Manajemen Pemerintah Daerah*, CL. GAPPS Diponegoro University, Semarang

- Mawardi, Moch, 1998, *Studi Alternatif Bnetuk Lembaga Pemerintahan Kota Untuk Pembinaan dan Pengelolaan Kota Raba- Bima*, Tesis Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung
- Tridjoko, 2005, *Evaluasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tasik Agung Dalam Upaya Penataan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Rembang*, Tesis Magister Sumber Daya Pantai, Universitas Diponegoro, Semarang

### **ARTIKEL**

- Poerwanto, Heri, 2004, *Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Harapan dan Kenyataan*, Institut Pertanian Bogor, [Tumotou.net/pps702\\_82034/e\\_d\\_heripoerwanto.pdf](http://Tumotou.net/pps702_82034/e_d_heripoerwanto.pdf).supplemental result
- Setiono, Djoko, 2005, *Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Harapan dan Kenyataan*, Buletin Kawasan, [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)
- Susanto, Roni Dwi, 2004, *Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Tips Memilih Indikator Kinerja*, Majalah Perencanaan, Edisi Juni 2004, [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

### **BUKU LAPORAN**

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2003, Bappeda Kabupaten Bima, 2004
- Beberapa Indikator Penting Sosial Ekonomi Indonesia, 2005, Edisi September 2005, Biro Pusat Statistik, Jakarta
- Bima Dalam Angka 1997, 1997, Biro Pusat Statistik Kabupaten Bima
- Bima Dalam Angka 2003, 2003, Biro Pusat Statistik Kabupaten Bima
- Bima Dalam Angka 2004, 2004, Biro Pusat Statistik Kabupaten Bima
- Indonesia Laporan Pembangunan Manusia, 2001, Biro Pusat Statistik
- Laporan Akhir Rencana Pengembangan Usaha (*Bisnis Plan*) KAPET Bima dan Pra Studi Kelayakan Investasi, 2004, BP KAPET Bima dan Pusat Penelitian Perencanaan Regional Universitas Mataram
- Laporan Pengembangan IPM Propinsi NTB, 1996, Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat
- \_\_\_\_\_, 2003, Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat

Neraca Nasional dan Pendapatan Regional, 1996, Biro Pusat Statistik

\_\_\_\_\_, 2003, Biro Pusat Statistik

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun 1995-1998, Biro Pusat Statistik, Jakarta

\_\_\_\_\_, Tahun 1997-2000, Biro Pusat Statistik, Jakarta

\_\_\_\_\_, Tahun 2000-2003, Biro Pusat Statistik, Jakarta

Rencana Induk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Buku I Rencana Strategis) , 2000, BP Kapet Bima-BPPT

**LAMPIRAN**